

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

WULANDARI HERMAWATI

NIM. 500898165

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT**THE EFFECT OF GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURE TO ECONOMIC GROWTH IN NORTH KALIMANTAN PROVINCE**

Wulandari Hermawati
wulandari.h@gmail.com

Graduate Studies Program
Universitas Terbuka

This study aims to determine the effect of government capital expenditure and economic growth in North Kalimantan (2012-2016) using linear regression analysis and panel data. As a developing country, Indonesia is still lacking in infrastructure development. Infrastructure development is believed to have a positive impact on improving productivity. Increased productivity will support economic growth in the long term so that the inhibition of the development of factors of production by itself will hamper productivity and ultimately hamper economic growth. The economy is said to grow if there is an increase from the previous year or period. To know the economic growth, comparison should be done from year to year. This comparison is known as economic growth rate. There are many indicators that can be used to measure economic growth in a region, including the number of Gross Regional Domestic Product (GRDP). The results showed that capital expenditures affecting economic growth were Capital Expenditures of Land and Capital Expenditures of Equipment and Machinery, while Capital Expenditure of Buildings and Buildings, Capital Expenditure of Irrigation Road and Network and Other Capital Expenditures had no significant effect.

Keyword: *Government Capital Expenditure, economic growth, infrstructure, Gross Regional Domestic Product*



ABSTRAK

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Wulandari Hermawati
wulandari.h@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDRB di Kalimantan Utara (2012-2016) dengan menggunakan analisis regresi linear dan data panel. Pembangunan di Indonesia dianggap masih tertinggal khususnya dalam pilar infrastruktur yang diyakini berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sehingga terhambatnya pembangunan faktor produksi dengan sendirinya akan menghambat produktivitas dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, harus dilakukan perbandingan dari tahun ke tahun yang dikenal dengan istilah laju pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, di antaranya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Belanja modal yang disertakan dalam data ini meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Lainnya tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, PDRB



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Penyusun TAPM : Wulandari Hermawati

NIM : 500898165

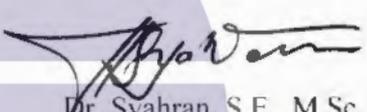
Program Studi : Magister Manajemen

Menyetujui :

Pembimbing II


Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP 196606191992031002

Pembimbing I

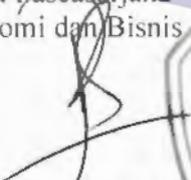

Dr. Syahran, S.E., M.Sc.
NIDN. 1107087501

Penguji Ahli

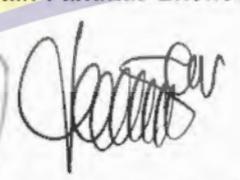

Dr. Agus Maulana, M.S.M.

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana
Ekonomi dan Bisnis


Rini Yayuk Priyati, S.E. M.Ec., Ph.D.
NIP 197610122001122002

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Ali Muktiyanto, S.E. M.Si.
NIP 197208242000121001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Wulandari Hermawati
NIM : 500898165
Program Studi : Magister Manajemen
Judul TAPM : Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juli 2018

Waktu : 17.15 WITE

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr Sofjan Aripin, M.Si.

Tandatangan

Penguji Ahli

Nama : Dr. Agus Maulana, M.S.M.

Pembimbing I

Nama : Dr. Syahrhan, S.E., M.Sc.

Pembimbing II

Nama : Dr Sofjan Aripin, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Bidang Minat Keuangan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, Mbus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka;
3. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si. sebagai Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPs pada LPPMP Universitas Terbuka;
4. Ibu Rini Yayuk Priyati, S.E., M.Ec., Ph.D. sebagai Ketua Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis dan Pengelola Program Magister Manajemen;
5. Bapak Sofjan Aripin, M.Si. Tarakan yang selalu membimbing dan memotivasi mahasiswa sejak awal masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini;
6. Bapak Dr. Syahrhan, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing I yang senantiasa mencurahkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis menyusun tesis ini;
7. Seluruh dosen serta jajaran UPBJJ Universitas Terbuka Tarakan yang selalu membantu penulis selama proses perkuliahan;
8. BPK Kalimantan Utara, BPS Tarakan, serta pemerintah daerah kota dan kabupaten se-Kalimantan Utara atas dukungan data yang diberikan;
9. Suami, anak-anak dan keluargaku atas segala doa dan dukungan yang diberikan.

Akhirnya, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tarakan, Mei 2018
Wulandari Hermawati

RIWAYAT HIDUP

Nama : Wulandari Hermawati
 NIM : 500898165
 Program Studi : Magister Manajemen Bidang Minat Keuangan
 Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/ 17 Maret 1987

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Karangmojo III pada tahun 1998
 Lulus SMP di SLTPN 1 Karangmojo pada tahun 2001
 Lulus SMA di SMUN 8 Yogyakarta pada tahun 2003
 Lulus D3 di STAN Jakarta pada tahun 2006
 Lulus D4 di STAN Jakarta pada tahun 2010

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2007-2008 sebagai administrasi umum di Pusdiklat BPK
 Tahun 2008-2014 sebagai pemeriksa muda di BPK Kaltim
 Tahun 2014 s.d. sekarang sebagai pemeriksa muda di BPK Kaltara

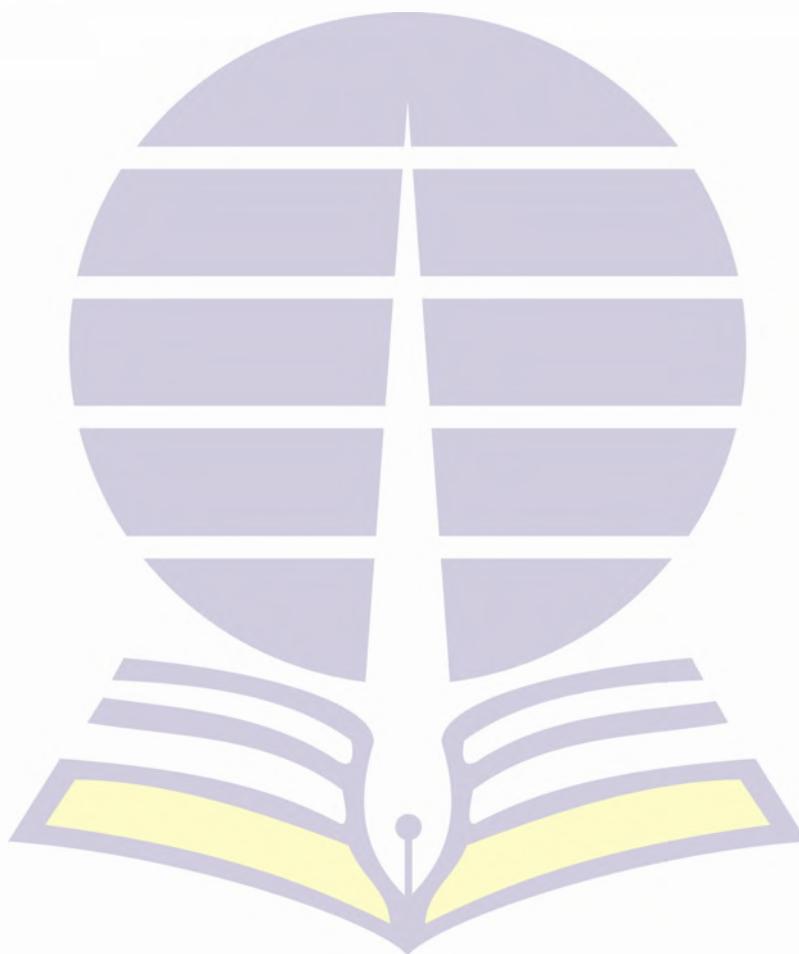
Tarakan, Mei 2018

Wulandari Hermawati
 NIM. 500898165

DAFTAR ISI

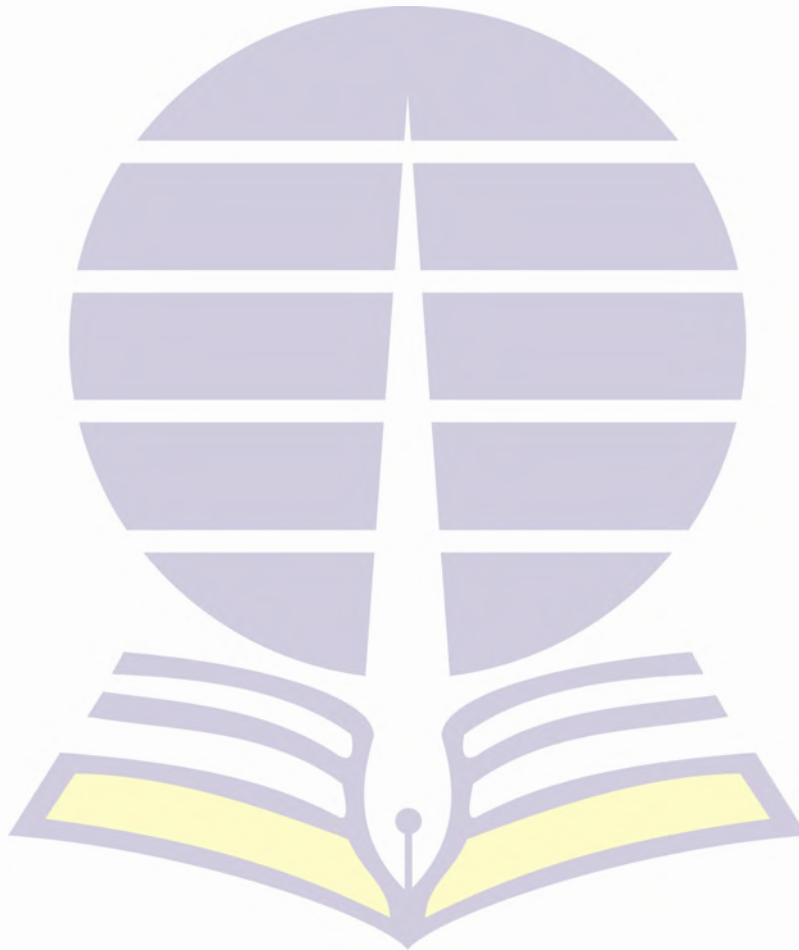
	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR LAYAK UJI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Belanja Modal Infrastruktur	10
B. Pertumbuhan Ekonomi	18
C. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	22
D. Penelitian Sebelumnya	29
E. Kerangka Konsep	30
F. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Data Penelitian	34
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42

B. Analisis Data	78
C. Pembahasan Hasil Penelitian	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	31
---	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 .	43
Grafik 4.2	Peran Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016	44
Grafik 4.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 (dalam persen)	45
Grafik 4.4	Sebaran Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 (dalam persen)	46
Grafik 4.5	PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	51
Grafik 4.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (dalam persen)	52
Grafik 4.7	Belanja Modal Kota Tarakan Tahun 2012-2016	53
Grafik 4.8	PDRB Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	58
Grafik 4.9	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (dalam persen)	59
Grafik 4.10	Belanja Modal Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2016	60
Grafik 4.11	PDRB Kabupaten Nunukan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	64
Grafik 4.12	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nunukan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (dalam persen)	65
Grafik 4.13	Belanja Modal Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016	66
Grafik 4.14	PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	70
Grafik 4.15	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (dalam persen)	71
Grafik 4.16	Belanja Modal Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016	72
Grafik 4.17	PDRB Kabupaten Tana Tidung Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	76
Grafik 4.18	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (dalam persen)	77
Grafik 4.19	Belanja Modal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016	6
Tabel 1.2	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 (Dalam Miliar Rupiah)	7
Tabel 1.3	Belanja Modal dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016	7
Tabel 2.1	Komponen Biaya yang Diakui Dalam Belanja Modal	16
Tabel 4.1	PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)	50
Tabel 4.2	PDRB Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)	57
Tabel 4.3	PDRB Kabupaten Nunukan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)	63
Tabel 4.4	PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)	69
Tabel 4.2	PDRB Kabupaten KTT Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)	75
Tabel 4.6	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2012 menyatakan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam tingkat daya saing pada pilar infrastruktur, pilar kesiapan teknologi, dan pilar inovasi. Hambatan pada pilar infrastruktur di antaranya adalah masih kurangnya fasilitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta hingga pasokan listrik baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Maryaningsih, Hermansyah, dan Savitri (2004) menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur diyakini berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sehingga, terhambatnya pembangunan faktor produksi dengan sendirinya akan menghambat produktivitas dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, menurut Anderson, de Renzio dan Levy (2006) bukti yang ada mengenai dampak kesejahteraan masyarakat sebagai kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi publik hampir tidak meyakinkan.

Penelitian empiris yang menjelaskan hubungan belanja modal pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan hasil beragam baik positif maupun negatif. Hubungan yang positif dan signifikan ditunjukkan di antaranya dalam penelitian Aschauer (1989) yang membuktikan adanya dampak signifikan pembangunan fisik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa ditunjukkan oleh Easterly dan Rebelo (1993). Barro (1991) dalam penelitiannya

juga menyimpulkan bahwa investasi publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, hasil penelitian Barro menunjukkan bahwa pengaruh positif tersebut tidak signifikan besarnya. Hasil penelitian Barro dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Holtz-Eakin (1994) di Amerika Serikat.

Berlawanan dengan hasil penelitian Aschauer (1989) serta Easterly dan Rebelo (1993), penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Lee (2005) di Taiwan menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian Chen dan Lee, besarnya jumlah pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara karena pengeluaran tersebut memicu terjadinya peningkatan pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Chen dan Lee, penelitian yang dilakukan oleh Devarajan dan Zhou (1996) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan sarana transportasi dan komunikasi memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil beragam ditemui dalam penelitian mengenai hubungan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yanuar (2006) menggunakan data panel 26 provinsi untuk menyimpulkan bahwa output perekonomian dipengaruhi secara positif oleh infrastruktur jalan, telepon, fasilitas kesehatan serta pendidikan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh BAPPENAS (2006) bahwa peningkatan belanja modal akan berdampak positif terhadap perbaikan kinerja ekonomi makro regional maupun nasional. Bertolak belakang dengan hasil tersebut, Anasmen (2009) menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah tidak berpengaruh cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan tolok ukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Penelitian Saez dan Rodriguez (2017) menunjukkan bukti baru mengenai dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Uni Eropa. Saez dan Rodriguez menggunakan data panel dari lima belas negara Uni Eropa untuk periode 1994-2012. Dalam penelitiannya, Saez dan Rodriguez menemukan hubungan yang positif untuk beberapa negara (Portugal dan Inggris), hubungan yang negatif di negara lain (Austria, Finlandia, Italia dan Swedia) atau bahkan tidak signifikan (Belgia, Prancis, Yunani, Irlandia, Luksemburg, Belanda dan Spanyol). Secara agregat, Saez dan Rodriguez menyimpulkan bahwa selama periode 1994-2012 dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Uni Eropa adalah negatif. Secara keseluruhan, hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara belanja modal pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil beragam, positif maupun negatif.

Barro (1990) memperkenalkan teori bahwa ketika pemerintah relatif kecil, pertumbuhan meningkat dengan kenaikan pelayanan pemerintah yang produktif karena efek positif dari barang publik semakin mendominasi, namun, semakin besar ukuran pemerintah, efek disinsentif dari pajak yang lebih tinggi untuk tabungan dan investasi mengurangi tingkat pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bukti yang mendukung efek nonlinier, namun tidak seperti yang diperkirakan oleh hipotesis nonlinier Barro. Ketika total pengeluaran pemerintah rendah, kami tidak menemukan dampak yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian Barro menunjukkan bahwa setelah melewati ambang batas tertentu (26 persen untuk negara maju dan 33 persen untuk negara

berkembang), pengeluaran pemerintah menunjukkan dampak negatif yang kuat terhadap pertumbuhan.

Pola ini tetap sama bahkan ketika pengeluaran pemerintah yang produktif dipilih. Hasilnya secara kualitatif kuat terhadap berbagai spesifikasi dan estimasi Teknik. Penelitian Ambya (2014), menggunakan variabel belanja pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan tenaga kerja. Penelitian ini juga memasukkan variabel dummy yaitu kabupaten/kota dan dummy sektor basis 9 sektor ekonomi. Dari pengujian disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan riil per kapita, kesehatan riil per kapita dan infrastruktur riil per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Garba dan Abdullahi (2013), melakukan penelitian untuk mendebat hasil penelitian sebelumnya tentang arah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan belanja publik, yang menemukan bahwa kausalitas antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria adalah dua arah, bukan searah.

Penelitian Tamoya (2011) menunjukkan bahwa kenaikan umum belanja pemerintah dari waktu ke waktu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah yang semakin besar akan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong seruan untuk mengurangi aktivitas pemerintah dan memotong anggaran. Namun, dari pengeluaran pemerintah yang biasanya berakhir pada saat penyesuaian fiskal kategori yang terkait dengan pengeluaran produktif-investasi publik secara fisik infrastruktur, pendidikan dan perawatan kesehatan, misalnya. Pengeluaran di daerah ini telah terbukti memiliki dampak positif pada produksi agregat dan dianggap penting pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Pembuat kebijakan berisiko melakukan lebih banyak kerugian daripada perbaikan

ekonomi mereka dalam jangka panjang jika sesuai tingkat dan komposisi publik pengeluaran tidak terjaga.

Hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa di negara maju, belanja modal pemerintah cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi sedangkan di negara yang masih berkembang belanja modal berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi ini mendorong penulis untuk melihat bagaimana pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengambil studi kasus kabupaten/kota di Kalimantan Utara pada tahun 2012-2016. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terbentuk pada tanggal 16 November 2012 dan mulai menjalankan pemerintahan sendiri pada tanggal 22 April 2013. Provinsi ini mulai melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2014, sehingga penulis tertarik untuk mempelajari hubungan antara belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sejak awal dibentuknya provinsi ini. Sebagai gambaran untuk penelitian ini, disajikan data APDB terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2016

Nama Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Persentase
Tarakan	533.617.694.258	236.475.582.991	44,32%
Bulungan	361.666.585.348	345.126.976.186	95,43%
Nunukan	348.036.255.942	284.615.182.330	81,78%
Malinau	430.040.371.575	327.401.134.684	76,13%
Tana Tidung	461.693.786.778	418.657.319.125	90,68%

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK TA 2016

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan antara belanja modal yang dianggarkan dengan belanja modal riil yang dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Sebagai dasar penelitian untuk mengetahui hubungan antara belanja modal infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, maka data yang digunakan adalah belanja modal riil. Belanja modal yang disertakan dalam data ini meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Data yang digunakan adalah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya, Tabel 1.2 menunjukkan perubahan PDRB di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada tahun 2016. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, maka inflasi dikecualikan sehingga PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016
(Dalam Miliar Rupiah)

Nama Kabupaten/Kota	PDRB 2015	PDRB 2016	Pertumbuhan PDRB
Tarakan	16.790,52	17.764,22	5,80%
Bulungan	9.697,14	9.929,98	2,40%
Nunukan	12.636,53	13.002,64	2,90%
Malinau	6.445,62	6.555,93	1,71%
Tana Tidung	3.235,01	3.262,60	0,85%

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 diperoleh perbandingan antara belanja modal riil pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2016 dengan laju pertumbuhan PDRB pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada tahun 2016, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Belanja Modal dan Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016

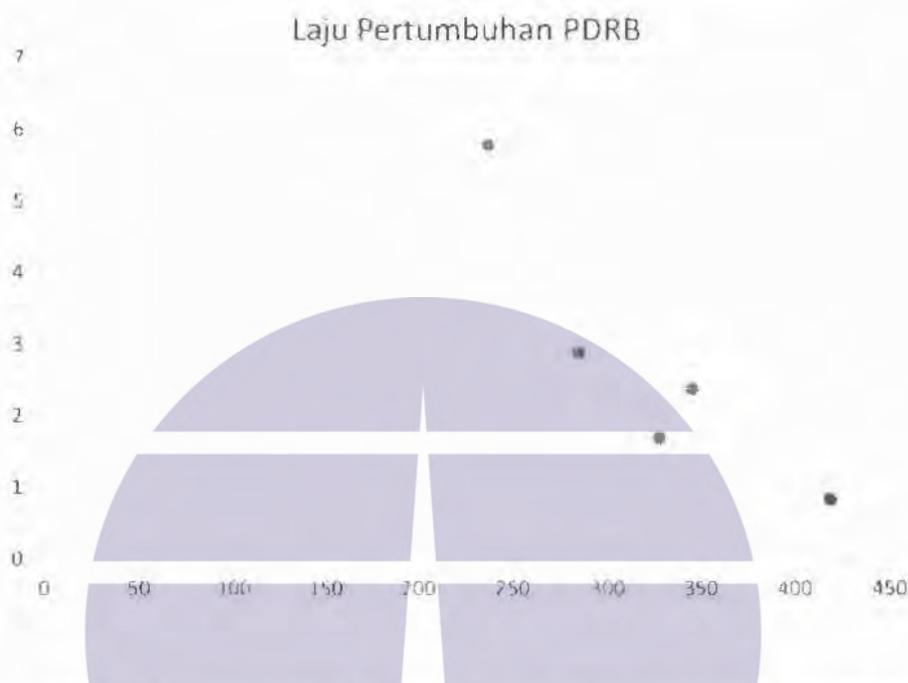
Nama Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Dalam Miliar Rupiah)	Pertumbuhan PDRB (Dalam %)
Tarakan	236,48	5,80
Bulungan	345,12	2,40
Nunukan	284,62	2,90
Malinau	327,40	1,71
Tana Tidung	418,66	0,85

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Data dari Tabel 1.3 tersebut dapat diolah menjadi grafik yang menunjukkan perbandingan antara belanja modal dengan laju pertumbuhan PDRB pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana digambarkan pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1
Grafik Belanja Modal dan Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016



Grafik 1.1 menunjukkan berbagai macam hubungan antara belanja modal dengan laju pertumbuhan PDRB yang dapat berupa hubungan positif maupun negatif. Pola yang tidak serta merta menunjukkan garis lurus baik positif ataupun negatif ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hubungan antara belanja modal dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia yang masih tumbuh dan berkembang.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Utara?”

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan PDRB sebagai variabel dependen. Belanja modal sebagai variabel independen diukur dengan belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan dan jaringan. Data yang akan digunakan adalah data panel tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi dan Kota/Kabupaten di Wilayah Kalimantan Utara. Diharapkan penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan pengaruh besarnya belanja modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan belanja infrastruktur.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan pengaruh besarnya belanja modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan belanja modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut definisi World Bank (2012) adalah perubahan atas jumlah produksi atau perubahan pendapatan riil penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sukirno, 1985:13). Banyak faktor yang terkait dalam pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah pertumbuhan penduduk dan penambahan total produksi. Smith (1776) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada tiga hal yaitu sumber daya alam, tenaga kerja (jumlah penduduk) dan jumlah persediaan (stok barang modal yang ada). Pertambahan penduduk akan menambah jumlah tenaga kerja yang akhirnya memberikan tambahan hasil/produksi. Sumber daya alam yang tersedia harus diolah untuk menghasilkan suatu produk, memerlukan kecukupan tenaga kerja untuk dapat menghasilkan *output* produksi yang maksimal dalam sebuah perekonomian.

Dengan demikian, berdasarkan ketiga pandangan ahli tersebut, pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan perubahan jumlah pendapatan penduduk atau perubahan tingkat produksi, yang dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam, tenaga kerja, serta ketersediaan barang modal.

Model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod Domar memberikan arah kepada pertumbuhan dinamis. Apabila Y adalah GDP dan S adalah tabungan. Tingkat tabungan adalah fungsi dari GDP, dimana $S = sY$. Tingkat

modal K dibutuhkan untuk menghasilkan output Y yang ditentukan oleh persamaan $K = \sigma Y$, di mana σ dinamakan capital-output ratio. Investasi merupakan komponen penting untuk permintaan output sebagaimana peningkatan dalam stok modal. Untuk mencapai ekuilibrium, terjadi keseimbangan penawaran dan permintaan untuk output nasional. Kondisi ekuilibrium menghasilkan $I = S$. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekuilibrium sama dengan rasio marginal tabungan dan capital-output ratio. Ini menunjukkan bagaimana perekonomian dapat tumbuh dimana pertumbuhan kapasitas ekonomi untuk memproduksi sama dengan permintaan untuk output perekonomian. Prediksi utama adalah pertumbuhan GDP proporsional terhadap pengeluaran investasi dalam GDP (Watkins, Valley, Alley dalam Anasmen, 2014: 13). Pendapat ini menggunakan asumsi bahwa adanya tenaga kerja yang menganggur sehingga tidak ada batasan untuk penawaran tenaga kerja serta produksi adalah proporsional terhadap stok mesin.

Model pertumbuhan ekonomi lain yang umum digunakan sebagai acuan adalah *exogeneous growth model* atau *Solow growth model*. Model Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik yaitu tabungan dan investasi serta tenaga kerja atau pertumbuhan populasi (Maryaningsih, Hermansyah dan Savitri, 2014:5). Teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap residual (Todaro dan Smith, 2006: 2). Dengan demikian, tenaga kerja dan modal diasumsikan mengalami *diminishing returns* jika keduanya dianalisis secara terpisah dan *constant returns to scale* apabila keduanya dianalisis secara bersama-sama.

Teori lain yang disebut dengan teori pertumbuhan baru atau *new growth theory* menekankan bahwa hasil pertumbuhan dari peningkatan pengembalian yang diasosiasikan dengan pengetahuan baru. pengetahuan mempunyai sifat kepemilikan yang berbeda dibandingkan dengan barang ekonomi lainnya. Teori pertumbuhan baru dan peningkatan pengembalian pengetahuan mempunyai banyak implikasi untuk kebijaksanaan pembangunan ekonomi (Cortright dalam Anasmen, 2009: 15). Dengan demikian, teori ini lebih menekankan pentingnya investasi dalam penciptaan pengetahuan baru untuk mempertahankan pertumbuhan. Pembuat kebijakan akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada faktor yang memberikan insentif bagi penciptaan pengetahuan, misalnya riset dan penelitian, sistem pendidikan, kewirausahaan, ekspektasi makroekonomi, dan keterbukaan terhadap perdagangan.

Ketiga teori yang umum digunakan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, di mana teori Harrod Domar mengasumsikan bahwa faktor yang terpenting adalah modal dan faktor tenaga kerja diasumsikan memiliki jumlah yang tidak terbatas. Teori Solow menitikberatkan pada faktor tenaga kerja dan bahan baku dengan mengesampingkan faktor teknologi, sedangkan teori pertumbuhan baru sebaliknya, menganggap bahwa pengetahuan dan teknologi baru adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi dikatakan tumbuh apabila ada peningkatan dari tahun atau periode sebelumnya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, harus dilakukan perbandingan dari tahun ke tahun. Perbandingan ini dikenal dengan istilah laju pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Indikator-indikator tersebut di

antaranya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, pendapatan daerah, dan pinjaman. PDRB adalah gambaran total output barang dan jasa yang digunakan di suatu daerah dalam periode tertentu. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan tidak langsung/alokasi. PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat di suatu daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang paling sering digunakan dalam pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan kenaikan atau penurunan nilai PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

Menurut Biro Pusat Statistik (2017), PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. PDRB dapat dinyatakan dalam dua angka yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan mengecualikan faktor inflasi.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik dalam menghitung nilai PDRB (BPS, 2017). Yang pertama adalah pendekatan produksi. Dalam pendekatan produksi, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan, di mana PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yang mendefinisikan PDRB sebagai semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. pengeluaran konsumsi rumah tangga;
2. pengeluaran konsumsi lembaga nonprofitt yang melayani rumah tangga (LNPRT);
3. konsumsi pemerintah;
4. pembentukan modal tetap domestik bruto;
5. perubahan inventori;
6. ekspor neto (nilai ekspor setelah dikurangi impor).

Pendekatan mana pun yang digunakan untuk menghitung nilai PDRB seharusnya akan menghasilkan angka yang sama (BPS, 2017). Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik setiap tahunnya, PDRB disajikan dengan pendekatan pengeluaran yang dirinci menurut komponen permintaan akhir. Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun.

PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan suatu daerah memanfaatkan sumber daya ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap komponen pengeluaran dari tahun ke tahun.

Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan peranan setiap komponen pengeluaran dalam suatu daerah. Komponen dengan peran terbesar menunjukkan alokasi penggunaan terbanyak dari nilai tambah yang telah tercipta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah (BPS, 2017).

B. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori Keynesian menganggap pengeluaran pemerintah dan pengeluaran publik sebagai faktor eksogen yang dapat digunakan sebagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah menambah agregat permintaan, dan akan meningkatkan produksi yang tergantung pada efek *multiplier* yang dihasilkan belanja itu sendiri. Teori Keynesian meyakini bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak penelitian pengeluaran pemerintah yang umum juga disebut *government spending*, kerap diperdebatkan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Lin (1994 dalam Ambya, 2014: 17), salah satu jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah penyediaan barang dan infrastruktur publik, pelayanan sosial dan intervensi seperti subsidi dan ekspor.

Chude (2013), menyatakan peningkatan konsumsi pemerintah, dapat menurunkan pengangguran, meningkatkan profitabilitas, dan investasi melalui *multiplier effects* pada agregat permintaan. Dengan demikian, menurut pendapat ini, peran pemerintah daerah dituntut secara aktif mengelola dan mengembangkan

sektor publik dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Menurut Shrestha (2009), pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, serta rasio belanja modal terhadap total pengeluaran, pengeluaran rutin, dan rasio defisit keuangan terhadap GDP riil per kapita. Hasilnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap GDP riil per kapita, sedangkan rasio belanja modal terhadap total pengeluaran berpengaruh positif signifikan.

Pendapat-pendapat ahli tersebut menunjukkan dua hal bertentangan, di mana teori Keynesian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh Ambya (2014) dan Chude (2013), sedangkan teori lain mendebat hal tersebut dengan menyatakan bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah justru akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara sebagaimana dikemukakan oleh Shrestha (2009).

Sebagian besar investasi sektor publik di negara-negara berkembang juga dilakukan oleh badan usaha milik negara (Khan dan Kumar, 1997: 2). Pada banyak negara, kebijakan industri dan kerangka peraturan telah menghubungkan produksi sektor swasta secara langsung dengan kegiatan sektor publik baik di pasar barang dan faktor. Misalnya, perluasan kapasitas perusahaan publik untuk menghasilkan input industri diperlukan sebelum sektor swasta dapat melakukan investasi di sektor-sektor yang bergantung pada input dasar ini. Namun, mengingat peran pervasif perusahaan publik di banyak negara, perluasan kapasitas oleh perusahaan semacam itu dapat mengarah langsung pada peningkatan investasi sektor swasta untuk memberikan masukan tambahan.

Jadi, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Khan dan Kumar (1997) tersebut, negara berkembang membutuhkan investasi tidak hanya oleh pemerintah,

melainkan juga investasi dari pihak lain baik dari badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta.

Dari perspektif kebijakan, jika investasi publik memiliki dampak yang lebih lemah terhadap pertumbuhan daripada investasi swasta, maka akan menyoroti kebutuhan untuk merasionalisasi investasi publik dan privatisasi kegiatan milik negara. Dari perspektif teoretis, jika investasi publik dan swasta memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan, akan ada implikasi penting untuk menentukan jalur pertumbuhan mapan dan juga untuk konvergensi pendapatan per kapita riil (Mankiw, Romer, and Weil, 1992: 1).

Barro (1990) memperkenalkan hubungan non monotonik melalui efek distorsi yang meningkat meningkatkan tarif pajak yang dibutuhkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang lebih besar. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam model Barro, ketika pemerintah relatif kecil, pertumbuhan meningkat dengan kenaikan pelayanan pemerintah yang produktif karena efek positif dari barang publik semakin mendominasi, namun di luar beberapa titik kritis, efek disinsentif dari pajak yang lebih tinggi untuk tabungan dan investasi mengurangi tingkat pertumbuhan.

Kedua teori tersebut meyakini bahwa dampak investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, namun dengan alasan yang berbeda. Mankiw, Romer, and Weil (1992) menyatakan bahwa tidak signifikannya pengaruh investasi pemerintah disebabkan karena pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan teori Barro (1990) meyakini bahwa ukuran pemerintah dan besaran investasi yang dilakukan pemerintahlah yang

menentukan apakah investasi sektor publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif.

Jika hipotesis nonlinier valid dan efek belanja pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat berbeda dengan ukurannya, ini akan terjadi tidak hanya membantu menjelaskan temuan ambigu dalam literatur pertumbuhan empiris, tapi juga akan menawarkan panduan yang lebih jelas mengenai resep kebijakan fiskal yang tepat untuk suatu negara dengan ukuran pemerintah tertentu. Selanjutnya, tersirat dalam hipotesis nonlinier adalah adanya beberapa ukuran optimal pemerintahan yang akan memaksimalkan ekonomi pertumbuhan. Memiliki indikasi optimisme hipotetis ini, dan di mana sebuah negara berdiri. Sehubungan dengan itu, harus menjadi kepentingan potensial bagi pembuat kebijakan. Titik optimal cenderung berbeda untuk masing-masing negara tergantung pada berbagai faktor yang mungkin menonjolkan atau menonjolkan titik impas.

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang mendukung efek nonlinier, namun tidak seperti yang diperkirakan oleh hipotesis nonlinier Barro. Ketika total pengeluaran pemerintah rendah, kami tidak menemukan dampak yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah melewati ambang batas tertentu (26 persen untuk negara maju dan 33 persen untuk negara berkembang), pengeluaran pemerintah menunjukkan dampak negatif yang kuat terhadap pertumbuhan. Pola ini tetap sama bahkan ketika pengeluaran pemerintah yang produktif dipilih. Hasilnya secara kualitatif kuat terhadap berbagai spesifikasi dan estimasi teknik. Penelitian Ambya (2014), menggunakan variabel belanja pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan tenaga kerja.

Penelitian ini juga memasukkan variabel dummy yaitu kabupaten/kota dan dummy sektor basis 9 sektor ekonomi. Dari pengujian disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan riil per kapita, kesehatan riil per kapita dan infrastruktur riil per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Garba dan Abdullahi (2013), melakukan penelitian untuk mendebate hasil penelitian sebelumnya tentang arah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan belanja publik, yang menemukan bahwa kausalitas antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi adalah dua arah, bukan searah.

Menurut Barro (1990) serta Turnovsky dan Fisher (1995), pendekatan tradisional dalam model pertumbuhan endogen untuk menganalisis komposisi belanja pemerintah telah membaginya menjadi dua kategori besar ditunjuk sebagai produktif dan tidak produktif. Belanja pemerintah yang produktif secara definisi saling melengkapi dengan proses produksi: meningkatkan produktivitas marginal dari faktor produksi swasta dan dengan demikian merangsang pertumbuhan. Pengeluaran publik yang tidak produktif, di sisi lain, tidak secara langsung mempengaruhi produksi, namun harus dibiayai dari pendapatan pajak, dan menguras ekonomi. Kesimpulan yang jelas dari kategorisasi ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah harus dialokasikan jauh dari tidak produktif dan menuju pengeluaran produktif. Namun, pengeluaran pemerintah yang produktif bukanlah pengelompokan dan teori yang homogen yang hanya membedakan pengeluaran pemerintah dengan basis luas semacam itu memberikan sedikit panduan mengenai masalah pengalokasian pengeluaran yang paling meningkat.

Kenaikan umum belanja pemerintah dari waktu ke waktu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah yang semakin besar akan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong seruan untuk mengurangi aktivitas pemerintah dan memotong anggaran. Namun, dari pengeluaran pemerintah yang biasanya berakhir pada saat penyesuaian fiskal kategori yang terkait dengan pengeluaran produktif-investasi publik secara fisik infrastruktur, pendidikan dan perawatan kesehatan, misalnya. Pengeluaran di daerah ini telah terbukti memiliki dampak positif pada produksi agregat dan dianggap penting pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Pembuat kebijakan berisiko melakukan lebih banyak kerugian daripada perbaikan ekonomi mereka dalam jangka panjang jika sesuai tingkat dan komposisi publik pengeluaran tidak terjaga, sebagaimana dinyatakan oleh Tamoya (2011: 1).

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Tamoya, Anderson dan Levy (2006: 1) menemukan bahwa hubungan antara investasi publik dan pertumbuhan tidak terbukti. Meskipun ada lebih banyak bukti bahwa modal publik itu produktif, dalam artian ia melengkapi modal swasta dan faktor produksi lainnya, ada kebutuhan yang jelas untuk berhati-hati dengan pilihan tingkat investasi dan alokasi optimal antar sektor. Kasus kenaikan investasi publik perlu dinilai berdasarkan kasus negara per negara, sesuai dengan struktur ekonominya dan persediaan modal fisik awalnya. Dari sudut pandang teknis, analisis biaya-manfaat tetap merupakan metode ideal untuk menentukan keinginan sebagian besar jenis investasi publik di negara mana pun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang sebelumnya dikemukakan oleh Barro (1990) bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Menurut Andeson dan Levy (2006: 1-2), keterbatasan sumber daya dan informasi berarti analisis biaya-manfaat penuh tidak dapat selalu dilakukan. Dalam kasus tersebut, manfaat investasi terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu diukur secara finansial. Satu-satunya pertimbangan yang relevan dalam hal ini adalah memilih metode biaya paling rendah untuk memenuhi kebutuhan atau hak yang diberikan. Bila perbandingan antar sektor diperlukan, seperti dalam menilai portofolio investasi alternatif, model ekuilibrium umum yang dapat dihitung atau *computable general equilibrium* dapat dilakukan. Ini memungkinkan analisis makroekonomi kuantitatif dari berbagai macam kebijakan investasi publik. Pembelanjaan pemerintah juga dapat didekomposisi dengan cara yang memungkinkan perbandingan pilihan kebijakan yang berbeda.

Peran investasi sektor publik dalam menentukan produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang telah menjadi subyek sejumlah studi, di antaranya penelitian Aschauer (1989), Ford and Poret (1991), Munnell (1990), dan Rubin (1991). Di negara-negara industri, terutama di Amerika Serikat, di mana penurunan produktivitas setelah kejutan harga minyak pertama di tahun 1973-1974 dianggap disebabkan oleh kurangnya investasi publik dalam infrastruktur sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Munnell (1990). Dalam kasus negara-negara berkembang, peran masing-masing investasi publik dan swasta dalam proses pertumbuhan mendapat sorotan yang semakin ketat. Kebijakan konvensional

adalah bahwa di negara-negara ini investasi publik di bidang infrastruktur dan dalam pembentukan modal manusia cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta dan memiliki efek menguntungkan terhadap pertumbuhan. Namun, secara umum, pengeluaran investasi publik dapat mengurangi investasi swasta dengan menggunakan sumber daya langka dan dengan demikian memiliki dampak buruk terhadap pertumbuhan sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Khan dan Kumar (1997).

Makhloufi (2011: 1-5) menyebutkan bahwa infrastruktur seperti jaringan transportasi dan jaringan yang tak nampak seperti jaringan informasi dan organisasi memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap sektor swasta misalnya produktivitas produksi, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan output. Efek yang ditimbulkan investasi publik dalam bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan perekonomian juga berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian yang diambil oleh pemerintah.

C. Belanja Modal Infrastruktur di Indonesia

Definisi Infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sarana dan prasarana umum. World Development Report (1994: 1-100) mendefinisikan infrastruktur sebagai jasa-jasa publik (energi listrik, fasilitas air, pekerjaan publik (jalan), dan transportasi yang lain (pelabuhan dan bandar udara). Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Menurut Tatom (1993), infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan kerangka kerja organisasional yang penting untuk organisasi, masyarakat dan pembangunan ekonominya. Infrastruktur adalah

wujud dari modal publik (*public capital*) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, yang meliputi jalan, jembatan, serta sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003: 1).

Lee (2017) menyebutkan bahwa infrastruktur merupakan bagian dari investasi publik atau investasi oleh negara khususnya aset, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah atau melalui industri atau perusahaan publik. Investasi publik diukur secara kuantitatif, setiap tahun, sebagai persentase dari total pendapatan nasional pada periode tertentu. Investasi publik terdiri atas dibagi antara investasi fisik atau nyata di bidang infrastruktur (misalnya transportasi, telekomunikasi dan bangunan); investasi manusia atau tidak berwujud dalam pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan; dan investasi saat ini dalam konsumsi barang dan jasa (misalnya, tunjangan kesejahteraan dan pensiun). Investasi publik umumnya merupakan persentase yang relatif kecil dari keseluruhan belanja publik namun seringkali merupakan komponen utama dari total investasi modal nasional.

Directorate for Public Governance and Territorial Development OECD (2014: 1-57) menyatakan bahwa pada umumnya investasi publik mengacu pada belanja modal untuk infrastruktur fisik (misalnya jalan, bangunan milik pemerintah) dan infrastruktur lunak (misalnya pengembangan modal manusia, dukungan inovasi, penelitian dan pengembangan) dengan penggunaan produktif yang melampaui tahun. Investasi publik terdiri dari investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung didefinisikan sebagai pembentukan dan akuisisi modal bruto, dikurangi pelepasan aset non-finansial non-produksi selama periode tertentu. Investasi tidak langsung didefinisikan sebagai transfer modal yaitu hibah

investasi dan subsidi secara tunai atau sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah subnasional ke institusi lain unit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal juga dimaksudkan untuk pengeluaran biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan perbedaan belanja barang dan belanja modal. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Sedangkan definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan tidak diperuntukkan untuk dijual.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33 tahun 2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS menyebutkan kriteria suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal. Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER-33 tahun 2008, suatu pengeluaran belanja memenuhi syarat sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal dalam laporan keuangan pemerintah terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016).

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005).

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005).

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005).

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005).

Belanja modal lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, buku-buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005).

Biaya perolehan suatu aset tetap yang diperoleh melalui belanja modal terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan

(KSAP, 2016). Komponen-komponen biaya yang dimungkinkan untuk diakui dalam belanja modal berdasarkan jenis belanjanya ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Komponen Biaya yang Diakui
Dalam Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Pembebasan Tanah • Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah • Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah • Belanja Modal Pengurangan dan Pematangan Tanah • Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah • Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya • Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya • Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya • Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

Sumber: Diolah dari Standar Akuntansi Pemerintahan

D. Penelitian Sebelumnya

Penelitian empiris yang menjelaskan pengaruh belanja modal pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda. Pengaruh positif yang cukup signifikan ditunjukkan oleh Aschauer (1989), Easterly dan Rebello (1993), Khan dan Kumar (1997) serta Makhloufi (2011). Di Indonesia, hasil yang positif ditunjukkan dalam penelitian Yanuar (2006) dan BAPENNAS (2006). Yanuar (2006) menggunakan data panel 26 provinsi untuk menyimpulkan bahwa output perekonomian dipengaruhi secara positif oleh infrastruktur jalan, telepon, fasilitas kesehatan serta pendidikan. Pengaruh positif belanja modal pemerintah namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dalam penelitian Barro (1991) serta penelitian Holtz-Eakin (1994).

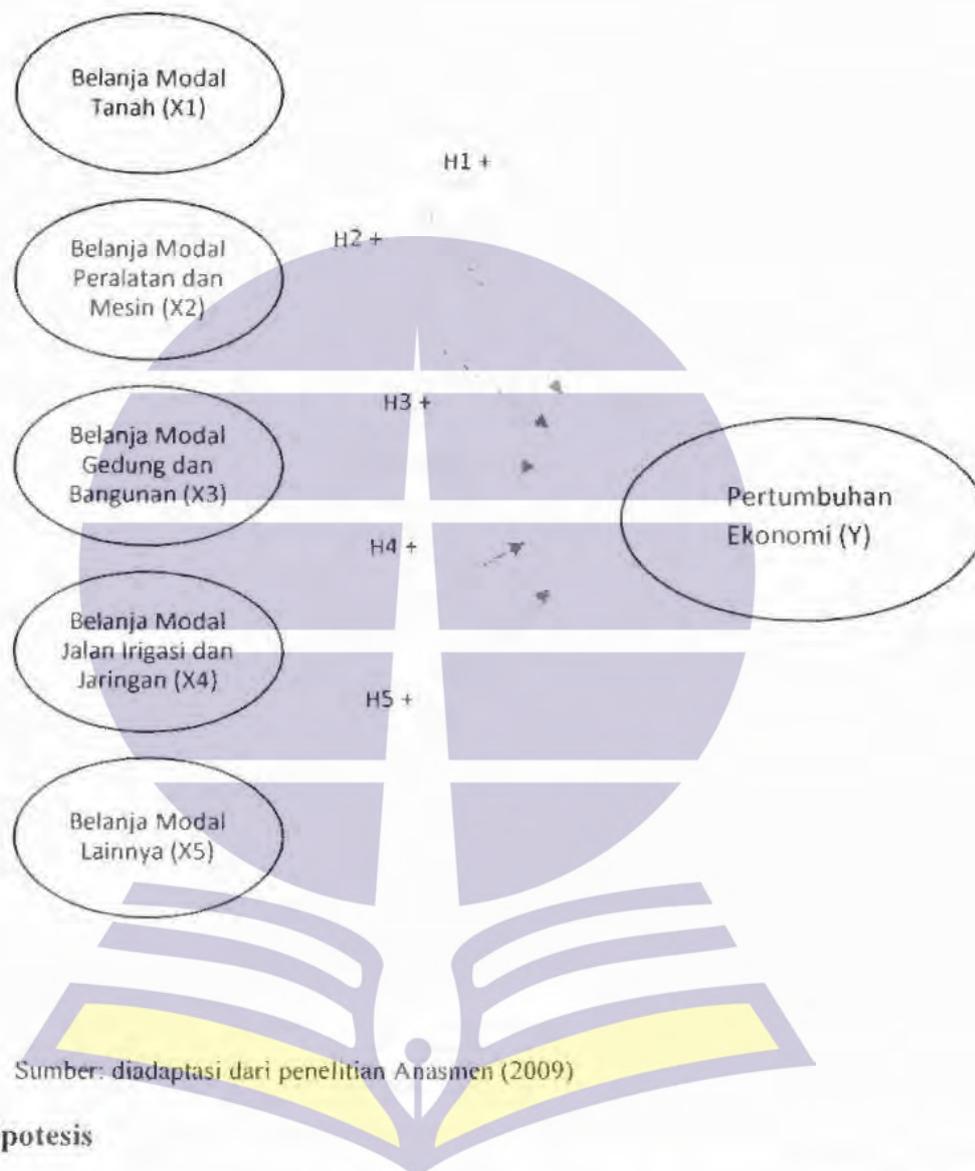
Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh Gonzales dan Paramo (2003) serta Chen dan Lee (2005). Dalam penelitiannya di Taiwan, Chen dan Lee menyimpulkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur cenderung meningkatkan pajak yang harus dikeluarkan pemerintah yang pada akhirnya justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Devarajan dan Zhou (1996) juga menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan sarana transportasi dan komunikasi memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Anasmen (2009) di Sumatra Barat juga menolak hipotesis adanya pengaruh yang signifikan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Saez dan Rodriguez (2017) yang menggunakan data panel dari lima belas negara Uni Eropa untuk periode 1994-2012 menunjukkan hubungan yang positif untuk beberapa negara (Portugal dan Inggris), hubungan yang negatif di negara lain (Austria, Finlandia, Italia dan Swedia) atau bahkan tidak signifikan (Belgia, Prancis, Yunani, Irlandia, Luksemburg, Belanda dan Spanyol). Hipotesis lain yang diajukan oleh Barro (1990) adalah bahwa ketika ukuran pemerintah relatif kecil, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah melewati ambang batas tertentu, pengeluaran pemerintah menunjukkan dampak negatif yang kuat terhadap pertumbuhan. Dalam penelitian Barro, ketika pemerintah relatif kecil, pertumbuhan meningkat dengan kenaikan pelayanan pemerintah yang produktif karena efek positif dari pembangunan, namun setelah melewati titik kritis, efek disinsentif dari pajak yang lebih tinggi untuk tabungan dan investasi mengurangi tingkat pertumbuhan.

E. Kerangka Konsep

Penelitian ini didasari teori dan hasil penelitian empiris yang menyatakan bahwa belanja modal infrastruktur mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, baik pengaruh positif maupun negatif. Subjek penelitian adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia. Penelitian dimaksudkan untuk melihat hubungan antara belanja modal infrastruktur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB di daerah yang baru berkembang. Kerangka konsep penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Konsep
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

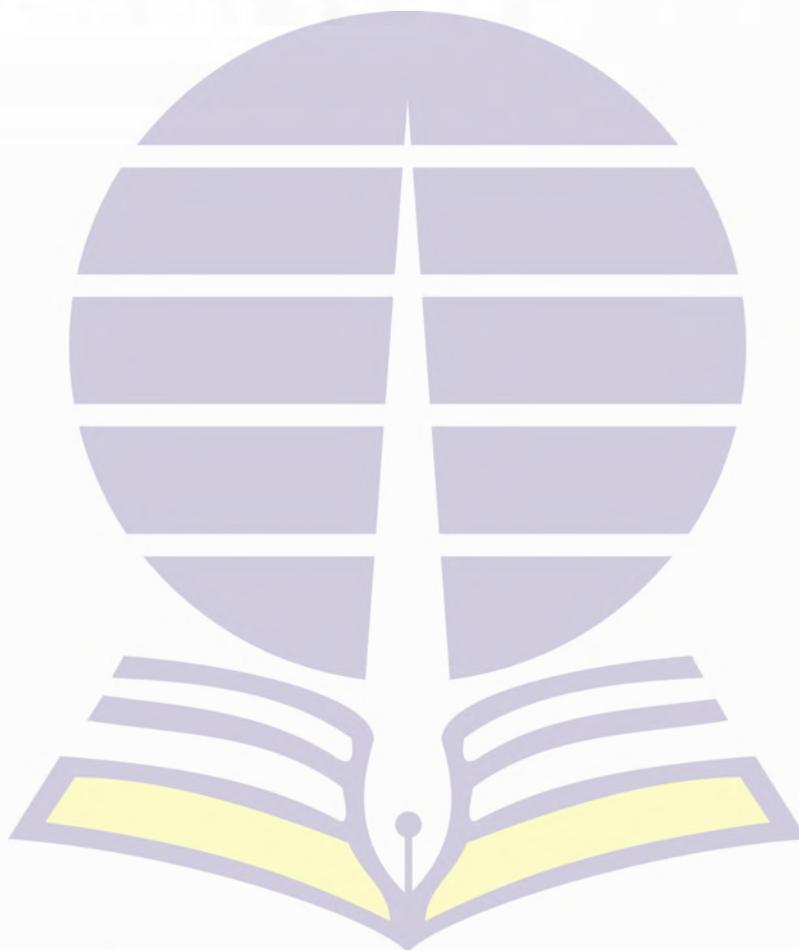


F. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Belanja modal peralatan dan mesin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Belanja modal gedung dan bangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Belanja modal lainnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yang bertujuan menguji hipotesis (*hypotheses testing*) untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian hipotesis umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Indriantoro dan Supomo, 2002: 51). Pengujian yang dilakukan yaitu apakah variabel belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; serta belanja modal lainnya berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan pengamatan pada tahun anggaran 2012-2016. Jumlah kabupaten dan kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah lima daerah dengan periode pengamatan lima tahun, sehingga nilai observasi dari penelitian ini sejumlah 25 observasi yang mencakup seluruh populasi.

C. Data Penelitian

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari publikasi yang bersumber dari:

1. Publikasi Badan Pusat Statistik berupa angka Produk Domestik Regional Bruto.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berupa realisasi belanja dari laporan keuangan yang telah diaudit serta temuan pemeriksaan yang relevan.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.
4. Catatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Bagian Tak Terpisahkan dari LKPD Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

2. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan basis data. Permintaan data dalam bentuk dokumen disampaikan oleh peneliti kepada BPK RI serta melihat publikasi cetak dan online yang tersedia dari Badan Pusat Statistik terkait dengan PDRB. Selain data sekunder yang berasal dari dokumen, data dalam penelitian ini juga diambil melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis, literatur, jurnal, artikel, dan pengetahuan yang dianggap relevan dengan pembahasan.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

I. Variabel penelitian

a. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sunyoto, 2013).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- X1 = Belanja modal tanah.
- X2 = Belanja modal peralatan dan mesin.
- X3 = Belanja modal gedung dan bangunan.
- X4 = Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- X5 = Belanja modal lainnya.

b. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sunyoto, 2013). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dilambangkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 yang merupakan gambaran output dari fungsi input unit-unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam periode tertentu.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara

pengukuran kontrak yang lebih baik (Sugiyono, 2012). Adapun variabel penelitian beserta definisi operasionalnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005). Nilai belanja modal tanah dalam penelitian ini diukur dari nilai realisasi belanja tanah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005).). Nilai belanja modal peralatan dan mesin dalam penelitian ini diukur dari nilai realisasi belanja peralatan dan mesin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan

dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005). Nilai belanja modal gedung dan bangunan dalam penelitian ini diukur dari nilai realisasi belanja gedung dan bangunan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK.

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005). Nilai belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dalam penelitian ini diukur dari nilai realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK.

e. Belanja modal lainnya

Belanja modal lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan. termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, buku-buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005). Nilai belanja modal lainnya dalam penelitian ini diukur dari nilai realisasi

belanja lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK.

f. Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat (Biro Pusat Statistik, 2016). PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam penelitian ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Laju PDRB adalah kenaikan atau penurunan PDRB tahun tertentu dari tahun sebelumnya.

E. Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Dasar

a. Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi apabila variabel-variabel independen memiliki interdependensi yang signifikan. Widarjono (2007) menyebutkan bahwa tujuan uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Korelasi yang tinggi di antara variabel independen akan mengganggu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Multikolinieritas dapat terjadi jika model yang kita punyai merupakan model yang kurang bagus (Widarjono: 113). Untuk dapat melihat ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat angka colinierity statistic yang ditunjukkan oleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan

nilai tolerance, dengan kriteria : jika nilai VIF > dari 10 dan nilai tolerance < dari 0,1 dan R.

b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana variabel random memiliki variance yang berbeda. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Lubis, 2007). Menurut Widarjono (2007) dengan adanya heteroskedastisitas, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) hanya Linear Unbiased Estimator (LUE).

c. Autokorelasi

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono: 155). Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya $(t - 1)$. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan

dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono: 155).

2. Analisis Regresi

Menurut Widarjono (2007), perhatian utama regresi pada dasarnya adalah menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Persamaan regresi populasi hanya dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel sehingga persoalan penting didalam membuat garis regresi sampel adalah bagaimana mendapatkan garis regresi yang nilai prediksinya sedekat mungkin dengan data aktualnya.

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analisis regresi berganda digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor diubah nilainya. Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Persamaan matematis analisis regresi berganda dalam penelitian ini pengujian rumusan hipotesis penelitian akan dilakukan melalui persamaan analisis regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut:

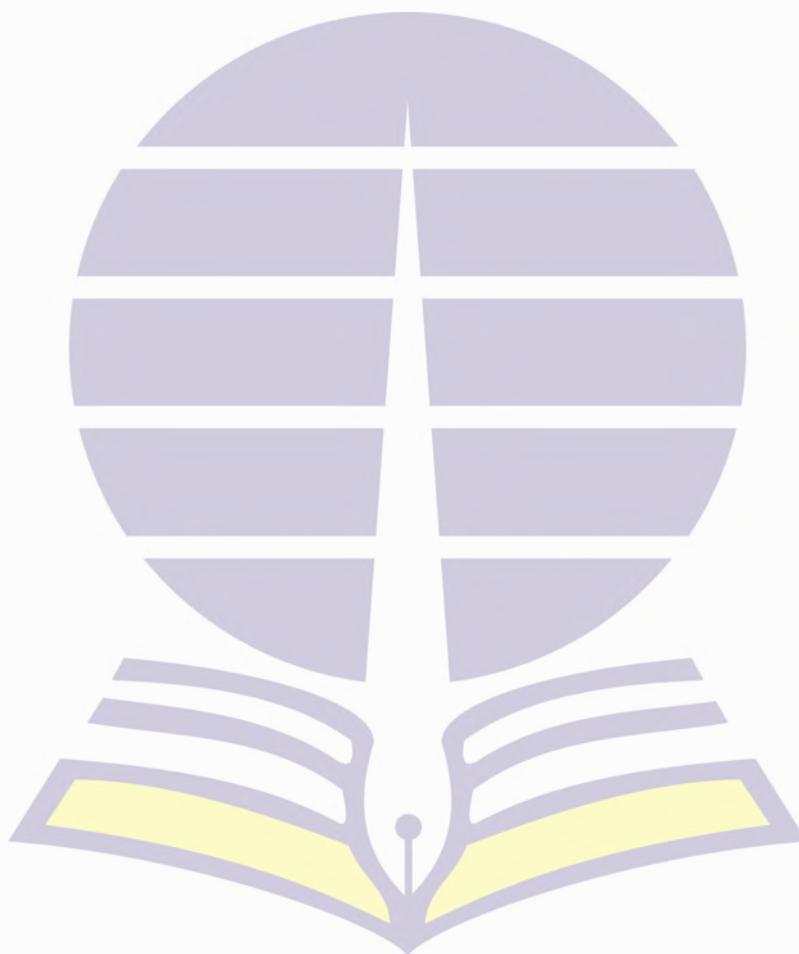
$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5$$

Di mana:

- Y = laju pertumbuhan PDRB
- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- X₁ = belanja modal tanah
- X₂ = belanja modal peralatan dan mesin
- X₃ = belanja modal gedung dan bangunan

X4 = belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

X5 = belanja modal lainnya



BAB IV

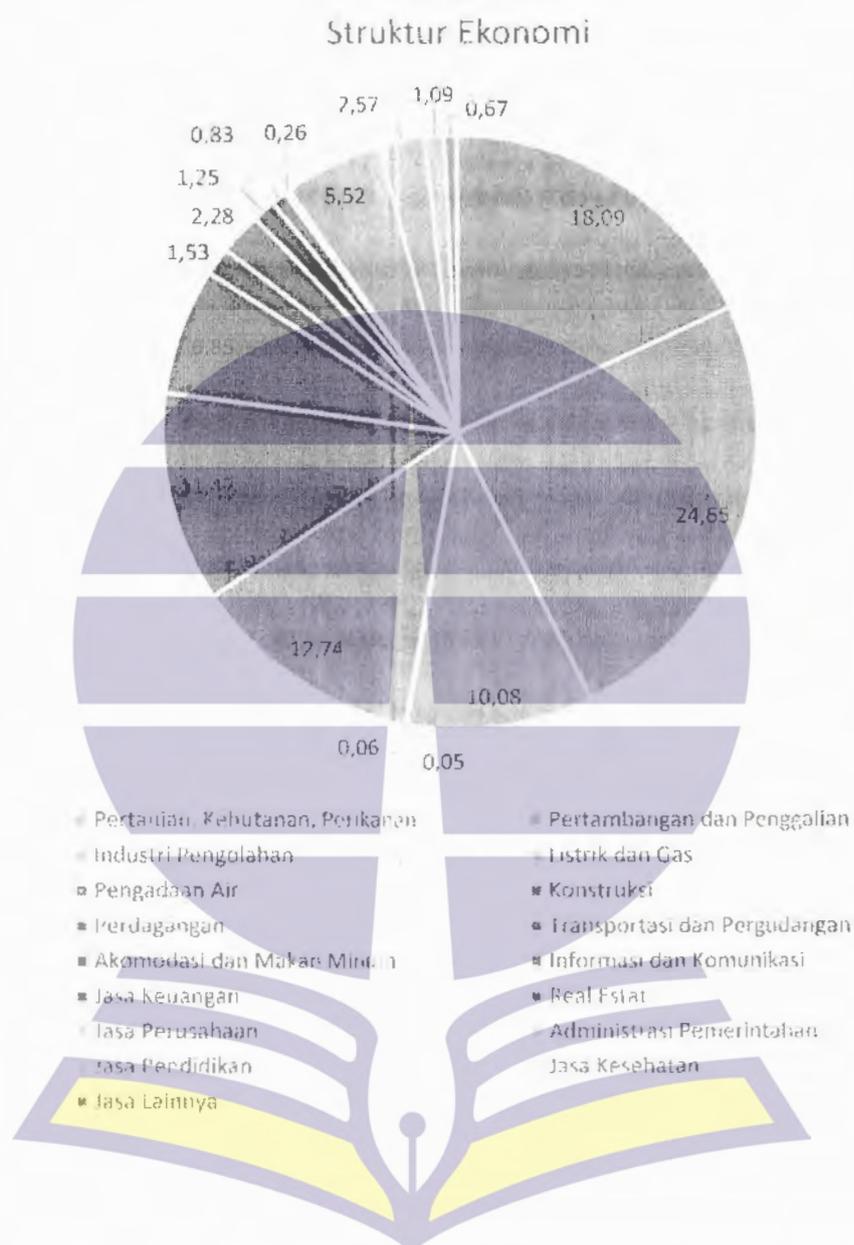
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan Provinsi ke-34 di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai Provinsi baru yang ke 34 di Indonesia secara resmi mulai aktif sejak tanggal 22 April 2013. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas satu kota dan empat kabupaten yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 berdasarkan Tinjauan Regional Biro Pusat Statistik tergambar pada Grafik 4.1.

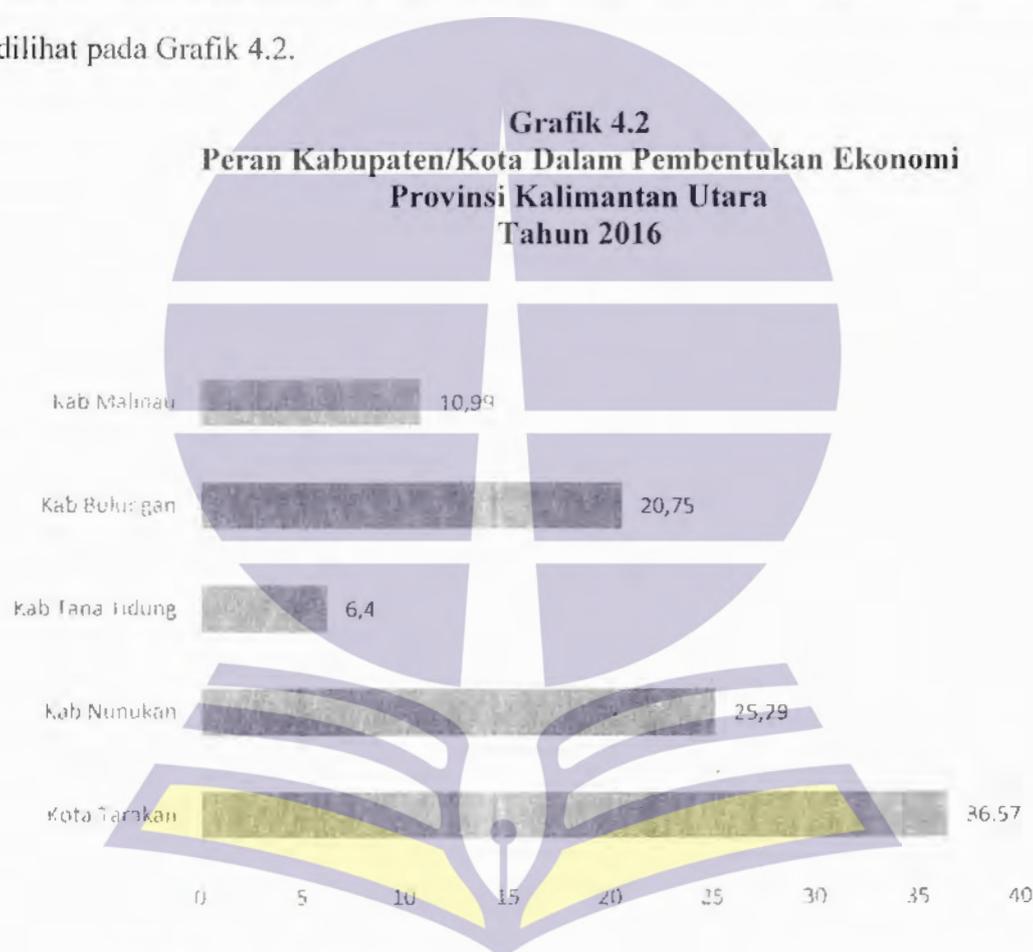
Grafik 4.1
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Berdasarkan data pada Grafik 4.1, ditunjukkan bahwa sektor yang berperan besar dalam membentuk perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 adalah kategori Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 24,65%, disusul dengan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,09% dan Sektor Konstruksi serta Sektor Perdagangan. Total dari keempat kategori tersebut

memberikan kontribusi sebesar 66,95% terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan merupakan wilayah yang memberikan peran paling dominan dalam pembentukan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara dengan kontribusi sebesar 36,57% dilanjutkan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan masing-masing sebesar 25,29% dan 20,75%. Total peranan kabupaten dan kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Grafik 4.2.

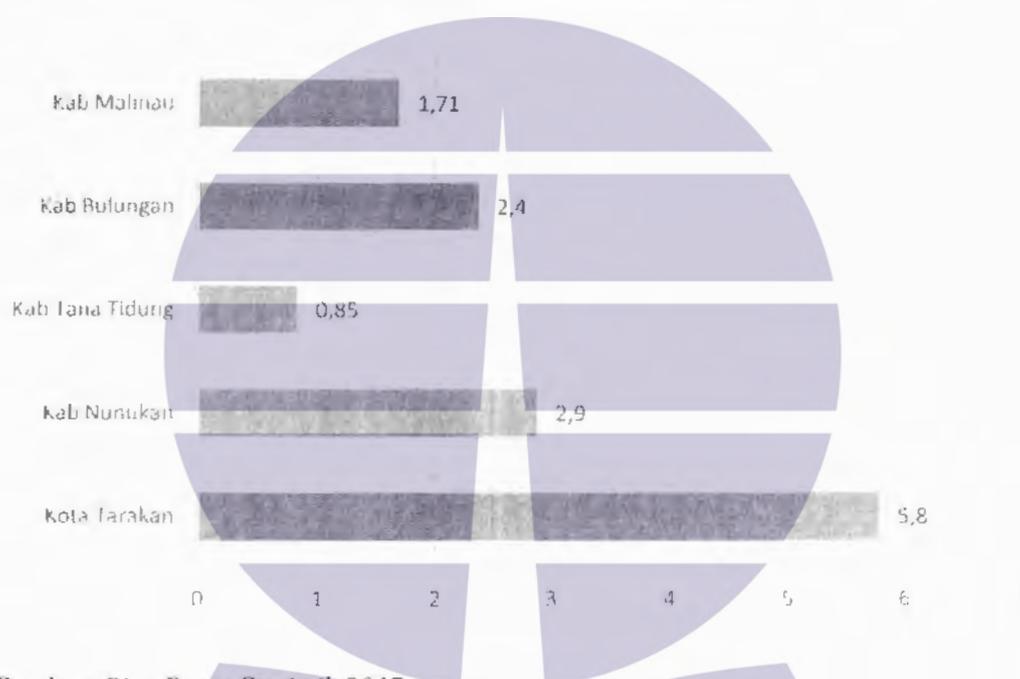


Sumber: *Biro Pusat Statistik 2017*

Dalam hal laju pertumbuhan ekonomi, Kota Tarakan juga menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan tercatat sebesar 5,80%. Angka ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di mana tidak ada kabupaten yang mencapai angka

pertumbuhan ekonomi di atas lima persen pada tahun 2016. Data pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan pada Grafik 4.3.

Grafik 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016 (dalam persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Berdasarkan lapangan usaha yang ada, sebaran ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, lapangan usaha primer menjadi andalan perekonomian di hampir seluruh kabupaten dan kota. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Sektor ini mencakup lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Industri pada sektor primer umumnya merupakan bagian terpenting pada suatu negara berkembang dan menurun tingkat kepentingannya seiring dengan perkembangan negara tersebut menjadi negara maju. Sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil produksi dari usaha sektor

primer menjadi barang jadi. Contoh lapangan usaha pada sektor sekunder adalah usaha manufaktur dan konstruksi. Sedangkan sektor ekonomi tersier juga dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa. Sektor tersier menghasilkan suatu jasa dari produk akhir lapangan usaha sektor sekunder. Persebaran lapangan usaha pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan pada Grafik 4.4.

Grafik 4.4
Sebaran Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016 (dalam persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Data pada Grafik 4.4 menunjukkan bahwa kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada lapangan usaha sektor primer, dengan pengecualian Kota Tarakan yang memiliki sebaran usaha paling banyak pada lapangan usaha sektor tersier. Hal ini disebabkan lapangan usaha di Kota Tarakan didominasi oleh sektor usaha perdagangan dan jasa.

1. Kota Tarakan

Kota Tarakan adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara di mana hampir 62% wilayahnya merupakan perairan laut yang terdiri atas Pulau Tarakan dan Pulau Sadau. Kota ini memiliki luas wilayah 657,33 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Tarakan berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa. Kota Tarakan terletak secara astronomis pada 117°34' - 117°38' bujur timur dan 3°19' - 3°20' lintang utara. Secara administrasi, Kota Tarakan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan di sebelah utara, barat dan selatan, Kabupaten Bulungan dan Laut Sulawesi di sebelah timur. Luas Kota Tarakan terdiri atas daratan seluas 250,80 km² dan wilayah lautan seluas 406,53 km². Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara, yaitu merupakan pusat transit perdagangan antar pulau di wilayah Kalimantan Utara, karena tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, Sesayap dan Malinau. Selain itu Tarakan sebagai penggerak pertumbuhan wilayah Provinsi Kalimantan Utara, juga menjadi pusat transit perdagangan antar negara yaitu Indonesia-Malaysia/Philipina (Tarakan dalam Angka, 2016).

Meskipun beberapa daerah dan kawasan mengalami perlambatan dalam perekonomian, berdasarkan data statistik, Kota Tarakan masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sampai tahun 2015. Saat itu pengaruh ekonomi global dan kawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan komoditas ekspor Kota Tarakan. Namun sejak tahun 2016, perekonomian Kota Tarakan mulai melambat secara tajam tercatat sebesar 3,98 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,64 persen. Hal tersebut disebabkan stimulus fiskal dalam perekonomian yang menurun sejalan dengan program penghematan

belanja yang ditempuh Pemerintah Pusat, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kota Tarakan (LHP BPK Atas LKPD Kota Tarakan, 2016). Pada tahun 2016 Kota Tarakan memiliki program-program strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan dan ketersediaan serta cadangan energy listrik (BBM dan gas)
2. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan serta cadangan air bersih (PDAM)
3. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri.
4. Pengembangan dan pembangunan kawasan pergudangan.
5. Pengembangan dan pembangunan Usaha Kecil Menengah (UKM), kawasan perdagangan serta pusat transaksi perdagangan nasional dan internasional.
6. Pengembangan pembangunan dan peningkatan pelayanan ke pelabuhan dan Bandar Udara.
7. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan sistem transportasi umum.
8. Pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK).
9. Pencegahan, penuntasan dan penanggulangan banjir, tanah longsor dan kawasan rawan kebakaran.
10. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri perkapalan.
11. Pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta kawasan minapolitan.
12. Pengembangan dan pembangunan sektor peternakan, pertanian dan tanaman pangan.
13. Pengembangan dan pembangunan kawasan wisata (wisata kuliner, wisata sejarah dan budaya, wisata rekreasi dan wisata alam).
14. Pengembangan dan pembangunan Kota Gas (City Gas).
15. Pembangunan kawasan pemakaman umum.
16. Penataan kota dan kawasan parkir.
17. Peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat.
18. Perluasan lapangan dan kesempatan kerja.
19. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
20. Pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan.
21. Pengembangan dan pembangunan sektor kesehatan.
22. Pengembangan dan pembangunan sektor keagamaan.
23. Pengembangan dan pembangunan teknologi, seni, budaya dan olahraga.
24. Penataan dan pembangunan infrastruktur kawasan pesisir.
25. Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
26. Pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
27. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tarakan pada tahun 2016 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016, sektor usaha perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 4.998,49 miliar rupiah dari total PDRB sebesar 24.121,85 miliar rupiah atau sebesar 20,72% dari keseluruhan komposisi PDRB. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 di mana sektor perdagangan besar dan eceran menghasilkan sebesar 4.417,17 miliar rupiah. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan mengecualikan inflasi, maka penurunan terjadi sebesar 5,2%. Sektor lain yang memiliki porsi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Tarakan tahun 2016 adalah sektor konstruksi sebesar 14,96%, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,96% dan sektor industri pengolahan sebesar 12,98%. Data PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 4.1.

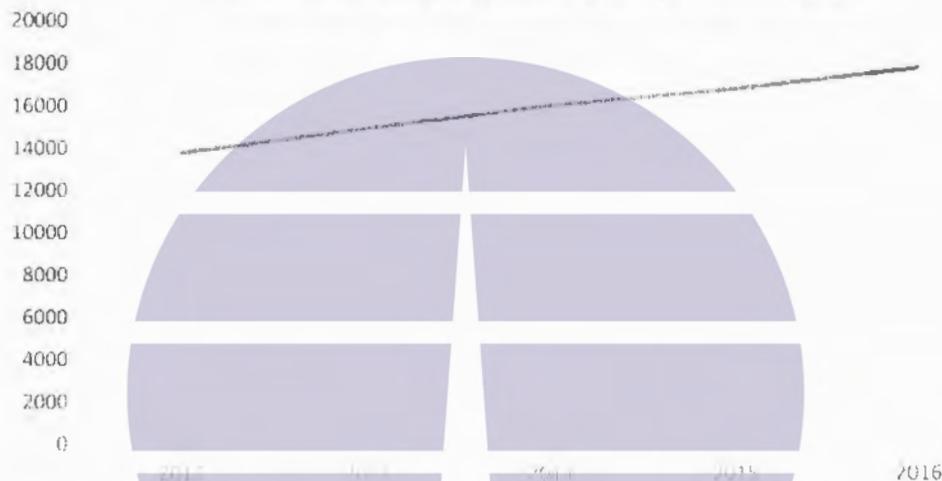
Tabel 4.1
PDRB Kota Tarakan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.829,09
2	Pertambangan dan Penggalian	1.207,18
3	Industri Pengolahan	3.130,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	20,74
6	Konstruksi	3.607,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.998,49
8	Transportasi dan Pergudangan	3.367,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	533,29
10	Informasi dan Komunikasi	884,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	619,77
12	Real Estat	280,13
13	Jasa Perusahaan	141,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.068,96
15	Jasa Pendidikan	706,86
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	487,50
17	Jasa Lainnya	226,85
	PDRB Total	24.121,85

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan tahun 2010 secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Data PDRB Kota Tarakan selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Grafik 4.5.

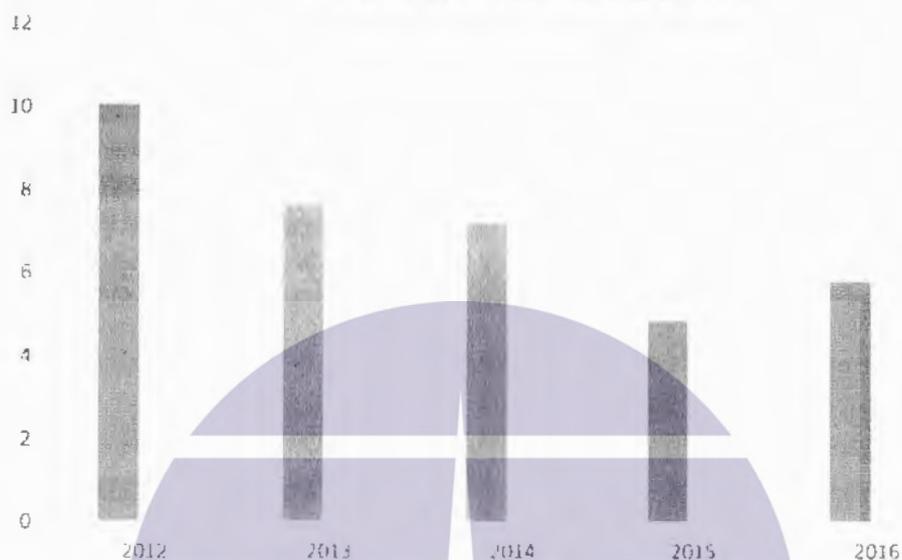
Grafik 4.5
PDRB Kota Tarakan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada Kota Tarakan tahun 2016 adalah sebesar 5,8%, yang juga merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara. Nilai ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,86%. Tren laju pertumbuhan PDRB Kota Tarakan sejak tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan dari 10,08% pada tahun 2012 hingga menjadi 4,86% pada tahun 2015 dan baru naik kembali pada tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tarakan tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Grafik 4.6.

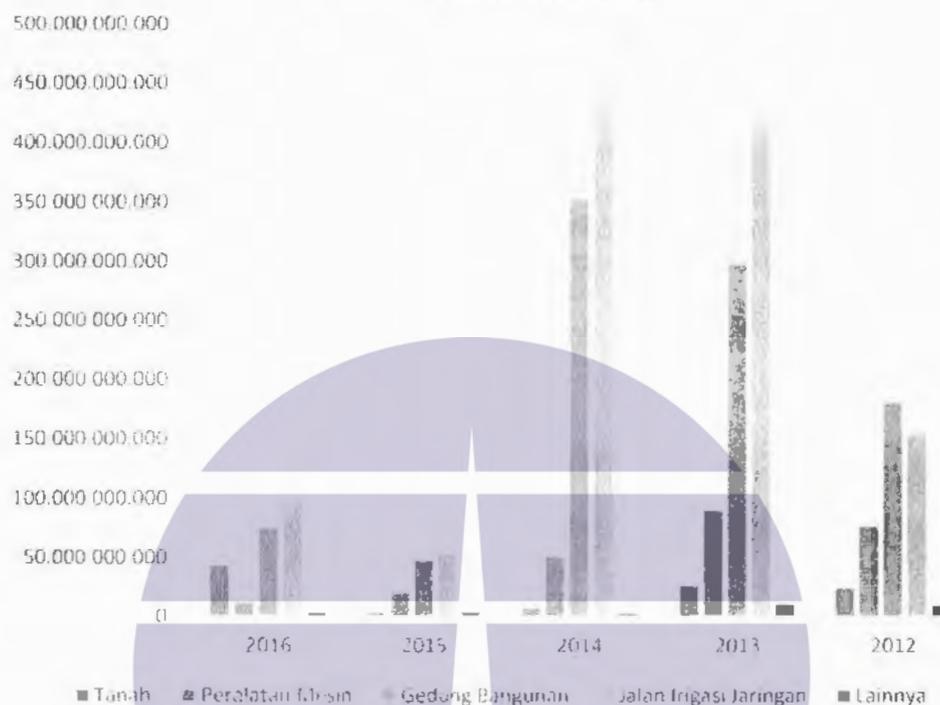
Grafik 4.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tarakan
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2012-2016 (dalam persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Belanja modal Kota Tarakan pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp533.617.694.258,00 dan terealisasi sebesar Rp236.475.582.991,98 atau 44,32% dari anggaran. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh adanya penghematan dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Belanja modal Kota Tarakan tahun 2012 hingga 2016 didominasi oleh Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Keseluruhan data belanja modal Kota Tarakan per jenis belanjanya pada tahun 2016 ditunjukkan pada Grafik 4.7.

Grafik 4.7
Belanja Modal Kota Tarakan
Tahun 2012-2016



Sumber: LHP BPK RI 2017

2. Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang sekaligus merupakan ibukota provinsi. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Selor. Kabupaten Bulungan terletak secara astronomis pada $116^{\circ}04'41''$ - $117^{\circ}57'56''$ bujur timur dan $2^{\circ}09'19''$ - $3^{\circ}34'49''$ lintang utara. Secara administrasi, Kabupaten Bulungan berbatasan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung di sebelah utara, Kota Tarakan dan Laut Sulawesi di sebelah timur, Kabupaten Berau di sebelah selatan dan Kabupaten Malinau di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km² terdiri dari 10 Kecamatan, 81 Desa dan 6 Kelurahan. Berbagai potensi ekonomi yang terdapat

di wilayah Kabupaten Bulungan yang dapat dipertimbangkan guna memberdayakan ekonomi rakyat. di antaranya sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan migas, peternakan, dan pariwisata (Website Resmi Kabupaten Bulungan. diakses tanggal 3 Januari 2018).

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bulungan belum mencapai hasil yang optimal. Penggunaan lahan sawah mengalami penurunan sampai 51,36 % sejak tahun 2000 yang disebabkan pemekaran Kabupaten Bulungan menjadi 3 kabupaten (Moeis Hassan, 2004). Untuk komoditas tanaman sayur-sayuran yang diproduksi di Kabupaten Bulungan antara lain bawang daun, kubis, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung, dan bayam. Pada tahun 2015, produksi sayuran terbesar adalah produksi tanaman kacang panjang sebesar 553.5 ton, diikuti tanaman terung sebesar 428.1 ton, tanaman cabe rawit kecil sebesar 375.2 ton, dan tanaman kangkung sebesar 371,5 ton. Jenis perkebunan yang dikembangkan antara lain kelapa, kopi, kakao, lada, cengkeh, jambu mete dan lainnya yang merupakan budidaya campuran dari beberapa jenis perkebunan. Luas areal perkebunan yang disediakan di Kabupaten Bulungan adalah seluas 152.007 ha, sedangkan lahan yang dimanfaatkan baru sebesar 5,1% atau seluas 7.884 ha dengan produksi sebesar 2.113,57 ton (Bulungan dalam Angka, 2016).

Potensi perikanan yang terdapat di Kabupaten Bulungan seperti budidaya laut dengan luas potensi 242.260 hektar yang sebagian besar belum tergarap, untuk budidaya air payau dengan luas potensi lahan tambak 150.000 hektar, yang telah tergarap 100.000 hektar dan hudidaya air tawar dengan luas potensi lahan 2.701.575 hektar, yang baru tergarap 50 hektar. Kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Bulungan pada umumnya masih berkisar dalam bentuk

usaha rumah tangga (*Home Industry*) seperti Pengeringan / Pengasinan ikan Teri, Putih dan berbagai ikan non ekonomis (*rucuh*), sehingga hal tersebut menjadi potensi yang harus terus dikembangkan untuk kemajuan perekonomian daerah (Buletin Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan, 2016).

Diperkirakan stock asessment / MSV ikan sejumlah 29.000 ton/tahun dengan produksi penangkapan ikan di laut baru 8.671,5 ton/tahun atau hanya 29,9 % dari potensi yang ada. Wilayah perikanan tangkap adalah di sepanjang pantai Kecamatan Tanjung Palas, Bunyu dan Sesayap. Jenis ikan yang ditangkap di perairan Kabupaten Bulungan meliputi jenis ikan pelagis, ikan demersal, ikan karang, udang, ikan kuro, bawal putih, senangin, kerapu, dan kakap. Banyaknya rumah tangga perikanan di Kabupaten Bulungan untuk tahun 2015 adalah 2.952 rumah tangga dengan produksi sebanyak 5.365 ton untuk perikanan tangkap mencakup perairan laut dan perairan umum. Sedangkan rumah tangga untuk perikanan budidaya sebanyak 3.156 rumah tangga dengan produksi sebanyak 3.599 ton mencakup budidaya tambak dan kolam (Buletin Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan, 2016).

Di sektor kehutanan, Kabupaten Bulungan tahun 2014 mempunyai luas 1.026.312,039 hektar yang terbagi kedalam empat kelompok jenis hutan yaitu: hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan lainnya/kawasan budidaya non kehutanan. Pengelolaan hutan tersebut tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Pada tahun 2015 terdapat 8 pemegang HPH dengan luas areal 665.775 hektar. Sedangkan untuk sektor pertambangan, berdasarkan hasil riset Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara tahun 2012, terdapat berbagai jenis bahan galian sumber daya mineral dan

energi merupakan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bulungan antara lain batu gamping, terdapat di Tanjung Palas (3.025 milyar ton) dan Sekatak (27.5 juta ton), batu pasir, terdapat di wilayah kecamatan Tanjung Palas (395,25 juta ton), Peso (2.55 milyar ton), Sekatak (1.402 milyar ton), dan Sesayap (956.25 juta ton), batu bara, terdapat di Tanjung Palas (2 milyar ton), Sungai Aneam – Mentadau (20 juta ton), Tengku Dacing - Desa Tana Merah atau bagian tengah utara, dan bagian barat dari Pulau Mandul - Bunyu (200 juta ton). Kabupaten Bulungan juga memiliki kandungan emas di kecamatan Sekatak, Peso, dan Sesayap Hulu, timah hitam di Sekatak, dan minyak serta gas bumi di Kecamatan Bunyu (LIIP BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan, 2016).

Sedangkan di sektor peternakan, perkembangan produksinya secara kuantitatif menurun sejak tahun 1999 hingga 2014. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, bibit, teknologi dan pakan. Untuk tahun 2014 populasi sapi di Kabupaten Bulungan sebesar 6.497 ekor, kemudian kambing 7.645 ekor, dan kerbau sebanyak 29 ekor. Populasi unggas pada tahun 2014 ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin ayam buras jantan sebanyak 128.950 ekor, betina sebanyak 220.034 ekor, itik jantan sebanyak 1.261 ekor, betina sebanyak 5.225 ekor, dan ayam pedaging sebanyak 792.899 ekor (Website Resmi Kabupaten Bulungan, diakses tanggal 3 Januari 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016, sektor usaha pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 3.837,88 miliar rupiah dari total PDRB sebesar 13.687,42 miliar rupiah atau sebesar 28,04% dari keseluruhan komposisi PDRB.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 di mana sektor pertambangan menghasilkan sebesar 4.136,95 miliar rupiah. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan mengecualikan inflasi, maka penurunan terjadi sebesar 1,5%. Sektor lain yang memiliki porsi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Bulungan tahun 2016 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,06%, sektor industri pengolahan sebesar 14,35% dan sektor perdagangan sebesar 10,86%. Data PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 4.2.

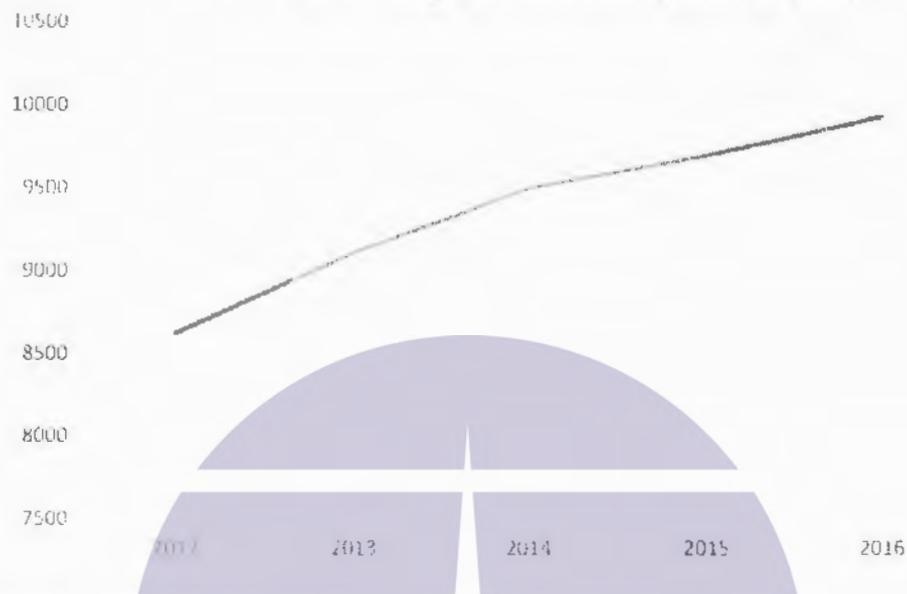
Tabel 4.2
PDRB Kabupaten Bulungan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.471,70
2	Pertambangan dan Penggalian	3.837,88
3	Industri Pengolahan	1.963,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	8,16
6	Konstruksi	1.486,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran	999,20
8	Transportasi dan Pergudangan	575,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	178,40
10	Informasi dan Komunikasi	297,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	113,70
12	Real Estat	149,61
13	Jasa Perusahaan	16,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	923,78
15	Jasa Pendidikan	452,25
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	102,99
17	Jasa Lainnya	106,10
	PDRB Total	13.687,12

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan tahun 2010 secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Data PDRB Kabupaten Bulungan selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Grafik 4.8.

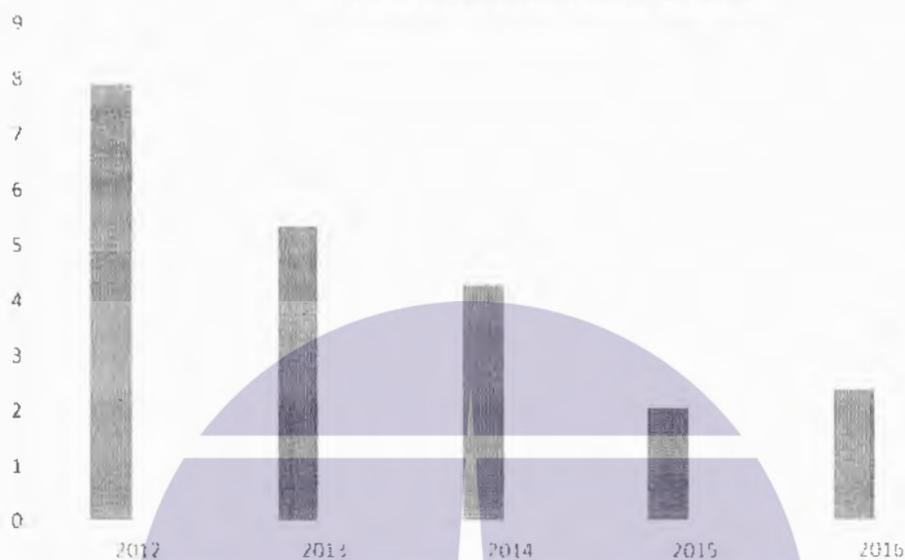
Grafik 4.8
PDRB Kabupaten Bulungan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Bulungan tahun 2016 adalah sebesar 2,4%. Nilai ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2,07%. Tren laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulungan sejak tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan dari 7,92% pada tahun 2012 hingga menjadi 2,07% pada tahun 2015 dan baru naik kembali pada tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulungan tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Grafik 4.9.

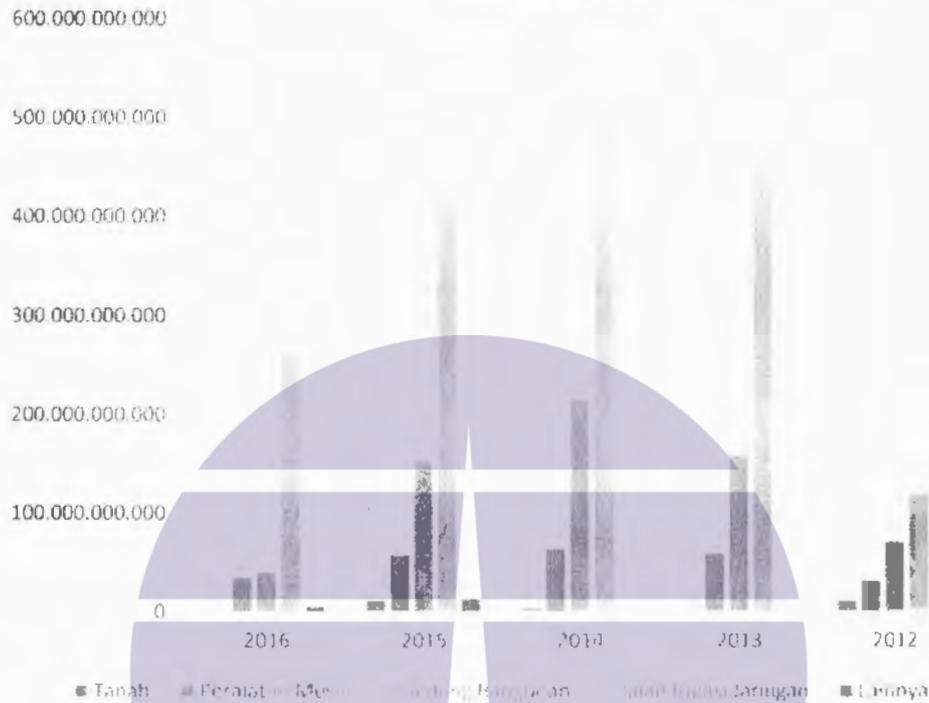
Grafik 4.9
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulungan
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2012-2016 (dalam persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Belanja modal Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp361.666.585.348,36 dan terealisasi sebesar Rp345.126.976.186,00 atau 95,43% dari anggaran. Belanja modal Kabupaten Bulungan tahun 2012 hingga 2016 didominasi oleh Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Keseluruhan data belanja modal Kota Tarakan per jenis belanjanya pada tahun 2016 ditunjukkan pada Grafik 4.10.

Grafik 4.10
Belanja Modal Kabupaten Bulungan
Tahun 2012-2016



Sumber: LHP BPK RI 2017

3. Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada

Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau (Website Resmi Kabupaten Nunukan, diakses tanggal 3 Januari 2018).

Struktur perekonomian Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 sampai dengan 2015 masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan, 2016). Selama kurun waktu tahun 2000 sampai 2011, PDRB atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan, baik dengan migas maupun nonmigas. Dilihat dari perkembangan nilai tambahnya, terlihat bahwa semua sektor mengalami peningkatan. Perkembangan yang paling pesat terdapat pada sektor industri pengolahan yang mencapai seratus dua puluh dua kali lipat dari nilai tambah sektor ini tahun 2000. Besarnya nilai tambah sektor industri pengolahan ini disebabkan beroperasinya perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit (CPO). Kemudian sektor bangunan juga mengalami perkembangan dua puluh enam kali lipat dibanding tahun 2000. Hal ini sudah terlihat sejak tahun 2001 dengan indeks perkembangan 630,75 persen kemudian tahun 2002 sebesar 786,44%, hingga tahun 2011 sudah mencapai 2.669,43% (Nunukan dalam Angka, 2015).

Pembangunan sarana dan prasarana yang tengah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan faktor pendorong meningkatnya nilai tambah sektor bangunan, yang dimulai sejak tahun 2000 (Nunukan dalam Angka, 2015). Demikian juga sektor jasa-jasa yang termasuk di dalamnya jasa pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga mengalami peningkatan nilai tambah sebesar 12 kali lipat dengan indeks perkembangan sebesar 1.291,87%. Selanjutnya sektor pertambangan dan

penggalan juga menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi, dengan indeks perkembangan sebesar 1.125.62% atau 11 kali lebih besar dibanding tahun 2000. Besaran indeks pada sektor ini meningkat tajam pada tahun 2005 hingga tahun 2011 seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia dari US\$ 25-30 menjadi US\$ 90-100 per barel (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan, 2016).

Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan nilai tambah sebesar 6 (enam) kali lipat bila dibandingkan pada tahun dasar yaitu tahun 2000 yang ditunjukkan dengan indeks perkembangan sebesar 679,14%. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebagai sektor tersier dalam kegiatan ekonomi menunjukkan indeks perkembangan sebesar 678,91%. Sedangkan sektor listrik, gas dan air minum sebagai sektor yang vital karena berkenaan dengan hajat hidup orang banyak menunjukkan indeks perkembangan sebesar 490,15%. Sektor yang memiliki indeks perkembangan nilai tambah terendah adalah sektor pertanian. Dibandingkan dengan tahun 2000, nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh sektor pertanian pada tahun 2010 hanya mengalami peningkatan 3 (tiga) kali lipat yang ditunjukkan dengan perkembangan nilai tambah bruto sebesar 340,85% (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Nunukan, 2016).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nunukan pada tahun 2016 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016, sektor usaha pertambangan dan penggalan berkontribusi sebesar 7.401,09 miliar rupiah dari total PDRB sebesar 16.679.65 miliar rupiah atau sebesar 44,37% dari keseluruhan komposisi PDRB. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 di mana sektor pertambangan menghasilkan sebesar 7.441,39 miliar rupiah. Apabila dihitung atas

dasar harga konstan tahun 2010 dengan mengecualikan inflasi, maka penurunan terjadi sebesar 2,06%. Sektor lain yang memiliki porsi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2016 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,82%, sektor industri pengolahan sebesar 8,2% dan sektor konstruksi sebesar 7,3%. Data PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 4.3.

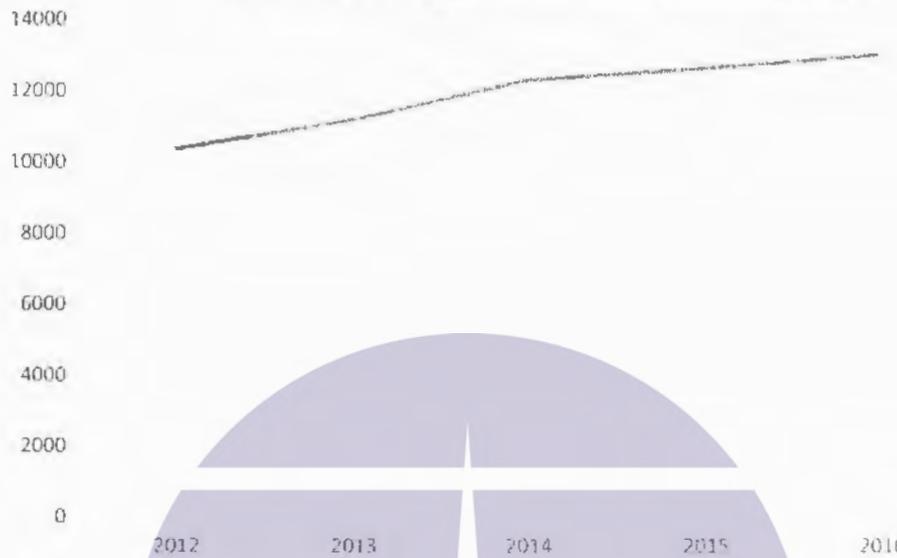
Tabel 4.3
PDRB Kabupaten Nunukan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.972,26
2	Pertambangan dan Penggalian	7.401,09
3	Industri Pengolahan	1.368,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	7,25
6	Konstruksi	1.218,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran	931,11
8	Transportasi dan Pergudangan	356,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,86
10	Informasi dan Komunikasi	275,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	61,61
12	Real Estat	82,87
13	Jasa Perusahaan	6,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	494,63
15	Jasa Pendidikan	252,86
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	4,03
17	Jasa Lainnya	74,29
	PDRB Total	16.679,65

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

PDRB Kabupaten Nunukan atas dasar harga konstan tahun 2010 secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Data PDRB Kabupaten Nunukan selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Grafik 4.11.

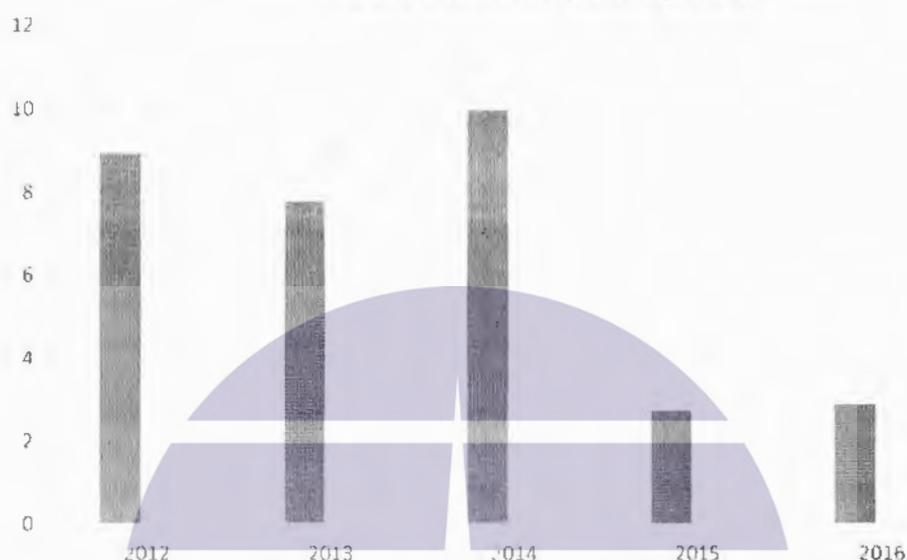
Grafik 4.11
PDRB Kabupaten Nunukan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Nunukan tahun 2016 adalah sebesar 2,9%. Nilai ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2,74%. Tren laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nunukan sejak tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan dari 8,95% pada tahun 2012 menjadi 7,81% pada tahun 2013, kemudian naik kembali pada tahun 2014 namun kemudian menurun drastis hingga menjadi 2,74% pada tahun 2015 dan baru naik kembali pada tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Grafik 4.12.

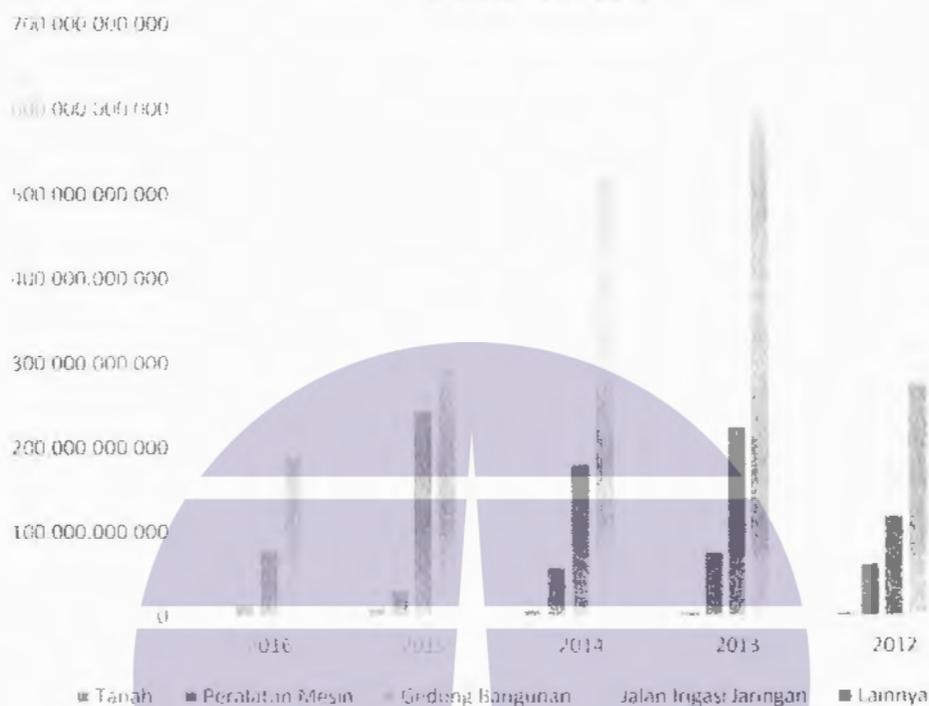
Grafik 4.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nunukan
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2012-2016 (dalam persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Belanja modal Kabupaten Nunukan pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp348.036.255.942,19 dan terealisasi sebesar Rp284.615.182.330,62 atau 81,78% dari anggaran. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh adanya penghematan dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Belanja modal Kabupaten Nunukan tahun 2012 hingga 2016 didominasi oleh Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Keseluruhan data belanja modal Kabupaten Nunukan per jenis belanjanya pada tahun 2016 ditunjukkan pada Grafik 4.13.

Grafik 4.13
Belanja Modal Kabupaten Nunukan
Tahun 2012-2016



Sumber: LHP BPK RI 2017

4. Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau terdiri atas 15 kecamatan dengan luas total 39,800 km² dan jumlah penduduk berdasarkan Sensus tahun 2010 sejumlah 62.423 jiwa. Di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas 1.360.050 ha (Malinau dalam Angka, 2016). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan

perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan lain-lain urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Malinau, 2016).

Dilihat dari struktur ekonomi daerahnya pada tahun 2016, Kabupaten Malinau tahun sebelumnya didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA) yang bersifat non *treadable*, terutama dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, khususnya pada sub sektor kehutanan dan pertambangan batu bara. Total nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata dari tahun ke tahun, sejumlah lebih dari 50 persen berasal dari nilai tambah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, meskipun secara perlahan pada beberapa tahun belakangan ini sub sektor kehutanan terus mengalami penurunan yang diakibatkan oleh semakin menurunnya produksi sub sektor ini, sebaliknya dari sub sektor pertambangan batu bara dalam lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup besar perannya, akibat semakin besarnya nilai tambah sub sektor pertambangan batubara yang dihasilkan (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Malinau, 2016).

Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Pembangunan tersebut telah memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau secara berkeadilan dan bermanfaat menuju masyarakat madani dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows functions*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Malinau, 2016).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malinau pada tahun 2016 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016, sektor usaha pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 3.290,66 miliar rupiah dari total PDRB sebesar 7.249,66 miliar rupiah atau sebesar 45,39% dari keseluruhan komposisi PDRB. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 di mana sektor pertambangan menghasilkan sebesar 3.277,95 miliar rupiah. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan mengecualikan inflasi, maka penurunan terjadi sebesar 0,4%. Sektor lain yang memiliki porsi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Malinau tahun 2016 adalah sektor perdagangan sebesar

16,22% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,13%. Data PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
PDRB Kabupaten Malinau
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

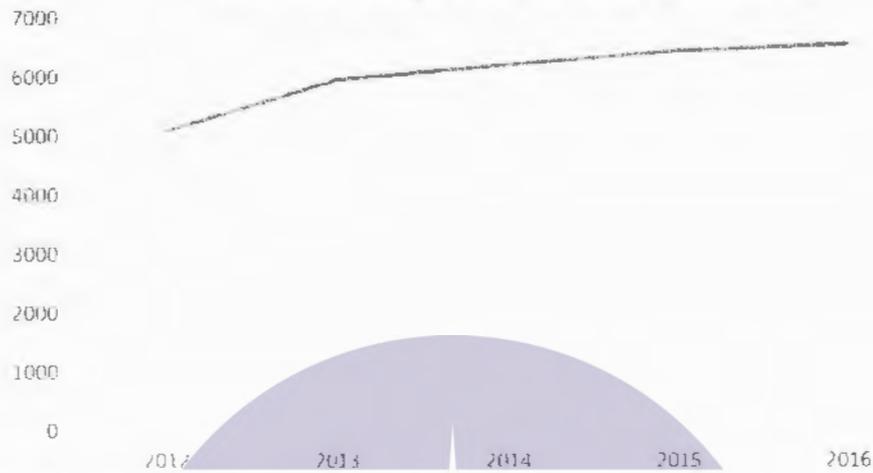
No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.024,11
2	Pertambangan dan Penggalian	3.290,66
3	Industri Pengolahan	225,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,54
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	5,24
6	Konstruksi	1.175,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran	273,13
8	Transportasi dan Pergudangan	228,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124,31
10	Informasi dan Komunikasi	23,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,57
12	Real Estat	18,58
13	Jasa Perusahaan	13,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	551,08
15	Jasa Pendidikan	174,52
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	96,70
17	Jasa Lainnya	4,92
	PDRB Total	7.249,66

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

PDRB Kabupaten Malinau atas dasar harga konstan tahun 2010 secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Data PDRB Kabupaten Malinau selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Grafik 4.14.



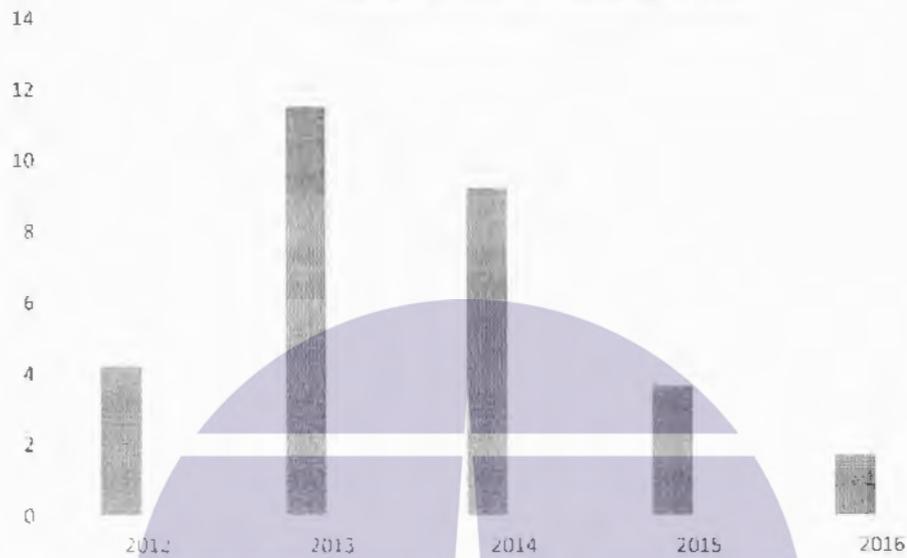
Grafik 4.14
PDRB Kabupaten Malinau
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Malinau tahun 2016 adalah sebesar 1,71%. Nilai ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3,67%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau mengalami kenaikan signifikan dari 4,23% pada tahun 2012 menjadi 11,55% pada tahun 2013. Namun setelah itu, tren laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau sejak tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami penurunan hingga menjadi 1,71% pada tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Grafik 4.15.

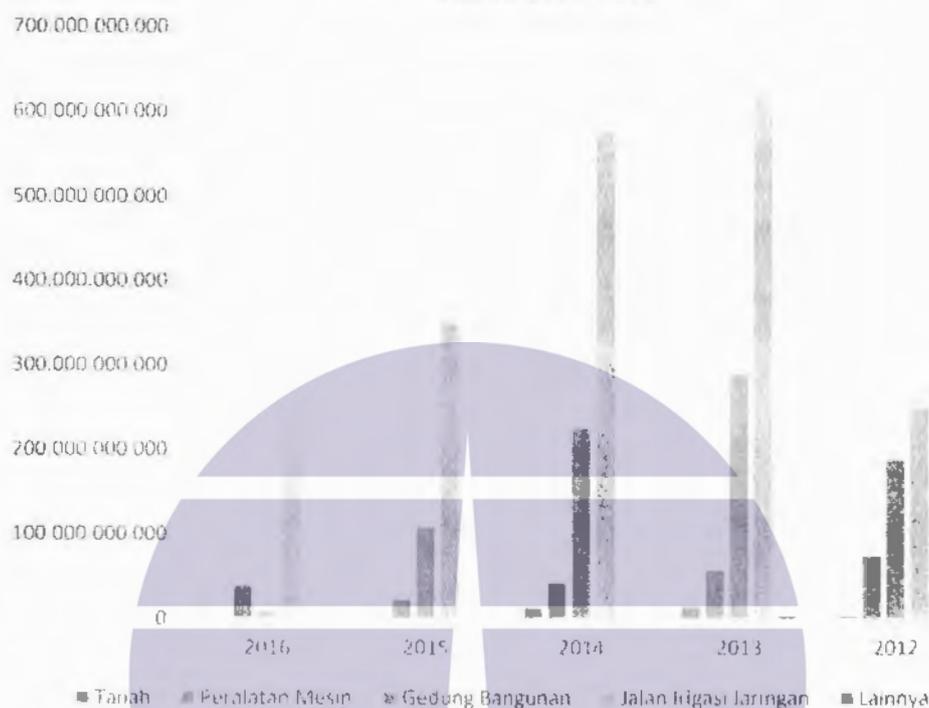
Grafik 4.15
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2012-2016 (dalam persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Belanja modal Kabupaten Malinau pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp430.040.371.575,69 dan terealisasi sebesar Rp327.401.134.684,06 atau 76,13% dari anggaran. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh adanya penghematan dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Belanja modal Kabupaten Malinau tahun 2012 hingga 2016 didominasi oleh Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Keseluruhan data belanja modal Kabupaten Malinau per jenis belanjanya pada tahun 2016 ditunjukkan pada Grafik 4.16.

Grafik 4.16
Belanja Modal Kabupaten Malinau
Tahun 2012-2016



Sumber: LHP BPK RI 2017

5. Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Dari Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sembakung dipindahkan menjadi wilayah kabupaten baru tersebut, sedangkan dari Bulungan, dipindahkan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia. Kabupaten Tana Tidung secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur Lintas Timur Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Kota Tarakan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pusat kehidupan modern. Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Tana Tidung, 2016). Secara administratif, Kabupaten Tana Tidung mempunyai batas-batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Nunukan, sebelah timur dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan sebelah barat dengan Kabupaten Malinau (Website Resmi Kabupaten Tana Tidung, diakses tanggal 3 Januari 2018).

Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir pantai dan memiliki banyak sungai, Kabupaten Tana Tidung memiliki sumber daya yang potensial bagi kegiatan perikanan dan kelautan. Kegiatan dimaksud meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan jasa ikatan lainnya. Hasil laut di Tana Tidung yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Ikan kakap, bawal, segala jenis udang, belanak, senangin, layang, dan kembung sedangkan untuk perikanan darat adalah udang galah, salap, patin dan bandeng Kabupaten Tana Tidung juga merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar karena kekayaan alam, tradisi seni dan budaya serta sejarah. Beberapa potensi pariwisata yang telah dikembangkan namun masih banyak yang belum tergarap secara serius (Website Resmi Kabupaten Tana Tidung, diakses tanggal 3 Januari 2018).

Kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang salah satunya disebabkan Pemekaran wilayah provinsi Kalimantan Utara. Semakin menurunnya kemampuan Keuangan Daerah, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun mendatang terutama dalam sektor pendapatan, dengan menggali potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan dalam sektor belanja, dengan melakukan pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif. Kebijakan diarahkan untuk menggambarkan strategi yang dipilih Pemerintah dalam rangka percepatan dan akselerasi pencapaian tujuan. Hal ini diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, kesinambungan dan profesionalisme pengelolaan Keuangan Pemerintah. Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ikut memacu pergerakan ekonomi daerah menuju kondisi perekonomian daerah yang semakin baik (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Tana Tidung, 2016).

Pendapatan Daerah berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibagi dalam tiga struktur kelompok pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kondisi umum saat ini atas Pendapatan Daerah adalah Dana Perimbangan mendominasi jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menggali potensi daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Arah pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2014 - 2019 ditujukan pada keseimbangan struktur antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, serta peningkatan PAD rata-rata 10% per tahun (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Tana Tidung, 2016).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung paling rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah Kalimantan Utara. PDRB pada tahun 2016 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016, sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 1.534,25 miliar rupiah dari total PDRB sebesar 4.222,23 miliar rupiah atau sebesar 36,34% dari keseluruhan komposisi PDRB. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 di mana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menghasilkan sebesar 1.429,37 miliar rupiah. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan mengecualikan inflasi, maka kenaikan terjadi sebesar 7,3%. Sektor lain yang memiliki porsi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25,15%. Data PDRB tahun 2016 ditunjukkan Tabel 4.5.

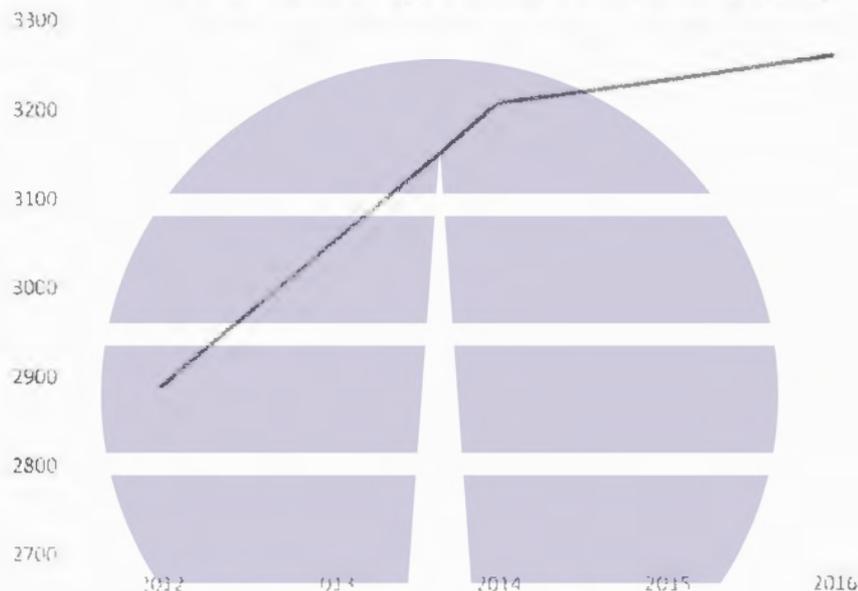
Tabel 4.5
PDRB Kabupaten Tana Tidung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.534,25
2	Pertambangan dan Penggalian	1.061,69
3	Industri Pengolahan	101,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,57
6	Konstruksi	698,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran	201,12
8	Transportasi dan Pergudangan	34,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,08
10	Informasi dan Komunikasi	1,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,24
12	Real Estat	30,19
13	Jasa Perusahaan	0,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	461,70
15	Jasa Pendidikan	62,37
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	2,77
17	Jasa Lainnya	17,08
	PDRB Total	4.222,23

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga konstan tahun 2010 secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Data PDRB Kabupaten Tana Tidung selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Grafik 4.17.

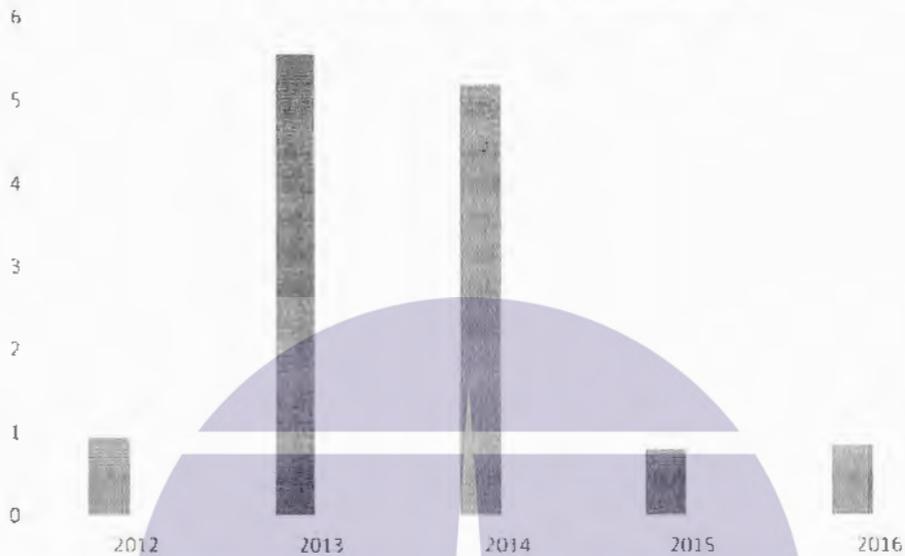
Grafik 4.17
PDRB Kabupaten Tana Tidung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 adalah sebesar 0,85%. Nilai ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,81%. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Grafik 4.18.

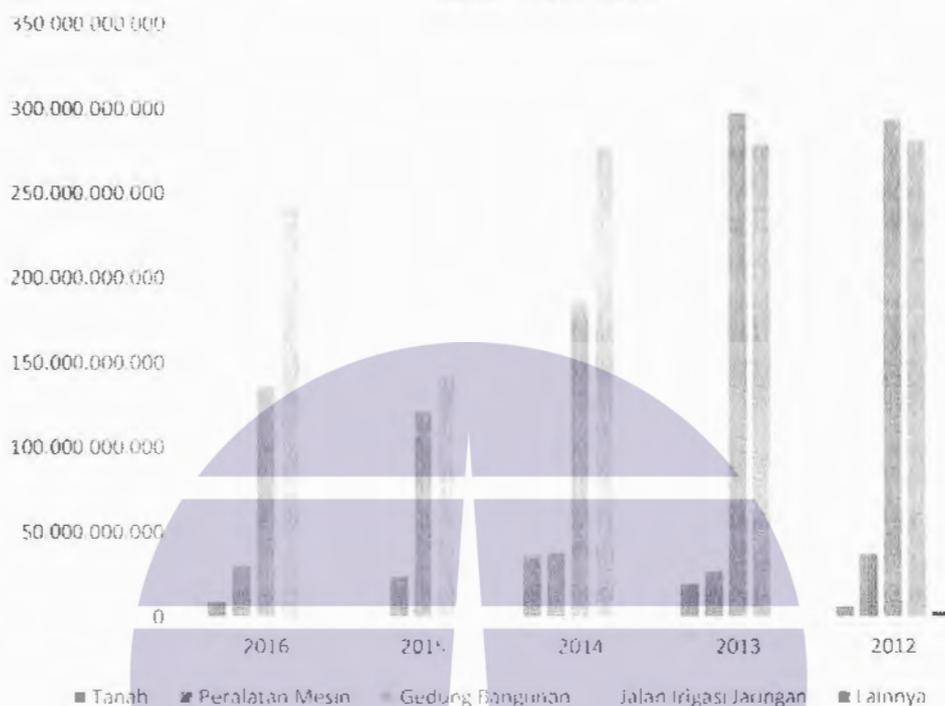
Grafik 4.18
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2012-2016 (dalam persen)



Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Belanja modal Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp461.693.786.778,00 dan terealisasi sebesar Rp418.567.319.125,00 atau 90,68% dari anggaran. Belanja modal Kabupaten Tana Tidung tahun 2012 hingga 2016 didominasi oleh Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Keseluruhan data belanja modal Kabupaten Malinau per jenis belanjanya pada tahun 2016 ditunjukkan pada Grafik 4.19.

Grafik 4.19
Belanja Modal Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2012-2016



Sumber: LHP BPK RI 2017

B. Analisis Data

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dari seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan periode pengamatan pada tahun anggaran 2012-2016. Jumlah kabupaten dan kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah lima daerah dengan periode pengamatan lima tahun, sehingga nilai observasi dari penelitian ini sejumlah 25 observasi yang mencakup seluruh populasi.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel-variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen. Untuk dapat melihat ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat angka *colinierity statistic* yang ditunjukkan oleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance, dengan kriteria: jika nilai VIF > dari 10 dan nilai tolerance < dari 0,1 dan R. Hasil uji multikolinieritas yang dilakukan pada data penelitian menunjukkan hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1. Hasil uji multikolinieritas data dalam penelitian ini menghasilkan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen adalah lebih kecil dari 10 sehingga tidak ditunjukkan adanya multikolinieritas di antara variabel-variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian bebas dari multikolinieritas.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan melakukan uji pada pola Gambar Scatterplot. Hasil pengujian terhadap heterokedastisitas pada data penelitian menunjukkan hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1. Hasil uji

heterokedastisitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas saja atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian pola menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa di antara data yang digunakan untuk penelitian tidak dideteksi terjadinya heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel gangguan pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Karena data yang digunakan adalah data *time series* maka uji autokorelasi perlu dilakukan. Untuk dapat melihat ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan table Durbin Watson (d_l dan d_u). Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai d hitung berada di antara d_u dan $4-d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi yang dilakukan pada data penelitian menunjukkan hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1.

Jumlah observasi yang dilakukan dalam penelitian ini (n) adalah 25 dengan jumlah variabel (k) adalah 6 sehingga (k, n) adalah $(6, 25)$. Nilai d_u dan d_l untuk $(k, n) = (6, 25)$ adalah 0,95297 dan 1,88634 sehingga nilai autokorelasinya adalah di antara 0,95297 dan 3,04703 ($4 - 0,95297$). Data menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson pada data penelitian adalah 1,914 yang berada di dalam rentang 0,95297 dan 3,04703 sehingga tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t. Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil *print out* untuk pengujian regresi pada aplikasi SPSS 23 disajikan secara lengkap dalam Lampiran 1. Hipotesis dinyatakan ditolak apabila t hitung yang dihasilkan dari analisis regresi lebih kecil dari t tabel. Ringkasan hasil analisis regresi antara variabel independen yaitu Belanja Modal Tanah (X1), Belanja Modal Peralatan dan Mesin (X2), Belanja Modal Gedung dan Bangunan (X3), Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (X4) dan Belanja Modal Lainnya (X5) terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y) dalam penelitian ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hubungan	Hasil Uji SPSS			
	β	t-tabel	t-hitung	R ²
X1 → Y	0,435	1,708	2,227	0,422
X2 → Y	0,464		1,855	
X3 → Y	-0,102		-0,441	
X4 → Y	0,262		1,049	
X5 → Y	-0,192		-0,902	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

a. Uji hipotesis I

Hipotesis I yang diajukan adalah *belanja modal tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara*. Berdasarkan pada Tabel 4.6, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hubungan tersebut memiliki nilai β 0,435 dan t hitung sebesar 2,227 signifikan pada $\alpha = 0,05$ (*on tailed*) dan nilai t tabel adalah 1,708. Nilai t-tabel < t

hitung dan t hitung, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal tanah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Tanda positif menunjukkan bahwa belanja modal tanah berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. *Artinya semakin tinggi Belanja Modal Tanah (X_1), akan semakin tinggi pula Pertumbuhan Ekonomi (Y). Sebaliknya, semakin rendah Belanja Modal Tanah (X_1), akan semakin rendah pula Pertumbuhan Ekonomi (Y).*

b. Uji hipotesis 2

Hipotesis 2 yang diajukan adalah *belanja modal peralatan dan mesin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara*. Berdasarkan pada Tabel 4.6, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hubungan tersebut memiliki nilai β 0,464 dan t hitung sebesar 1,855 signifikan pada $\alpha = 0,05$ (*on tailed*) dan nilai t tabel adalah 1,708. Nilai t tabel $<$ t hitung, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal peralatan dan mesin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Tanda positif menunjukkan bahwa belanja modal peralatan dan mesin berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. *Artinya semakin tinggi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (X_2), akan semakin tinggi pula Pertumbuhan Ekonomi (Y). Sebaliknya, semakin rendah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (X_2), akan semakin rendah pula Pertumbuhan Ekonomi (Y).*

c. Uji hipotesis 3

Hipotesis 3 yang diajukan adalah *belanja modal gedung dan bangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara*. Berdasarkan pada Tabel 4.6, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hubungan tersebut memiliki nilai β -0.102 dan t hitung sebesar -0.441 pada $\alpha = 0.05$ (*on tailed*) dan nilai t tabel adalah 1.708. Nilai t-hitung < t tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal gedung dan bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Maka, *variabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y)*.

d. Uji hipotesis 4

Hipotesis 4 yang diajukan adalah *belanja modal jalan irigasi dan jaringan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara*. Berdasarkan pada Tabel 4.6, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hubungan tersebut memiliki nilai β 0.262 dan t hitung sebesar 1,049 pada $\alpha = 0.05$ (*on tailed*) dan nilai t tabel adalah 1.708. Nilai t-hitung < t tabel dan t hitung, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal jalan irigasi dan jaringan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Maka, *variabel Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y)*.

e. Uji hipotesis 5

Hipotesis 5 yang diajukan adalah *belanja modal lainnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara*. Berdasarkan pada Tabel 4.6, ringkasan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hubungan tersebut memiliki nilai β -0.192 dan t hitung sebesar -0,902 pada $\alpha = 0,05$ (*on tailed*) dan nilai t tabel adalah 1.708. Nilai t-hitung < t tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Maka, *variabel Belanja Modal Lainnya (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y)*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (2012-2016). Berdasarkan tujuan penelitian, telah dimunculkan hipotesis menyangkut dengan besarnya Belanja Modal Pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (2012-2016). Hasil analisis regresi menunjukkan Belanja Modal Pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk Belanja Modal Tanah serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Selain itu, terdapat tiga hipotesis yang tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. Hipotesis penelitian ditolak untuk variabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Belanja Modal Lainnya, yang artinya Belanja Modal Gedung dan Bangunan,

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Belanja Modal Lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (2012-2016).

1. Belanja Modal Tanah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Belanja Modal Tanah secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB, yang artinya hipotesis penelitian, di mana Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (2012-2016) sesuai dengan hasil penelitian, dan dengan demikian hipotesis penelitian diterima.

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Tanah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang artinya untuk menggerakkan perekonomian di kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih diperlukan investasi berupa tanah dari pemerintah daerah.

Tanah bermanfaat sebagai tambahan lahan untuk membangun sarana dan prasarana serta fasilitas untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi, misalnya untuk dijadikan pasar, terminal barang, serta gedung-gedung yang nantinya difungsikan untuk membantu menggerakkan perekonomian seperti pusat pelatihan Usaha Kecil Mikro dan Menengah, ataupun digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD). Belanja Modal Tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian maupun perkebunan yang dikelola oleh masyarakat, pusat penelitian pertanian, pusat pembibitan dan sebagainya. Penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk lahan pertanian dan perkebunan akan bermanfaat untuk meningkatkan hasil bumi dari pertanian dan perkebunan yang merupakan salah satu penyokong utama Produk Domestik Regional Bruto pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB, yang artinya hipotesis penelitian, di mana Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (2012-2016) sesuai dengan hasil penelitian, dan dengan demikian hipotesis penelitian diterima.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang artinya untuk menggerakkan perekonomian di kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih diperlukan investasi berupa peralatan dan mesin yang didanai dari anggaran pemerintah

daerah. Pengadaan peralatan dan mesin sangat penting baik untuk menambah mesin baru, memperbaiki peralatan dan mesin yang rusak, maupun mengganti peralatan dan mesin yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Termasuk dalam peralatan dan mesin di antaranya adalah kendaraan, inventaris kantor, furnitur, alat-alat elektronik dan peralatan serta mesin lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara memiliki fasilitas peralatan dan mesin yang masih terbatas dibandingkan provinsi-provinsi lain yang lebih dulu ada dan berkembang. Seluruh lini pemerintahan membutuhkan peralatan dan mesin untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kendaraan sangat dibutuhkan sebagai sarana transportasi untuk berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Mesin-mesin juga sangat dibutuhkan, khususnya yang dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan di sektor yang memberikan kontribusi bagi PDRB di kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, misalnya pengadaan mesin-mesin pertanian untuk menambah kuantitas dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Peralatan dan mesin juga dapat dimanfaatkan oleh BUMD yang bergerak di bidang industri. Di negara maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian karena sektor industri memegang peran kunci sebagai penggerak pembangunan. Sektor industri memiliki keunggulan dibandingkan sektor lain karena kemampuan menyerap tenaga kerja

yang besar serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap bahan baku yang diolah.

Peranan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk menggerakkan sektor industri sebagai bagian dari provinsi baru yang masih berkembang, masih sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian, memacu pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakatnya. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat ke sektor industri. Perubahan struktur perekonomian ke sektor pertanian maupun industri ini sangat diperlukan oleh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara khususnya yang selama ini mengandalkan PDRB dari sektor pertambangan dan migas karena sektor tersebut bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan suatu saat akan habis.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Dari analisis belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, belanja modal lebih banyak dialokasikan kepada Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, namun berdasarkan hasil penelitian, keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi

Kalimantan Utara tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dianalisis sebagai berikut.

a. Kota Tarakan

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan, belanja modal gedung dan bangunan lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang sudah ada. Pemerintah Kota Tarakan mengalami penurunan APBD yang disebabkan oleh pemekaran wilayah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Pemekaran ini mengakibatkan berkurangnya Dana Bagi Hasil. Untuk menyesuaikan dengan turunnya APBD ini, Pemerintah Kota Tarakan banyak memangkas anggaran pembangunan gedung baru dan menggunakan anggaran untuk memelihara gedung yang sudah ada. Penggunaan belanja modal untuk pemeliharaan ini menjadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidak menunjang kegiatan perekonomian secara langsung, misalnya pembangunan pasar induk, pelabuhan barang, terminal barang, dan sebagainya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Kota Tarakan belum dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya temuan pemeriksaan pada LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun LHP BPK atas Manajemen Aset dan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Kota Tarakan yang menyoroti pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang terindikasi mengandung unsur pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran pemerintah daerah ini seharusnya dapat dialokasikan untuk pos

belanja-belanja lainnya yang dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi.

b. Kabupaten Bulungan

Pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Kabupaten Bulungan lebih banyak difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, pemerintah kabupaten menggiatkan pembangunan fisik gedung dan bangunan yang menunjang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, rumah sakit, dan Puskesmas. Pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang difungsikan sebagai fasilitas pendidikan dan kesehatan ini sesuai dengan Program Nawacita Presiden Joko Widodo dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Meskipun demikian, pembangunan fasilitas-fasilitas ini menjadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidak menunjang kegiatan perekonomian secara langsung, misalnya pembangunan pasar induk, pelabuhan barang, terminal barang, dan sebagainya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Kabupaten Bulungan belum dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya temuan pemeriksaan pada LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun LHP BPK atas Manajemen Aset dan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang menyoroti pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang terindikasi mengandung unsur pemborosan anggaran.

Pemborosan anggaran pemerintah daerah ini seharusnya dapat dialokasikan untuk pos belanja-belanja lainnya yang dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota Kabupaten Bulungan.

c. Kabupaten Nunukan

Sama seperti di Kabupaten Bulungan, pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Kabupaten Nunukan lebih banyak difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, seluruh pemerintah kabupaten dan kota menggiatkan pembangunan fisik gedung dan bangunan yang menunjang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, rumah sakit, dan Puskesmas sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Kabupaten Nunukan sebagian besar dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi dari luar wilayah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perihal Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota wajib mengumumkan lelang secara elektronik untuk setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan konstruksi untuk pembangunan gedung dan bangunan. Sebagai akibat dari pengumuman lelang pengadaan konstruksi yang dilakukan secara elektronik, semua penyedia jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia dapat mengikuti lelang tersebut, sehingga lelang lebih banyak dimenangkan oleh penyedia jasa konstruksi besar yang berasal dari Jakarta, khususnya

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi seperti Wijaya Karya, Wira Karya, Hutama Karya dan lain sebagainya. Karena pengadaan konstruksi gedung dan bangunan tersebut dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dari luar wilayah Kabupaten Nunukan, maka pada umumnya penyedia bahan baku serta tenaga kerja yang digunakan seperti konsultan perencana, konsultan pelaksana, arsitek serta tukang bangunan yang melakukan pembangunan gedung juga berasal dari luar wilayah. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan tersebut tidak menyerap tenaga kerja lokal dan dengan demikian tidak secara langsung menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

d. Kabupaten Malinau

Sama seperti di wilayah kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara, pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Kabupaten Malinau lebih banyak difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, pemerintah daerah menggiatkan pembangunan fisik gedung dan bangunan yang menunjang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, rumah sakit, dan Puskesmas sesuai dengan Program Nawacita Presiden Joko Widodo. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidak menunjang kegiatan perekonomian secara langsung.

Selain itu, Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah yang besar dan sebagian berada di daerah pedalaman yang belum terjangkau alat

transportasi darat sehingga anggaran yang digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan menjadi tinggi karena mahalny proses pengiriman material bahan bangunan. Pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan juga dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi dari luar wilayah karena lelang pengadaan konstruksi untuk pembangunan gedung dan bangunan lebih banyak dimenangkan oleh penyedia jasa konstruksi besar yang berasal dari Jakarta, khususnya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi seperti Wijaya Karya, Wira Karya, Hutama Karya dan lain sebagainya. Karena pengadaan konstruksi gedung dan bangunan tersebut dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dari luar wilayah, maka pada umumnya penyedia bahan baku serta tenaga kerja yang digunakan seperti konsultan perencana, konsultan pelaksana, arsitek serta tukang bangunan yang melakukan pembangunan gedung juga berasal dari luar wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan tersebut tidak menyerap tenaga kerja lokal dan dengan demikian tidak secara langsung menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

c. Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten termuda. Kabupaten ini belum banyak memiliki gedung dan bangunan untuk sarana pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, belanja modal pada Kabupaten Tana Tidung lebih banyak digunakan untuk membangun gedung baru untuk kantor pemerintahan, sehingga menunjang kegiatan perekonomian secara langsung

seperti pembangunan pasar induk, pelabuhan barang, terminal barang, dan sebagainya.

Selain untuk gedung baru, pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara lebih banyak difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, pemerintah daerah menggiatkan pembangunan fisik gedung dan bangunan yang menunjang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, rumah sakit, dan Puskesmas. Pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang difungsikan sebagai fasilitas pendidikan dan kesehatan ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Variabel lain yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai analisis berikut.

a. Kota Tarakan

Kota Tarakan merupakan pulau tersendiri yang terpisahkan oleh lautan dari wilayah kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mengakibatkan sebagian besar transportasi antar kota dan kabupaten dari dan menuju Kota Tarakan dilakukan melalui jalur angkutan laut. Perdagangan antarkota dan kabupaten juga dilakukan melalui jalur laut dan sungai sehingga sebagian besar aktivitas perekonomian menggunakan transportasi air. Dari Kota Tarakan ke kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara, jenis transportasi yang dapat digunakan adalah transportasi udara dan laut. Transportasi laut lebih banyak digunakan masyarakat karena jumlahnya lebih banyak dan tarifnya lebih terjangkau. Karena itulah, belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab roda perekonomian di Kota Tarakan pada dasarnya tidak digerakkan oleh transportasi jalan darat, melainkan transportasi jalur laut dan sungai.

b. Kabupaten Bulungan

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bulungan lebih menekankan kepada ketersediaan akses transportasi dibandingkan dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diketahui bahwa sebagian besar pembangunan jalan di kabupaten di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan di lokasi-lokasi yang terpencil, bukan untuk menghubungkan antarkota atau antarkabupaten. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk pemerataan

pembangunan sehingga masyarakat yang tinggal di pedalaman memiliki akses transportasi. Meskipun demikian, jalan-jalan yang dibangun ini tidak menghubungkan wilayah-wilayah yang strategis secara perekonomian, misalnya pusat perdagangan, pusat hasil bumi, pusat pertambangan mineral dan sumberdaya ekonomi lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur jalan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bulungan.

Selain itu, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di Kabupaten Bulungan juga banyak dimanfaatkan untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan pada jalan yang sudah ada. Karena luasnya wilayah, maka biaya pemeliharaan dan perbaikan jalan ini memakan porsi yang besar dari keseluruhan anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Pemeliharaan ini merupakan belanja yang wajib dilakukan, namun tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bulungan.

c. Kabupaten Nunukan

Wilayah Kabupaten Nunukan sebagian besar terpisahkan oleh lautan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar transportasi antar kota dan kabupaten dilakukan melalui jalur angkutan laut. Perdagangan antarkota dan kabupaten juga dilakukan melalui jalur laut dan sungai sehingga sebagian besar aktivitas perekonomian menggunakan transportasi laut yang jumlahnya lebih banyak dan tarifnya lebih terjangkau. Selain transportasi antarkota dan kabupaten, transportasi dalam satu kabupaten juga banyak yang menggunakan jalur laut atau sungai karena karakteristik wilayah yang

terdiri atas pulau-pulau, misalnya dari Pulau Nunukan ke Sei Menggaris, Pulau Sebatik atau Pulau Bunyu. Karena itulah, belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab roda perekonomian di Kabupaten Nunukan pada dasarnya tidak digerakkan oleh transportasi jalan darat, melainkan transportasi jalur laut.

d. Kabupaten Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan subsidi ongkos angkut kepada maskapai penerbangan untuk menempuh jalur yang tidak dapat dilalui oleh transportasi darat. Medan darat di kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bagian paling utara yang berbatasan dengan Malaysia, memiliki jalur yang sulit ditempuh. Untuk menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan di sekitarnya yang tidak dilalui jalur laut maupun sungai, dibandingkan jalur darat, lebih banyak yang dihubungkan dengan jalur udara melalui pesawat kecil dan pesawat perintis. Untuk membantu warga dan memudahkan akses transportasi, Kabupaten Malinau memberikan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada maskapai yang membuka jalur penerbangan antar kecamatan di Malinau maupun penerbangan dari Malinau ke Tarakan, sehingga tarif yang dikenakan maskapai kepada penumpang lebih murah. Tarif penerbangan yang murah ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan jalur udara sebagai pilihan transportasinya. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur

jalan menjadi kurang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau juga lebih menekankan kepada ketersediaan akses transportasi dibandingkan dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Sebagian besar pembangunan jalan di kabupaten di wilayah Kabupaten Malinau dilakukan di lokasi-lokasi yang terpencil, sehingga masyarakat yang tinggal di pedalaman memiliki akses transportasi. Meskipun demikian, jalan-jalan yang dibangun ini tidak menghubungkan wilayah-wilayah yang strategis secara perekonomian, misalnya pusat perdagangan, pusat hasil bumi, pusat pertambangan mineral dan sumberdaya ekonomi lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur jalan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten dan kota di Malinau tidak didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum transportasi darat. Hingga saat ini di kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Utara belum tersedia angkutan umum transportasi darat yang memadai baik dalam kota maupun antarkota dan kabupaten dalam provinsi. Dengan tidak adanya angkutan umum seperti bis kota atau bis antarkota, maka yang dapat menggunakan jalan raya yang telah dibangun hanyalah masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi tidak dapat memanfaatkan infrastruktur jalan yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten atau kota.

e. Kabupaten Tana Tidung

Sebagai daerah termuda, akses jalan pada Kabupaten Tana Tidung masih sangat sedikit. Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tana Tidung menekankan kepada ketersediaan akses transportasi dibandingkan dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Hal ini menyebabkan jalan-jalan yang dibangun ini tidak menghubungkan wilayah-wilayah yang strategis secara perekonomian, misalnya pusat perdagangan, pusat hasil bumi, pusat pertambangan mineral dan sumberdaya ekonomi lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur jalan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Belanja Modal Lainnya

Variabel terakhir yang tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Belanja Modal Lainnya. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, buku-buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Belanja Modal Lainnya berpengaruh signifikan secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Belanja modal lainnya banyak digunakan untuk belanja terkait teknologi informasi. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016, sebagian besar peruntukan belanja modal lainnya adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana terkait teknologi informasi seperti pembelian piranti lunak (*software*) komputer yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di lingkungan pemerintah kabupaten/kota maupun untuk pembuatan aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Belanja modal lainnya tersebut tidak secara langsung terkait dengan perekonomian sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Jumlah belanja modal lainnya secara nominal relatif kecil. Apabila dilihat persentase nilai nominal anggaran maupun realisasi belanja modal lainnya pada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada rentang tahun 2012 sampai dengan 2016 dibandingkan keseluruhan pengeluaran APBD relatif kecil. Jumlah alokasi yang kecil ini menyebabkan belanja modal lainnya tidak cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan serta hasil pengujian hipotesis atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sedangkan tiga belanja modal lainnya yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Lainnya tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tiga dari lima hipotesis penelitian yang diajukan ditolak. Hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah kabupaten/kota tidak berpengaruh cukup besar pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Dari analisis belanja modal Kabupaten/Kota untuk tahun 2012-2016, diketahui bahwa belanja modal pemerintah kabupaten/kota lebih banyak dialokasikan kepada Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

B. Saran

1. Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil dan kesimpulan yang berbeda dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan.

- a. Apabila peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, penelitian sebaiknya mencakup rentang waktu penelitian yang lebih panjang, misalnya sekitar 15 atau 20 tahun.
- b. Selain itu, apabila peneliti ingin mendapatkan gambaran yang lebih besar mengenai Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, ruang lingkup penelitian dapat diperluas misalnya antarprovinsi sehingga hasil analisis lebih lengkap.
- c. Agar dapat mengetahui dengan pasti pengaruh belanja modal pemerintah, peneliti juga dapat memasukkan variabel-variabel lain seperti data investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan data pendapatan perkapita.

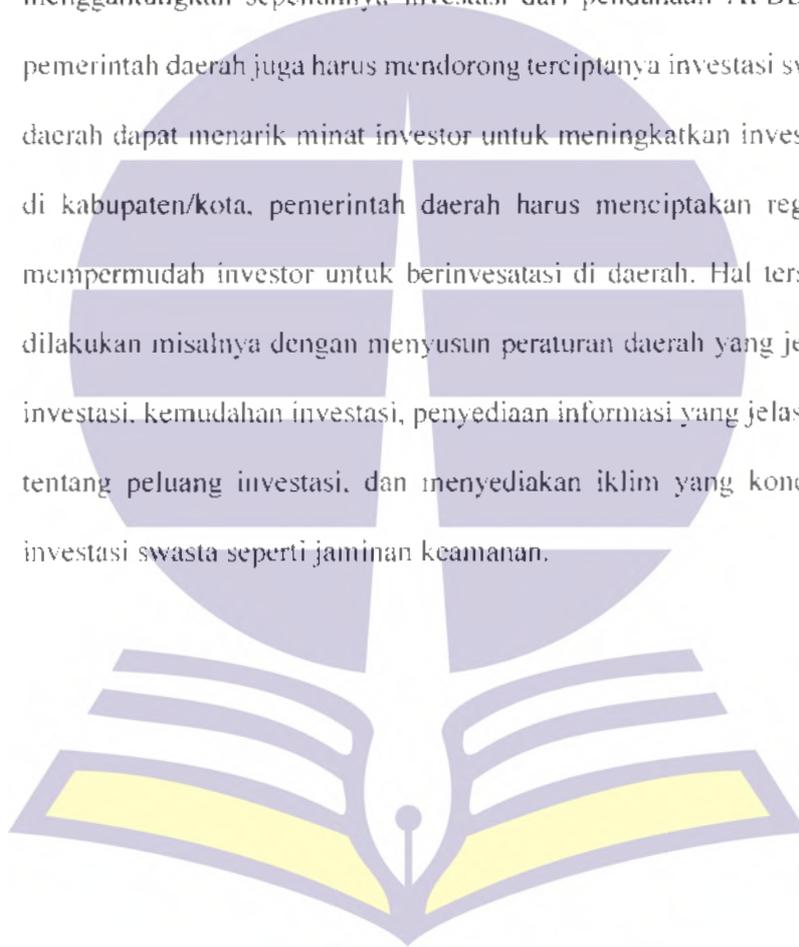
2. Saran Kebijakan

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih berperan dalam mengelola tanggung jawab keuangan yang lebih besar, termasuk menggerakkan investasi daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun sektor swasta. Investasi masih sangat dibutuhkan khususnya di provinsi yang masih dalam tahap berkembang seperti Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal yang menjadi saran dari penelitian ini untuk pihak pengambil kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Karena belanja modal sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas penggunaan belanja modalnya. Anggaran belanja modal harus dialokasikan secara tepat kepada proyek pembangunan pelabuhan bongkar muat barang atau bandara-bandara

perintis untuk menjangkau daerah-daerah pemasok produk pertanian, perikanan dan pertambangan yang merupakan penyumbang PDRB. Pembangunan tersebut merupakan investasi yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Karena keterbatasan anggaran yang tersedia, pemerintah daerah tidak dapat menggantungkan sepenuhnya investasi dari pendanaan APBD, sehingga pemerintah daerah juga harus mendorong terciptanya investasi swasta. Agar daerah dapat menarik minat investor untuk meningkatkan investasi swasta di kabupaten/kota, pemerintah daerah harus menciptakan regulasi yang mempermudah investor untuk berinvestasi di daerah. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menyusun peraturan daerah yang jelas tentang investasi, kemudahan investasi, penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang peluang investasi, dan menyediakan iklim yang kondusif untuk investasi swasta seperti jaminan keamanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambya (2014). *Belanja Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Anasmen (2009). *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Anderson, Edward, Paolo de Renzio and Stephanie Levy. (2006). *Poverty Reduction: Theories, Evidence and Methods*. London: Overseas Development Institute.
- Aschauer, D.A. (1989). *Is Public Investment Productive?*. Journal of Monetary Economics 23.
- BAPPENAS (2006) Laporan BAPPENAS 2006.
- Barro, R.J. (1991). *Economic Growth in A Cross Section of Countries*. Quarterly Journal of Economics 106.
- Barro, R. (1990). *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth*. Journal of Political Economy 98.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten/Kota 2012-2016*.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 2012-2016*.
- Chen, S.T. and Lee C.C. (2005). *Government Size and Economic Growth in Taiwan: A Threshold Regression Approach*. Journal of Policy Modeling 27.
- Devarajan, S., Swaroop, V. and Zhou, H. (1996). *The Composition of Public Expenditure and Economic Growth*. Journal of Monetary Economics 37.
- Directorate for Public Governance and Territorial Development OECD. (2014). *Recommendation of The Council on Effective Public Investment Across Levels of Government*.
- Easterly, W. and Rebelo, S. (1993). *Fiscal Policy and Economic Growth*. Journal of Monetary Economics 32.
- Ford, Robert and Pierre Poret. (1991). *Infrastructure and Private Sector Productivity*. OECD Economics Department Working Papers.
- Garba, T. dan Abdullahi, Sabiu. (2013). *Public Expenditure and Economic Growth: An Application of Cointegration and Granger Causality Tests on Nigeria*. Journal of Economic and Social Research 15.
- Holtz-Eakin, D. (1994). *Public Sector Capital and The Productive Puzzle*. Review Economics and Statistics.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.
- Khan, M.S. and Kumar, M.S. (1997). *Public Investment, Productivity and Economic Growth in Developing Countries*. Journal of Public Budgeting, Accounting And Financial Management 9.
- Levy, S. (2006) *Public Investment to Reverse Dutch Disease: The Case of Chad*. Journal of African Economies.
- Lubis, Harry. (2007). *Metode Riset*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Makhloufi, El. (2011). *Economic Effects of Infrastructure Investment on Output And Productivity: A Meta Analysis*. Amsterdam: Department of ESG.
- Mankiw, G.N. (2003). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, G.N. Romer, and Weil. (1992). *A Contribution to The Empirics of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics 107.
- Maryaningsih, Novi, Oki Hermansyah, dan Savitri (2004). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 17.
- Munnell, A. (1990). *Why Has Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment: New England Economic Review*. Boston: Federal Reserve Bank of Boston.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33 tahun 2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005
- Saez, M.P. and D.C. Rodriguez. (2017). *Government Expenditure and Economic Growth in The European Union Countries. New Evidence*. Spain: University of Cantabria.
- Shresta, P.K. (2009). *The Composition of Public Expenditure, Physical Infrastructure and Economic Growth In Nepal*. Nepal RASTRA Bank.
- Smith, Adam. (1776). *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Renaissance Edition ISO 690.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE UI.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.

Tamoya, A.L. Christie. (2011). *Essays on Fiscal Policy and Economic Growth*. Georgia State University.

Tatom, J.A. (1993). *Paved With Good Intentions: The Mythical National Infrastructure*.

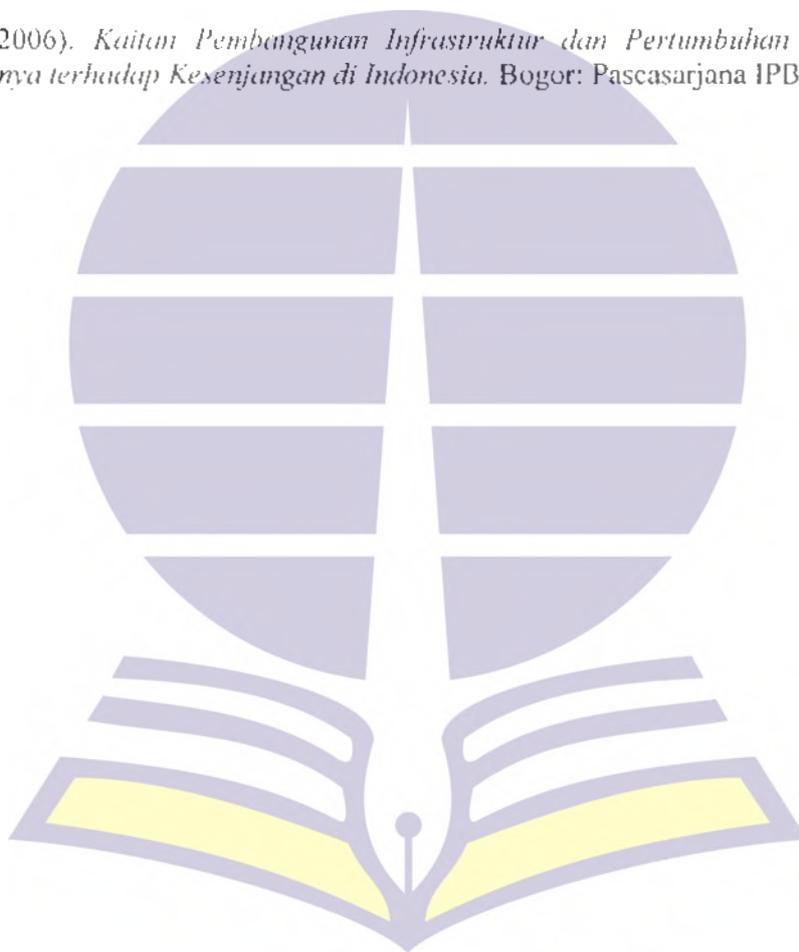
Todaro, M.P. dan S.C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Turnovsky, Stephen J and Fisher. H. (1995). *Introduction to Stata Lecture 3 Panel Data*.

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.

World Development Report (1994). *World Development Report*. Washington, D.C

Yanuar, R. (2006). *Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia*. Bogor: Pascasarjana IPB.



Lampiran I

Regression

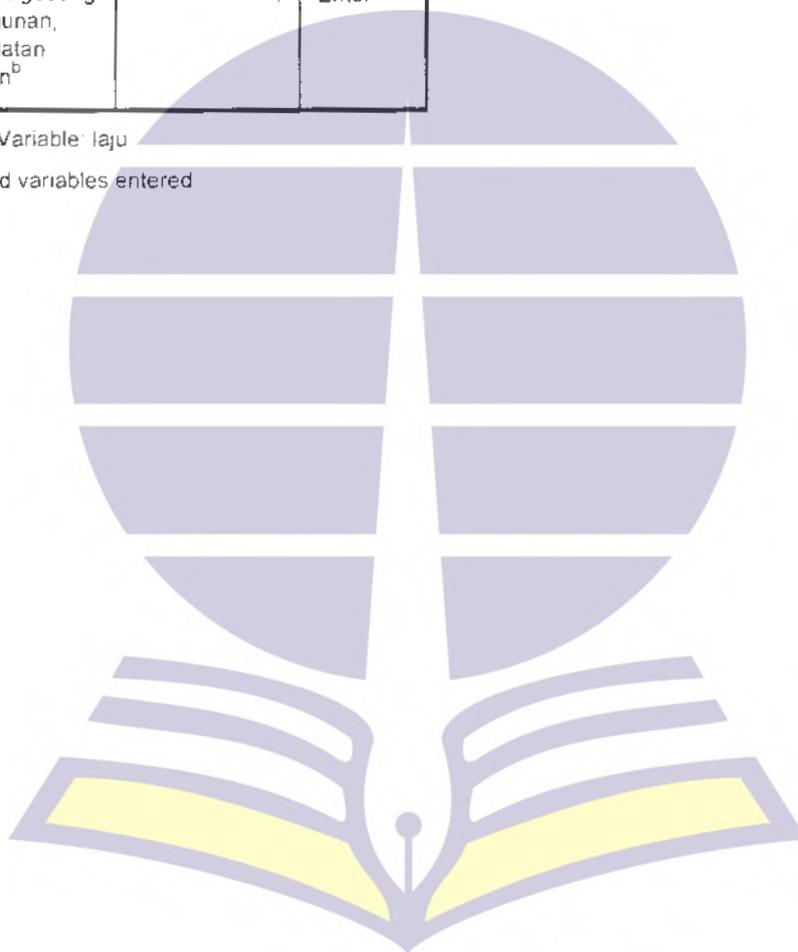
[DataSet1] E:\bahan tesis kalamidata br.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	lainnya, jalan irigasi jaringan, tanah, gedung bangunan, peralatan mesin ^b		Enter

a. Dependent Variable: laju

b. All requested variables entered



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.650 ^a	.422	.270	2.72069	1.914

a. Predictors: (Constant), lainnya, jalan irigasi jaringan, tanah, gedung bangunan, peralatan mesin

b. Dependent Variable: laju

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102.700	5	20.540	2.775	.048 ^b
	Residual	140.641	19	7.402		
	Total	243.342	24			

a. Dependent Variable: laju

b. Predictors: (Constant), lainnya, jalan irigasi jaringan, tanah, gedung bangunan, peralatan mesin

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.293	1.554		150	.882		
	tanah	1.731E-10	.000	.435	2.227	.038	.796	1.258
	peralatan mesin	6.924E-11	.000	.464	1.855	.079	.486	2.057
	gedung bangunan	-3.511E-12	.000	-.102	-.441	.664	.568	1.762
	jalan irigasi jaringan	-5.199E-12	.000	.252	1.049	.307	.489	2.045
	lainnya	-1.747E-10	.000	-.192	-.902	.378	.673	1.485

a. Dependent Variable: laju

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	tanah	peralatan mesin	gedung bangunan	jalan irigasi jaringan	lainnya
1	1	4.729	1.000	.00	.01	.01	.00	.00	.01
	2	.594	2.822	.01	.12	.00	.01	.02	.41
	3	.429	3.318	.00	.11	.01	.00	.00	.27
	4	.117	6.361	.51	.00	.01	.51	.01	.02
	5	.073	8.035	.47	.25	.28	.40	.23	.07
	6	.058	9.022	.01	.01	.60	.04	.75	.22

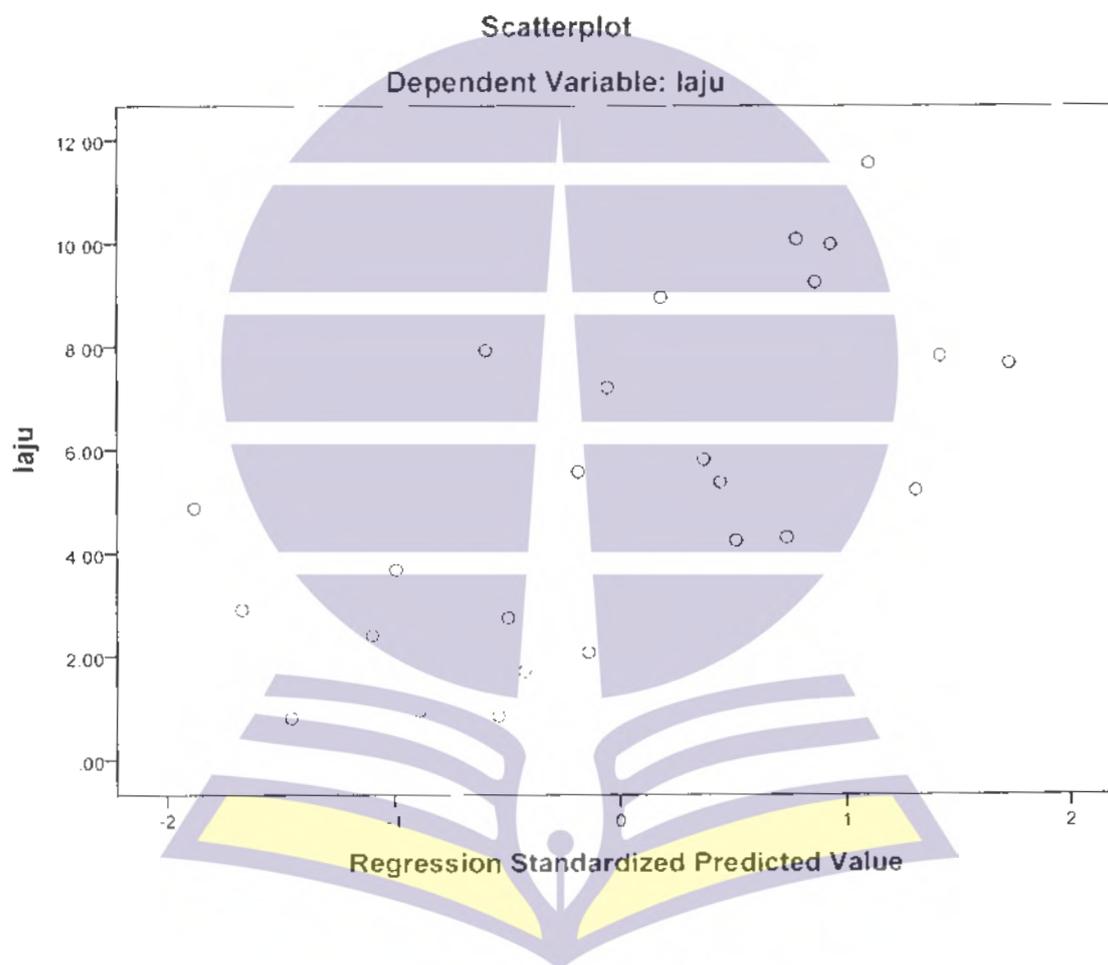
a. Dependent Variable: laju

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.4610	8.9445	5.3528	2.06862	25
Residual	-3.38054	3.90835	.00000	2.42075	25
Std. Predicted Value	-1.881	1.736	.000	1.000	25
Std. Residual	-1.243	1.437	.000	.890	25

a. Dependent Variable: laju

Charts





PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)				
No				
1	PENDAPATAN	5.1.1		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.050.000.000,00	34.731.051.295,25
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	19.010.000.000,00	12.043.176.073,42
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	12.000.000.000,00	4.826.603.005,52
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	23.053.000.000,00	10.797.781.904,27
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		92.113.000.000,00	62.198.512.278,56
8				67,52
9				76.462.510.136,89
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2		
11	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan:			
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	64.964.384.000,00	61.276.687.714,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.2	160.768.740.100,00	174.125.397.221,00
14	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.3	326.447.029.000,00	326.447.029.000,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.4	126.571.314.000,00	109.497.894.360,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		680.751.467.500,00	701.347.008.325,00
17	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.5	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17 s/d 18)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
21	Transfer Pemerintah Provinsi			
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.6	54.862.710.758,25	50.948.442.205,40
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (21 s/d 22)		54.862.710.758,25	50.948.442.205,40
25	Bantuan Keuangan			
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.2.7	160.773.500.000,00	160.773.500.000,00
27	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan		160.773.500.000,00	160,00
28	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 23 + 26)		999.387.678.267,25	918.069.950.530,40
29				100,95
30				602.359.701.624,09
31	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3		
32	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
33	Pendapatan Dana Donasi:		0,00	0,00
34	Pendapatan Lainnya		34.336.400.000,00	34.217.327.744,00
35	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (30 s/d 32)		34.336.400.000,00	34.217.327.744,00
36	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)		1.935.837.678.267,25	1.614.484.790.552,96
37				97,94
38				678.822.211.760,97
39	BELANJA	5.1.2		
40	BELANJA OPERASI	5.1.2.1		
41	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	473.930.321.438,02	423.373.403.699,87
42	Belanja Barang	5.1.2.1.2	290.791.201.307,88	229.338.408.289,21
43	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00
44	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	2.500.000.000,00	0,00
45	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	38.428.859.200,00	24.050.034.981,00
46	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	3.612.000.000,00	2.581.084.005,00
47	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)		810.259.381.946,00	689.343.391.205,08
48				85,08
49				731.563.118.508,65
50	BELANJA MODAL	5.1.2.2		
51	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	94.676.802.899,00	43.323.868.071,00
52	Belanja Peralatan dan Meubel	5.1.2.2.2	17.621.448.436,00	11.816.679.975,98
53	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	123.423.488.200,00	76.396.827.200,00
54	Belanja Jalan, jembatan dan Jembatan	5.1.2.2.4	290.128.964.043,00	102.381.398.445,00
55	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.808.932.000,00	3.010.309.300,00
56	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	888.000.000,00	539.900.000,00
57	Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)		533.617.684.258,00	236.475.582.361,98
58				44,32
59				128.719.306.572,80
60	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3		
61	Belanja Tidak Terduga		1.000.000.000,00	74.000.000,00
62	Jumlah Belanja Tidak Terduga		1.000.000.000,00	74,00
63	JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57)		1.344.877.076.204,00	925.893.174.277,06
64				68,85
65				860.456.605.081,45
66	TRANSFER	5.1.2.4		
67	Transfer Bantuan Keuangan		898.793.594,00	898.793.594,00
68	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
69	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		898.793.594,00	100,00
70	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 63)		1.345.775.869.798,00	926.791.967.871,06
71	SURPLUS / DEFISIT (34 - 64)		(309.939.191.530,75)	(37.692.822.681,90)
72				(28,29)
73				(192.573.086.914,48)
74	PEMBIAYAAN	5.1.3		
75	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3.1		
76	Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		22.717.389.909,88	22.717.389.909,88
77	Pinjaman Duluai Negeri / Lembaga Keuangan Bank		393.152.738.008,77	0,00
78	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah (69 s/d 70)		405.870.127.918,75	22.717.389.909,88
79				5,60
80				295.290.476.824,46
81	PENGELARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3.2		
82	Pengeluaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
83	Pengeluaran Pinjol Utang		95.331.636.369,00	85.925.366.626,00
84	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah (74 s/d 75)		95.331.636.369,00	95.925.366.626,00
85				99,89
86				0,00
87	PEMBIAYAAN NETTO (71 - 76)		209.938.191.530,75	(73.207.996.016,02)
88				(23,62)
89				295.290.476.824,46
90	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (65 + 77)	5.1.4	0,00	14.484.226.065,88
91				0,00
92				22.717.389.909,88

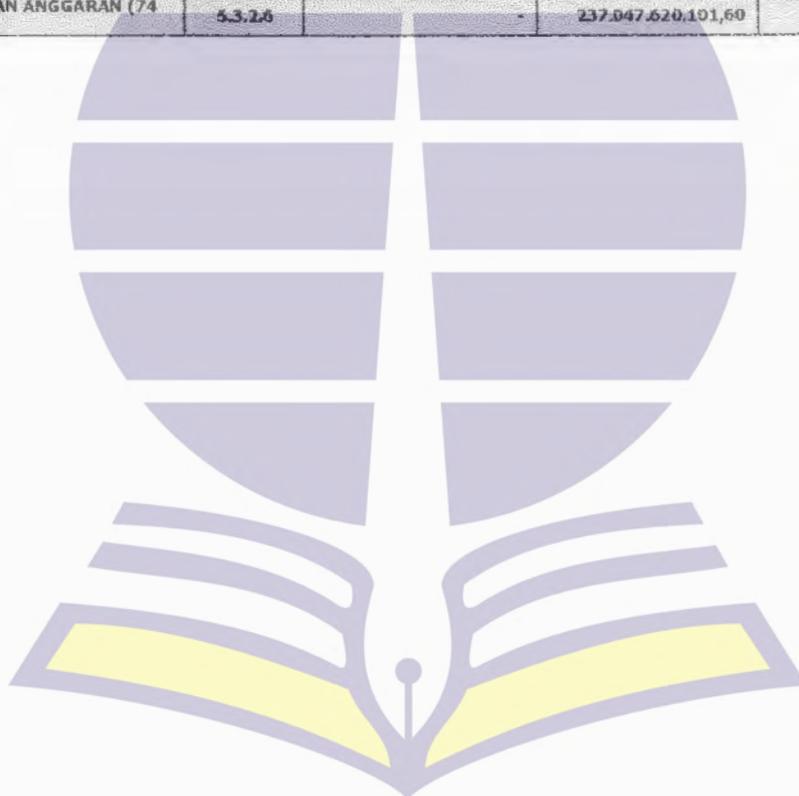
Perbandingan lebih lanjut dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
1	PENDAPATAN	5.3.2.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.3.2.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.3.2.1.1.1	8.189.150.000,00	15.769.221.352,15	192,56%	11.865.135.936,56
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.2.1.1.2	6.429.000.000,00	5.208.439.554,41	81,01%	3.834.786.709,78
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.2.1.1.3	16.800.000.000,00	16.842.768.427,11	100,25%	23.110.383.579,22
6	Lain-lain PAD yang sah	5.3.2.1.1.4	42.397.397.085,79	63.918.473.854,13	150,76%	82.605.347.807,22
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		73.815.547.085,79	101.738.903.187,80	137,83%	121.415.654.032,78
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.3.2.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.3.2.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.3.2.1.2.1.1	86.877.945.000,00	109.682.843.074,00	126,25%	116.919.282.050,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.3.2.1.2.1.2	246.232.231.201,00	279.478.357.067,00	113,50%	264.426.806.281,00
13	Dana Alokasi Umum	5.3.2.1.2.1.3	462.110.308.000,00	462.110.308.000,00	100,00%	305.134.612.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.3.2.1.2.1.4	125.699.335.000,00	80.175.153.228,00	63,78%	19.595.060.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		920.919.819.201,00	931.446.661.369,00	101,14%	706.075.760.331,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.3.2.1.2.2				
18	Dana Penyesuaian	5.3.2.1.2.2.1	49.850.296.000,00	73.112.621.457,00	146,66%	72.485.387.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)		49.850.296.000,00	73.112.621.457,00	146,66%	72.485.387.000,00
20						
21	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	5.3.2.1.2.3				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.3.2.1.2.3.1	48.741.910.171,18	39.766.925.456,80	81,59%	50.949.079.638,37
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22)		48.741.910.171,18	39.766.925.456,80	81,59%	50.949.079.638,37
24						
25	BANTUAN KEUANGAN	5.3.2.1.2.4				
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.3.2.1.2.4.1	61.857.133.000,00	58.285.073.000,00	94,39%	53.203.036.000,00
27	Jumlah Bantuan Keuangan (26)		61.857.133.000,00	58.285.073.000,00	94,39%	53.203.036.000,00
28	Total Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23 + 27)		1.081.369.158.372,18	1.102.711.281.282,80	101,97%	882.713.262.969,37
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.3.2.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.3.2.1.3.1	29.490.429.014,00	32.666.141.920,00	110,77%	-
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31)		29.490.429.014,00	32.666.141.920,00	110,77%	-
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 32)		1.184.675.134.471,97	1.237.116.326.390,60	104,43%	1.004.128.917.002,15
34						
35	BELANJA	5.3.2.2				
36	BELANJA OPERASI	5.3.2.2.1				
37	Belanja Pegawai	5.3.2.2.1.1	565.853.151.970,63	444.037.226.715,00	78,47%	427.599.698.430,75
38	Belanja Barang	5.3.2.2.1.2	393.113.424.347,99	362.673.367.127,71	92,26%	391.528.460.470,13
39	Hibah	5.3.2.2.1.3	77.343.862.084,00	70.128.986.352,00	90,67%	249.410.235.003,00
40	Bantuan Sosial	5.3.2.2.1.4	500.000.000,00	355.000.000,00	71,00%	2.250.990.000,00
41	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 40)		1.036.810.438.402,62	877.194.580.194,71	84,61%	1.070.789.383.903,88
42						
43	BELANJA MODAL	5.3.2.2.2				
44	Belanja Tanah	5.3.2.2.2	618.000.000,00	525.369.929,00	85,01%	11.520.752.721,79
45	Belanja Peralatan dan Mesin	5.3.2.2.2	37.807.591.419,00	34.364.216.709,00	90,89%	57.355.957.303,00
46	Belanja Gedung dan Bangunan	5.3.2.2.2	41.222.286.061,24	40.470.956.037,00	98,18%	152.445.891.227,00
47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.2.2.2	276.574.968.668,12	264.569.716.508,00	95,66%	427.050.500.760,00
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.3.2.2.2	4.905.989.200,00	4.743.617.003,00	96,69%	12.818.507.629,00
49	Belanja Modal Aset Lainnya	5.3.2.2.2	537.750.000,00	453.100.000,00	84,26%	-
50	Jumlah Belanja Modal (44 s/d 49)		361.666.585.348,36	345.126.976.186,00	95,43%	661.191.609.640,79
51						
52	BELANJA TAK TERDUGA	5.3.2.2.3				
53	Belanja Tak Terduga	5.3.2.2.3	5.000.000.000,00	616.312.113,00	12,33%	1.159.561.850,00
54	Jumlah Belanja Tak Terduga (53)		5.000.000.000,00	616.312.113,00	12,33%	1.159.561.850,00
55	JUMLAH BELANJA (41 + 50 + 54)		1.403.477.023.750,98	1.222.937.868.493,71	87,14%	1.733.140.555.394,67

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
56						
57	TRANSFER	5.3.2.2.4				
58	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
59	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.3.2.2.4	108.348.686.263,00	108.348.686.262,00	100,00%	79.809.961.431,00
60	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.3.2.2.4	563.560.700,60	527.420.772,65	93,59%	376.396.120,35
61	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (59 + 60)		108.912.246.963,60	108.876.107.034,65	99,97%	80.186.357.551,35
62	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (55 + 61)		1.512.388.270.714,58	1.331.813.975.528,36	88,06%	1.813.326.912.946,02
63						
64	SURPLUS/DEFISIT (33 - 62)	5.3.2.3	(327.714.136.242,61)	(94.697.649.137,76)	28,90%	(809.197.995.943,87)
65						
66	PEMBIAYAAN	5.3.2.4				
67	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
68	Penggunaan SILPA	5.3.2.4	333.001.974.124,61	332.297.910.267,36	99,79%	1.142.199.970.068,48
69	Jumlah Penerimaan (68)		333.001.974.124,61	332.297.910.267,36	99,79%	1.142.199.970.068,48
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Hegerl		5.287.837.882,00	-	-	-
72	Jumlah Pengeluaran (71)		5.287.837.882,00	-	-	-
73	PEMBIAYAAN NETO (69 - 72)		327.714.136.242,61	332.297.910.267,36	101,40%	1.142.199.970.068,48
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI (64+73)			237.600.261.129,60		
75	KOREKSI SILPA	5.3.2.5		(552.641.028,00)		
76	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (74 +75)	5.3.2.6	-	237.047.620.101,60	-	333.001.974.124,61





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

Uraian	Calatan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	(%)	Realisasi 2015
A. PENDAPATAN - LRA	4				
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	4.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.1.1	17,114,872,936.00	11,343,661,615.03	66.28%	19,056,066,301.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.1.2	2,954,323,545.47	4,537,899,272.03	153.60%	3,943,117,920.00
Pendapatan Hasil Pengalihan Hakayatan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.1.3	3,311,814,000.00	5,013,331,562.27	151.38%	6,931,839,723.77
Lain-lain PAD yang sah - LRA	4.1.4	78,959,906,038.81	50,873,064,870.79	64.43%	75,052,967,579.24
Jumlah I		102,340,910,520.28	71,767,977,320.12	70.13%	104,983,991,524.01
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	4.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMBANGUNAN - LRA	4.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	4.2.1.1	79,563,962,787.00	90,563,981,330.00	113.83%	77,491,273,650.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	4.2.1.2	330,121,234,636.83	292,001,949,854.00	88.45%	329,241,883,534.00
Dana Alokasi Umum - LRA	4.2.1.3	400,260,543,000.00	400,260,543,000.00	100.00%	292,437,662,000.00
Dana Alokasi Khusus - LRA	4.2.1.4	221,514,692,000.00	154,144,268,063.00	69.59%	75,891,024,000.00
Dana Alokasi Desa - LRA	4.2.1.5	139,077,322,000.00	138,789,106,301.00	99.79%	62,022,821,000.00
Jumlah II		1,170,537,744,423.83	1,075,759,845,548.00	91.90%	827,064,641,844.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	4.2.2				
Dana Penyesuaian - LRA	4.2.2.1				30,814,091,000.00
Jumlah III					30,814,091,000.00
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LRA	4.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	4.2.3.1	51,920,072,009.70	43,519,049,785.04	84.01%	42,511,178,942.19
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	4.2.3.2				
Jumlah IV		51,920,072,009.70	43,519,049,785.04	84.01%	42,511,178,942.19
BANTUAN KEUANGAN - LRA	4.2.4				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	4.2.4.1	70,481,500,000.00	70,481,500,000.00	100.00%	63,781,500,000.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Lainnya - LRA	4.2.4.2				
Jumlah V		70,481,500,000.00	70,481,500,000.00	100.00%	63,781,500,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.3				
Pendapatan Hibah	4.3.1	1,500,000,000.00			879,267,265.00
Dana Darurat	4.3.2				
Pendapatan Lainnya	4.3.3	35,724,400,000.00	32,866,921,233.43	92.00%	
Jumlah VI		37,224,400,000.00	32,866,921,233.43	88.29%	879,267,265.00
TOTAL PENDAPATAN		1,432,504,632,953.81	1,294,495,293,886.59	90.37%	1,070,054,692,915.20
B. BELANJA	5				
BELANJA OPERASI	5.1				
Belanja Pegawai	5.1.1	492,729,457,220.91	458,505,111,108.00	93.05%	413,163,718,931.76
Belanja Barang	5.1.2	408,367,831,210.66	322,490,044,715.27	78.97%	366,143,122,570.86
Subsidi	5.1.3	8,567,007,200.00	6,478,879,200.00	75.71%	10,422,447,066.67
Hibah	5.1.4	22,609,223,051.35	17,963,663,759.18	79.45%	70,860,673,872.98
Bantuan Sosial	5.1.5	1,150,000,000.00	97,000,000.00	8.43%	3,095,960,000.00
Jumlah VII		973,403,518,682.92	805,534,698,782.45	82.80%	863,705,922,442.77
BELANJA MODAL	5.2				
Belanja Tanah	5.2.1	726,775,000.00	15,121,400.00	2.08%	10,540,204,510.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2	21,578,093,796.19	14,390,007,660.03	66.59%	31,968,305,582.27
Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.3	82,397,892,396.00	78,282,889,833.17	95.01%	245,554,248,604.34
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.4	242,362,959,160.00	191,601,825,437.42	79.06%	299,505,615,575.87
Belanja Asat Tetap Lainnya	5.2.5	980,735,600.00	325,339,000.00	33.17%	685,408,025.00
Jumlah VIII		949,036,255,942.19	284,815,182,330.62	30.01%	586,241,292,297.48
BELANJA TAK TERDUGA	5.3				
Belanja Tak Terduga	5.3.1	500,000,000.00	222,216,000.00	44.44%	491,506,397.00
Jumlah IX		500,000,000.00	222,216,000.00	44.44%	491,506,397.00
TOTAL BELANJA (VII+VIII+IX)		1,781,939,774,625.11	1,090,372,087,113.07	60.90%	1,452,438,711,136.75
C. TRANSFER	6				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	6.1				
Bagi Hasil Pajak	6.1.1				
Bagi Hasil Retribusi	6.1.2				
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	6.1.3				
Jumlah X					
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	6.2				
Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	6.2.1				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	6.2.2	179,995,267,447.80	163,995,207,447.80	91.11%	117,153,632,817.60
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	6.2.3	841,990,197.14	813,019,991.63	96.56%	718,331,159.97
Transfer Dana Otonomi Khusus	6.2.4				
Jumlah XI		180,837,247,544.94	164,808,227,399.43	91.14%	117,871,963,977.47
TOTAL TRANSFER (X+XI)		180,837,247,544.94	164,808,227,399.43	91.14%	117,871,963,977.47
D. SURPLUS/DEFISIT (A-B-C)		(30,772,399,318.24)	39,314,969,374.09	-129.87%	(500,255,982,199.02)

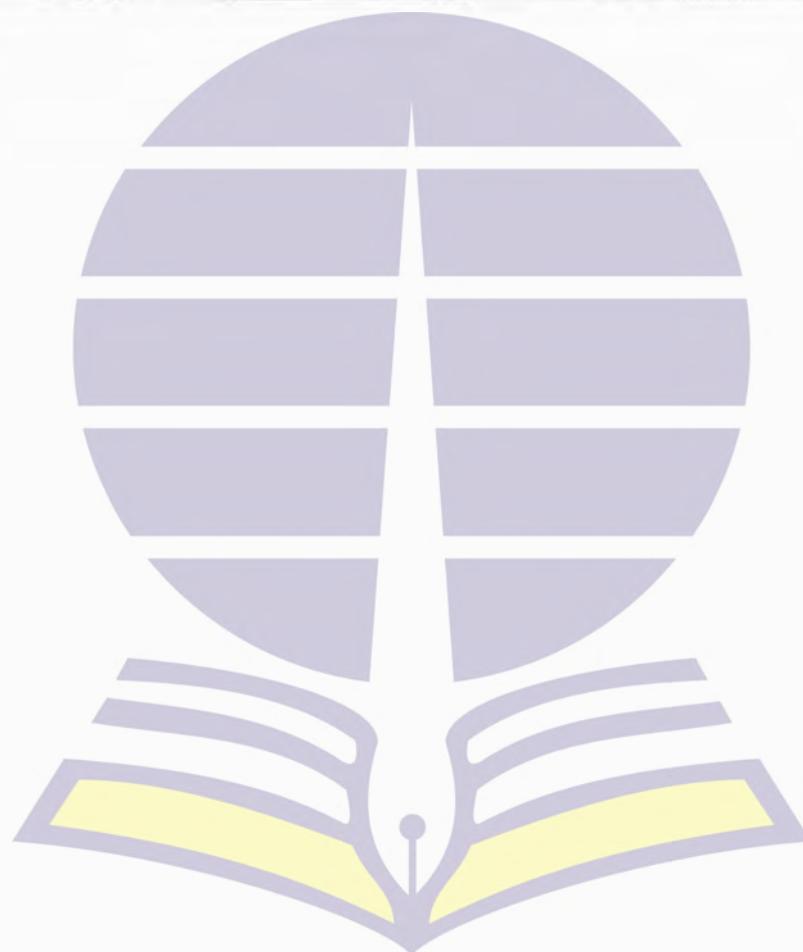
Calatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2015	Realisasi 2015	(%)	Realisasi 2015
E. PEMBIAYAAN	7				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.1				
Penggunaan SILPA	7.1.1	30,272,389,316.24	30,272,389,316.24	100.00%	532,528,371,515.39
Jumlah XI		30,272,389,316.24	30,272,389,316.24	100.00%	532,528,371,515.39
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.2				
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	7.2.1	-	-	-	2,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	7.2.2	-	-	-	-
Jumlah XII		-	-	-	2,000,000,000.00
PEMBIAYAAN NETO (XI-XII)		30,272,389,316.24	30,272,389,316.24	100.00%	530,528,371,515.39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI (C+D)	7.3	0.00	69,587,358,690.33	-	30,272,389,316.37
KOREKSI SILPA		-	-	-	(0.13)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0.00	69,587,358,690.33	-	30,272,389,316.24



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
1	PENDAPATAN - LRA	1.505.439.899.298,00	1.487.833.269.990,34	98,82	1.287.046.092.113,81
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	72.281.253.708,00	52.956.899.448,47	73,28	75.825.371.888,48
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.061.600.000,00	8.821.126.184,00	124,92	7.632.019.912,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.572.500.000,00	1.751.670.417,00	110,94	1.378.326.694,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.333.000.000,00	9.009.642.446,39	117,44	7.473.556.759,10
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	69.308.153.208,00	37.287.452.420,08	62,67	55.141.476.600,89
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.421.256.596.090,00	1.416.349.579.543,87	99,30	1.184.784.248.448,43
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.184.373.928.788,00	1.167.451.979.737,00	98,57	991.967.041.175,90
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	40.165.126.000,00	41.381.705.602,00	103,03	38.675.866.428,00
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	234.181.599.200,00	244.504.481.170,00	104,41	267.636.698.747,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	772.980.463.000,00	772.980.463.000,00	100,00	643.964.213.000,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	119.317.259.000,00	102.367.256.968,00	86,30	41.709.260.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	17.728.593.500,00	6.417.882.000,00	31,69	0,00
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	82.653.748.908,00	94.176.721.888,00	114,76	59.705.034.000,00
15	Dana Penyesuaian - LRA	62.054.748.500,00	34.170.721.000,00	55,14	50.705.034.000,00
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	37.333.626.308,00	38.238.839.588,87	102,43	55.486.153.274,43
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	34.265.127.300,00	39.230.939.806,87	114,43	33.486.153.274,43
18	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	3.048.699.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Bantuan Keuangan - LRA	117.488.800.000,00	117.488.800.000,00	100,00	188.828.990.000,00
20	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	117.489.000.000,00	117.489.000.000,00	100,00	108.620.000.000,00
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	11.902.150.000,00	16.345.000.000,00	137,33	30.616.471.798,00
22	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	30.616.471.798,00
23	Pendapatan Lainnya - LRA	11.902.150.000,00	16.345.000.000,00	137,33	0,00
24	BELANJA	1.443.388.673.793,14	1.250.606.387.595,94	87,19	1.401.721.614.727,65
25	BELANJA OPERASI	1.013.549.302.217,45	931.263.172.011,98	92,38	918.311.397.603,85
26	Belanja Pegawai	463.994.376.747,05	468.263.792.001,60	99,76	461.660.737.185,80
27	Belanja Barang dan Jasa	450.809.574.487,40	386.019.816.718,30	86,41	353.211.088.886,95
28	Belanja Subsidi	14.169.013.473,00	10.276.371.504,00	72,63	17.632.584.777,00
29	Belanja Hibah	81.561.338.550,00	74.341.479.492,00	91,88	88.597.679.164,00
30	Belanja Bantuan Sosial	3.016.000.000,00	2.716.013.186,00	90,08	4.368.807.588,00
31	BELANJA MODAL	430.040.371.575,69	327.401.734.854,96	76,13	483.316.582.124,98
32	Belanja Modal Tanah	1.592.830.000,00	962.578.959,00	59,90	1.360.549.631,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.761.440.164,94	39.007.795.144,96	81,51	22.784.689.186,00
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.787.600.169,00	7.921.446.940,00	40,03	108.827.119.312,00
35	Belanja Modal Jalan, Infrastuktur dan Jembatan	389.896.069.842,65	278.063.426.101,00	71,26	349.683.994.095,00
36	Belanja Modal Asat Telap Lainnya	454.411.400,00	348.751.699,00	76,50	554.233.300,00
37	Belanja Modal Asat Lainnya	586.000.000,00	238.175.000,00	40,13	0,00
38	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	88.836.388,00
39	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	99.636.000,00
40	TRANSFER	154.399.899.582,00	154.399.238.294,00	99,97	238.711.446.848,00
41	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	154.099.999.582,00	154.099.999.577,00	100,00	238.456.562.000,00
42	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	154.099.999.582,00	154.099.999.577,00	100,00	238.456.562.000,00
43	Belanja Keuangan Kepada Pihak Pihak	399.900.000,00	252.228.717,00	63,47	258.894.846,00
44	Belanja Keuangan Kepada Pihak Pihak	300.000.000,00	252.228.717,00	84,07	258.894.846,00
45	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.549.674.175,14)	74.679.642.100,38	(80,59)	(353.396.970.469,74)
46	PEMBIAYAAN				
47	PEMERIKHAAN PEMBIAYAAN	92.649.674.175,14	20.406.806.269,41	22,39	374.272.130.729,15
48	Penggunaan SIPA	20.375.160.268,45	20.375.160.269,41	100,00	375.242.329.329,15
49	Pinjaman Dalam Negeri	71.674.613.906,69	0,00	0,00	0,00
50	Penarikan Kembali Investasi Non Perumahan Lainnya	0,00	31.646.019,00	6,33	1.029.301.400,00
51	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
52	Pengeluaran Investasi Non Perumahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
53	PEMBIAYAAN NETTO	92.649.674.175,14	20.406.806.269,41	18,71	379.772.130.729,15
54	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) sebelum Koreksi	0,00	81.689.793.749,16	8,09	28.375.160.269,41
55	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	81.689.793.749,16	8,09	0,00
56	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	81.689.793.749,16	8,09	28.375.160.269,41

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.402.000.000,00	2.228.144.237,42	158,93	1.992.842.098,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	211.000.000,00	272.165.900,00	128,99	1.996.185.582,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.000.000.000,00	6.376.331.417,50	127,53	0,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	8.800.000.000,00	12.113.567.146,69	137,65	30.385.834.474,56
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		15.413.000.000,00	20.990.208.701,61	136,19	34.374.862.154,56
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	24.373.669.681,94	31.717.235.762,00	130,13	16.306.379.900,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	90.950.898.000,00	207.982.439.560,00	228,68	218.265.488.754,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	341.441.271.000,00	341.441.271.000,00	100,00	171.596.612.000,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	99.387.593.000,00	90.439.953.129,00	91,00	8.094.928.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		556.153.431.681,94	671.580.899.461,00	120,75	414.263.408.654,00
16	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
17	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	25.109.620.000,00	26.930.160.000,00	107,25	2.712.737.800,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17 s/d 18)		25.109.620.000,00	26.930.160.000,00	107,25	2.712.737.800,00
20	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	10.324.557.342,23	13.614.452.148,93	131,86	22.608.431.705,33
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.2	0,00	1.447.230.017,69	0,00	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (21 s/d 22)		10.324.557.342,23	15.061.682.166,62	131,86	22.608.431.705,33
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.4				
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.2.4	10.589.000.000,00	10.589.000.000,00	100,00	6.231.500.000,00
26	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan (26)		10.589.000.000,00	10.589.000.000,00	100,00	6.231.500.000,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23 + 26)		602.176.609.024,17	724.161.741.617,62	120,26	445.816.078.159,33
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
30	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Donat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	7.067.877.322,72	437.104.030,12	6,18	19.026.708.424,36
33	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (30 s/d 32)		7.067.877.322,72	437.104.030,12	6,18	19.026.708.424,36
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)		624.657.486.346,89	745.589.054.349,35	119,36	499.217.648.738,25

No	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
35						
36	BELANJA	5.1.2				
37	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
38	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	229.124.260.361,13	209.394.727.233,00	91,39	195.716.993.488,20
39	Belanja Barang	5.1.2.1.2	242.437.069.567,00	204.460.102.736,00	84,34	197.350.951.553,15
40	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	42.015.525.600,00	34.109.053.120,00	81,18	79.984.244.704,00
43	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	3.350.000.000,00	1.794.000.000,00	53,55	1.846.800.000,00
44	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)		516.926.855.528,13	449.757.883.089,00	87,01	474.898.989.745,35
45						
46	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
47	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	10.166.000.000,00	9.312.994.000,00	91,61	1.062.637.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	37.492.319.936,00	30.803.931.091,00	82,16	24.604.519.913,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	143.373.696.942,00	136.165.184.195,00	94,97	121.633.834.186,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	268.335.969.900,00	242.019.489.839,00	90,19	143.367.530.063,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.325.800.000,00	355.720.000,00	15,29	253.634.000,00
52	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)		461.693.786.778,00	418.657.319.125,00	90,68	290.922.155.162,00
54						
55	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
56	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	3.000.000.000,00	0,00	0,00	1.414.902.200,00
57	Jumlah Belanja Tidak Terduga		3.000.000.000,00	0,00	0,00	1.414.902.200,00
58	JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57)		981.620.642.306,13	868.416.202.214,00	88,47	767.236.047.107,35
59						
60	TRANSFER	5.1.2.4				
61	Transfer Bantuan Keuangan ke Dosa	5.1.2.4.1	51.609.620.000,00	49.099.680.586,00	95,14	45.014.716.701,96
62	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2	830.680.830,00	710.854.925,00	85,57	
63	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		52.440.300.830,00	49.810.536.511,00	94,99	45.014.716.701,96
64	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 63)		1.034.060.943.136,13	918.226.737.725,00	88,80	812.250.763.809,31
65	SURPLUS / DEFISIT (34 - 64)		(409.403.456.789,24)	(172.636.683.375,65)	42,17	(313.033.115.071,06)
66						
67	PEMBIAYAAN	5.1.3				
68	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3.1				
69	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.1.3.1.1	409.403.456.789,24	409.403.269.871,24	99,99	722.682.767.860,30
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah (69 s/d 70)		409.403.456.789,24	409.403.269.871,24	99,99	722.682.767.860,30
72						
73	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3.2				
74	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Utang	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah (74 s/d 75)		0,00	0,00	0,00	0,00
77	PEMBIAYAAN NETTO (71 - 76)		409.403.456.789,24	409.403.269.871,24	99,99	722.682.767.860,30
78						
79	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI (65 + 77)	5.1.4	0,00	236.766.586.495,59	0,00	409.649.652.789,24
80	KOREKSI SILPA	5.1.5		308.292.244,00		246.196.000,00
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI (65 + 77)	5.1.6	0,00	236.458.294.251,59		409.403.456.789,24



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	Reff	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
PENDAPATAN		1,283,863,055,411.00	1,351,171,087,194.24	105.24%	1,465,724,007,330.75
PENDAPATAN ASLI DAERAH	A 2 1	103,977,569,000.00	88,059,263,275.24	84.69%	94,014,016,148.75
Pendapatan Pajak Daerah	A 2 1 1	30,784,299,000.00	32,009,452,634.50	103.96%	27,319,802,868.43
Pendapatan Retribusi Daerah	A 2 1 1	13,699,650,000.00	8,256,958,731.94	60.27%	12,605,787,028.66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A 2 1 1	14,500,000,000.00	9,411,910,722.09	64.91%	10,820,501,766.64
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	A 2 1 1	44,993,620,000.00	38,380,941,186.71	85.30%	43,267,924,485.02
PENDAPATAN TRANSFER	A 2 1 2	1,148,835,186,411.00	1,226,319,981,718.00	106.74%	1,235,345,246,182.00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Pembinaan	A 2 1 2 1	974,351,054,411.00	1,061,511,697,968.00	108.95%	1,078,974,437,132.00
Dana Bagi Hasil Pajak	A 2 1 2 1	77,122,903,591.00	90,012,937,119.00	116.71%	138,694,732,849.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	A 2 1 2 1	643,491,964,820.00	718,709,201,849.00	111.69%	690,835,402,283.00
Dana Alokasi Umum	A 2 1 2 1	249,949,676,000.00	249,949,676,000.00	100.00%	249,444,302,000.00
Dana Alokasi Khusus	A 2 1 2 1	3,786,510,000.00	2,839,883,000.00	75.00%	0.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	A 2 1 2 1	48,576,631,000.00	63,310,465,000.00	130.33%	27,354,761,000.00
Dana Penyesuaian	A 2 1 2 1	48,576,631,000.00	63,310,465,000.00	130.33%	27,354,761,000.00
Transfer Pemerintah Provinsi	A 2 1 2	125,907,501,000.00	101,497,618,750.00	80.61%	129,016,048,050.00
Pendapatan Bagi hasil Pajak	A 2 1 2 1	125,907,501,000.00	101,497,618,750.00	80.61%	129,016,048,050.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	A 2 1 3	31,050,300,000.00	36,791,842,201.00	118.49%	136,364,745,000.00
Pendapatan Hibah	A 2 1 3 1	0.00	0.00		33,354,445,000.00
Pendapatan Lainnya		31,050,300,000.00	36,791,842,201.00	118.49%	103,010,300,000.00
BELANJA	A 2 2	1,815,023,973,023.20	1,677,056,631,223.97	92.40%	1,788,716,759,015.08
BELANJA OPERASI	A 2 2 1	901,038,328,478.20	821,063,589,915.45	91.12%	940,923,934,398.28
Belanja Pegawai	A 2 2 1	459,845,498,939.04	437,633,313,363.57	95.17%	416,164,149,197.40
Belanja Barang	A 2 2 1	370,352,668,703.16	323,772,570,548.88	87.42%	420,327,713,392.88
Belanja Subsidi	A 2 2 1	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	100.00%	0.00
Belanja Hibah	A 2 2 1	57,666,674,300.00	51,478,780,500.00	89.27%	66,177,743,755.00
Belanja Bantuan Sosial	A 2 2 1	10,093,050,000.00	5,120,199,375.00	50.73%	2,695,589,315.00
Belanja Bantuan Keuangan	A 2 2 1	580,436,536.00	558,726,128.00	96.26%	35,558,736,738.00
BELANJA MODAL	A 2 3	910,985,644,545.00	855,742,525,966.20	93.94%	843,228,596,004.00
Belanja Tanah	A 2 3 1	20,819,281,688.00	7,266,125,000.00	34.90%	26,054,161,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	A 2 3 1	56,778,141,414.00	51,392,108,507.00	90.51%	90,071,214,576.00
Belanja Bangunan dan Gedung	A 2 3 1	370,657,955,877.00	351,449,760,150.20	94.82%	298,149,400,159.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	A 2 3 1	459,532,687,776.00	442,467,996,213.00	96.28%	418,214,580,169.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	A 2 3 1	2,914,097,790.00	2,893,721,116.00	99.30%	10,647,819,100.00
Belanja Aset Lainnya	A 2 3 1	263,480,000.00	282,814,980.00	99.77%	91,421,000.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	A 2 4	3,000,000,000.00	250,515,342.32	8.35%	4,564,228,612.80
Belanja Tidak Terduga	A 2 4 1	3,000,000,000.00	250,515,342.32	8.35%	4,564,228,612.80
SURPLUS / DEFISIT	A 2 5	-531,160,917,612.20	-325,885,544,029.73	61.35%	-322,992,751,684.33
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	A 2 6	531,160,917,612.20	531,160,917,612.20	100.00%	859,297,869,296.53
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	A 2 6 1	531,160,917,612.20	531,160,917,612.20	100.00%	859,297,869,296.53
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	A 2 6 2	0.00	0.00		5,144,200,000.00
Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	A 2 6 2	0.00	0.00		0.00
Pembayaran Pokok Utang	A 2 6 2	0.00	0.00		5,144,200,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	A 2 7	531,160,917,612.20	531,160,917,612.20	100.00%	854,153,669,296.53
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN		0.00	205,275,373,582.47		531,160,917,612.20



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

43700.pdf

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

Uraian	Catatan	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	5.2.b.1	1.268.090.520.901,80	1.582.055.629.501,95	122,82	1.656.323.428.498,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.b.1.1	70.730.005.222,00	126.038.940.770,95	178,20	93.363.118.589,69
Pendapatan Pajak Daerah	5.2.b.1.1.1	4.066.000.000,00	6.929.462.988,94	170,42	4.180.105.600,60
Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.b.1.1.2	2.806.000.000,00	5.023.262.036,00	179,02	3.141.567.786,00
Pendapatan Hasil Pengeblean Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.b.1.1.3	20.146.000.000,00	32.514.385.387,13	161,39	24.020.965.686,73
Lain-lain PAD yang Sah	5.2.b.1.1.4	43.712.005.222,00	81.571.830.356,88	186,61	52.020.479.516,36
PENDAPATAN TRANSFER	5.2.b.1.2	1.191.083.715.679,80	1.429.739.918.731,00	120,04	1.396.286.209.909,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.2.b.1.2.1	1.051.518.324.679,80	1.297.289.759.156,00	123,37	1.283.627.208.109,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.b.1.2.1.1	60.633.198.363,80	138.973.068.921,00	229,20	221.328.572.662,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.2.b.1.2.1.2	647.744.278.316,00	817.853.667.235,00	126,26	731.026.710.447,00
Dana Alokasi Umum	5.2.b.1.2.1.3	332.429.548.000,00	332.429.548.000,00	100,00	326.787.105.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.2.b.1.2.1.4	10.711.300.000,00	8.033.475.000,00	75,00	4.484.820.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.2.b.1.2.2	44.853.391.000,00	44.853.391.000,00	100,00	29.220.925.000,00
Dana Penyesuaian	5.2.b.1.2.2.1	44.853.391.000,00	44.853.391.000,00	100,00	29.220.925.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.2.b.1.2.3	94.712.000.000,00	87.596.768.575,00	92,49	83.438.076.800,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.b.1.2.3.1	94.712.000.000,00	87.596.768.575,00	92,49	83.438.076.800,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.b.1.3	26.276.800.000,00	26.276.770.000,00	100,00	166.674.100.000,00
Pendapatan Hibah	5.2.b.1.3.1	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Lainnya	5.2.b.1.3.2	26.276.800.000,00	26.276.770.000,00	100,00	166.674.100.000,00
BELANJA	5.2.b.2	2.774.762.424.237,61	1.927.586.832.617,12	69,47	1.605.531.288.782,57
BELANJA OPERASI	5.2.b.2.1	1.508.289.366.320,29	1.089.769.065.696,87	72,25%	896.557.200.155,95
Belanja Pegawai	5.2.b.2.1.1	715.971.471.977,29	461.220.466.101,50	64,42%	432.823.918.019,00
Belanja Barang	5.2.b.2.1.2	497.164.306.343,00	335.121.170.216,10	67,41%	284.524.057.322,00
Belanja Hibah	5.2.b.2.1.3	290.213.890.000,00	288.637.670.880,00	99,46%	178.348.405.750,00
Belanja Bantuan Sosial	5.2.b.2.1.4	4.524.680.000,00	4.429.680.000,00	97,90%	685.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.2.b.2.1.5	415.018.000,00	359.888.499,27	86,72%	175.819.064,95
BELANJA MODAL	5.2.b.2.2	1.211.356.857.917,32	793.267.315.922,25	65,49	667.553.511.569,62
Belanja Tanah	5.2.b.2.2.1	38.213.900.000,00	3.758.295.582,15	9,83	2.320.609.909,62
Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.b.2.2.2	92.856.281.789,00	63.703.576.897,00	68,60	58.474.236.769,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.b.2.2.3	319.228.504.204,22	214.770.852.121,10	67,28	158.928.940.113,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	5.2.b.2.2.4	758.214.402.724,10	510.308.825.678,00	67,22	447.430.395.813,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.b.2.2.5	1.843.789.200,00	725.764.644,00	39,38	390.328.965,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.2.b.2.3	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	5.2.b.2.3.1	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER	5.2.b.2.4	45.116.200.000,00	44.550.450.998,00	98,75	41.420.577.057,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	5.2.b.2.4.1	45.116.200.000,00	44.550.450.998,00	98,75	41.420.577.057,00
SURPLUS/DEFISIT	5.2.b.3	(1.486.671.903.335,81)	(345.531.203.115,17)	23,24	50.792.139.716,12
PEMBIAYAAN	5.2.b.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.2.b.4.1	1.506.671.903.335,81	1.507.761.960.180,65	100,07	1.501.917.868.406,69
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	5.2.b.4.1.1	1.506.671.903.335,81	1.507.761.960.180,65	100,07	1.501.917.868.406,69
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.2.b.4.2	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	46.038.104.787,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.2.b.4.2.1	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	14.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	5.2.b.4.2.2	0,00	0,00	0,00	31.538.104.787,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.2.b.4	1.486.671.903.335,81	1.487.761.960.180,65	100,07	1.455.879.763.619,69
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.2.b.5	0,00	1.142.230.757.065,48		1.506.671.903.335,81



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KATAGORI	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	12,170,812,000.00	14,078,056,718.18	115.67%	15,611,688,553.85
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	2,302,510,000.00	2,484,583,714.47	118.17%	2,502,723,220.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9,590,904,492.72	3,605,926,564.44	100.42%	3,830,395,512.10
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	38,590,977,000.00	91,800,190,898.43	237.88%	73,626,070,363.09
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		56,455,203,492.72	111,968,757,895.52	198.33%	95,570,877,449.04
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	73,578,128,927.00	97,514,019,026.00	132.53%	130,191,913,346.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.2	863,589,826,796.79	670,928,628,569.00	100.85%	737,531,859,321.00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.3	311,776,974,000.00	311,776,974,000.00	100.00%	307,765,777,000.00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.4	94,983,590,000.00	91,938,820,000.00	96.79%	95,549,897,000.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		1,343,928,519,713.79	1,372,158,441,595.00	102.10%	1,271,039,246,667.00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
16	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.5	31,685,203,000.00	31,685,203,000.00	100.00%	24,761,597,000.00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16)		31,685,203,000.00	31,685,203,000.00	100.00%	24,761,597,000.00
18	Transfer Pemerintah Provinsi					
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.6	70,528,585,000.00	70,237,032,475.00	99.59%	77,901,064,800.00
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19)		70,528,585,000.00	70,237,032,475.00	99.59%	77,901,064,800.00
21	Total Pendapatan Transfer (14 + 17 + 20)		1,446,142,307,713.79	1,474,080,677,070.00	101.93%	1,373,701,908,467.00
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
23	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	750,000,000.00	884,473,100.00	117.93%	1,022,428,283.00
24	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	43,063,500,000.00	43,063,500,000.00	100.00%	109,461,400,000.00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (23 s.d. 24)		43,813,500,000.00	43,947,973,100.00	100.31%	110,483,828,283.00
26	TOTAL PENDAPATAN (7 + 21 + 25)		1,546,411,011,206.51	1,629,997,408,965.52	105.41%	1,579,756,614,199.04
27						
28	BELANJA	5.1.2				
29	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	581,715,416,713.02	525,713,686,271.00	90.37%	445,065,529,200.50
31	Belanja Barang	5.1.2.1.2	382,033,502,235.11	271,565,580,739.81	71.35%	306,871,308,143.97
32	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	-	-	-	-
33	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	14,577,000,000.00	9,253,801,002.00	63.48%	10,892,261,051.00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	106,766,477,740.59	63,674,901,044.85	59.64%	51,565,961,850.00
35	Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	26,092,863,000.00	14,138,192,975.00	54.18%	9,183,136,000.00
36	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.7	51,637,064,199.31	51,245,598,169.00	99.24%	51,594,631,530.12
37	Jumlah Belanja Operasi (30 s.d. 36)		1,162,822,323,888.03	936,591,760,201.66	80.54%	874,972,227,775.59
38	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
39	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	17,801,500,000.00	8,227,157,800.00	46.22%	6,259,055,175.00
40	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	75,882,011,633.50	58,822,911,327.00	77.52%	76,675,335,541.67
41	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	263,786,722,445.07	181,400,163,211.24	68.77%	225,406,286,745.48
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	628,199,280,106.82	522,986,583,449.14	83.25%	592,470,704,291.63
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	957,425,000.00	622,476,950.00	65.02%	1,694,280,570.00
44	Jumlah Belanja Modal (39 s.d. 43)		986,626,939,185.39	772,059,299,737.38	78.25%	902,505,667,623.78
45	BELANJA TAK TERDUGA					
46	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	3,000,000,000.00	1,856,218,478.00	61.87%	170,000,000.00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga (46)		3,000,000,000.00	1,856,218,478.00	61.87%	170,000,000.00
48	TRANSFER					
49	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
50	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
51	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
52	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
53	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa (50 s.d. 52)		-	-	-	-
54	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (37 + 44 + 47 + 53)		2,152,449,263,073.42	1,710,507,278,417.04	79.47%	1,777,647,890,399.37
55	SURPLUS/(DEFISIT) (26 - 54)		(606,038,251,866.91)	(80,509,870,351.52)	13.28%	(197,891,276,200.33)
56						
57	PEMBIAYAAN	5.1.3				
58	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
59	Penggunaan SIPA	5.1.3.1.1	619,038,251,866.91	619,038,251,866.91	100.00%	866,929,528,067.24
60	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (59)		619,038,251,866.91	619,038,251,866.91	100.00%	866,929,528,067.24
61	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	13,000,000,000.00	6,000,000,000.00	46.15%	50,000,000,000.00
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.3.2.2	-	-	-	-
64	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (62 s.d. 63)		13,000,000,000.00	6,000,000,000.00	46.15%	50,000,000,000.00
65	PEMBIAYAAN NETO (60 - 64)		606,038,251,866.91	613,038,251,866.91	101.16%	816,929,528,067.24
66	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (55 + 65)	5.1.4				
				532,528,381,515.39		619,038,251,866.91

Tinjau Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETATAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.2.2	4.575.000.000,00	7.440.658.373,36	162,64%	5.017.864.019,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2.3	1.318.690.000,00	2.082.584.165,00	157,93%	1.664.053.163,01
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.2.4	9.680.000.000,00	10.158.332.390,26	104,94%	9.347.804.868,42
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.2.5	78.934.730.000,00	83.689.402.439,99	106,02%	79.201.205.899,81
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	5.1.2.1	94.508.420.000,00	103.370.977.368,61	109,38%	95.230.925.950,24
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1	30.000.000.000,00	49.572.529.197,00	165,24%	69.374.816.725,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.3.2	763.026.242.000,00	790.493.828.115,00	103,60%	716.609.700.367,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.3.3	658.156.829.000,00	659.156.829.000,00	100,00%	620.970.044.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.3.4	68.797.530.000,00	68.797.530.000,00	100,00%	83.229.863.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		1.514.980.601.000,00	1.562.020.716.312,00	103,10%	1.890.177.924.092,00
15	Transfer Pemerintah Provinsi					
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.3.5	74.538.924.000,00	74.361.981.975,00	99,76%	77.768.792.850,00
17	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19)		74.538.924.000,00	74.361.981.975,00	99,76%	77.768.792.850,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17)	5.1.3	1.589.519.525.000,00	1.636.382.698.287,00	102,95%	1.567.946.716.942,00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
20	Pendapatan Hibah			3.744.034.055,00		750.000.000,00
21	Pendapatan Lainnya			98.071.898.500,00	93,90%	127.385.941.576,00
22	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (20 s.d. 21)	5.1.3.6	104.437.065.000,00	101.815.430.335,00	97,49%	128.133.941.576,00
23	TOTAL PENDAPATAN (7 + 18 + 22)		1.788.465.010.000,00	1.841.569.105.990,61	102,97%	1.791.311.584.468,24
25	BELANJA					
26	BELANJA OPERASI					
27	Belanja Pegawai	5.1.4.2	587.317.972.719,25	465.575.756.318,00	66,65%	439.497.421.040,00
28	Belanja Barang	5.1.4.3	421.148.331.309,00	382.288.039.976,00	90,77%	395.924.091.933,00
29	Belanja Subsidi	5.1.4.4	22.000.000.000,00	21.108.098.043,00	95,92%	21.944.312.579,00
30	Belanja Hibah	5.1.4.5	253.945.779.139,00	207.430.229.797,64	81,67%	156.656.729.515,00
31	Bantuan Sosial	5.1.4.6	16.275.545.000,00	4.935.686.850,00	30,33%	7.666.075.579,00
32	Jumlah Belanja Operasi (27 s.d. 31)	5.1.4.1	1.230.685.428.173,25	1.081.330.791.580,64	87,86%	1.021.718.628.646,00
33	BELANJA MODAL					
34	Belanja Tanah		19.922.124.350,00	13.889.491.175,00	70,21%	14.209.859.292,00
35	Belanja Peralatan dan Mesin		58.055.697.305,00	43.387.126.364,00	74,73%	58.019.721.350,80
36	Belanja Bangunan dan Gedung		284.741.053.178,00	226.410.247.735,16	79,51%	289.072.504.911,00
37	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		647.429.450.354,56	576.796.688.048,25	89,09%	618.619.985.055,30
38	Belanja Aset Tetap Lainnya		54.620.000,00	104.428.000,00	191,18%	3.203.282.075,00
39	Belanja Aset Lainnya		3.235.598.900,00	1.852.480.000,00	57,25%	2.967.207.273,00
40	Jumlah Belanja Modal (34 s.d. 39)	5.1.5	1.013.419.539.088,56	862.540.411.342,43	85,11%	986.092.557.957,10
41	BELANJA TAK TERDUGA					
42	Belanja Tak Terduga	5.1.6	2.000.000.000,00	-	0,00%	357.564.000,00
43	Jumlah Belanja Tak Terduga (42)		2.000.000.000,00	-	0,00%	357.564.000,00
44	TRANSFER					
45	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
46	Bagi Hasil Pajak					
47	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.4.7	155.000.000.000,00	141.636.400.000,00	91,38%	131.018.400.000,00
48	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa (46 s.d. 47)		155.000.000.000,00	141.636.400.000,00	91,38%	131.018.400.000,00
49	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (36 + 44 + 47 + 52)		2.401.124.967.261,61	2.085.507.602.423,07	86,86%	2.139.187.150.603,10
50	SURPLUS/(DEFISIT) (23 - 49)		(612.659.957.261,61)	(243.938.496.932,46)	39,82%	(347.875.566.134,86)
52	PEMBIAYAAN					
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
54	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	5.1.8.1.1	617.598.857.261,61	617.598.857.261,61	100,00%	961.314.029.396,47
55	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.8.1.2	2.061.000.000,00	1.061.869.000,00	51,49%	-
56	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (54 s.d. 55)		619.659.857.261,61	618.660.826.261,61	99,84%	961.314.029.396,47
57	PENGFLUARAN PEMBIAYAAN					
58	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.8.2.1	5.500.000.000,00	-	0,00%	15.778.500.000,00
59	Penyertaan Pinjaman Daerah	5.1.8.2.2	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00%	2.061.000.000,00
60	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (58 s.d. 59)		7.000.000.000,00	1.500.000.000,00	21,43%	15.839.500.000,00
61	PEMBIAYAAN NETO (55-60)		612.659.857.261,61	617.160.826.261,61	100,74%	965.474.525.396,47
62	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (50+ 61)	5.1.9	-	373.242.329.329,15		617.598.957.261,61

Sifat Laporan ini Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2014	Realisasi 2014	(%)	Realisasi 2013
PENDAPATAN		940,618,091,607.00			
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	465,000,000.00	2,312,793,108.00	497.37%	202,350,312.00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	325,000,000.00	199,469,000.00	61.38%	175,625,100.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5,000,000,000.00	7,786,184,419.83	155.76%	5,723,155,960.71
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	9,927,148,000.00	35,487,920,031.62	357.48%	28,596,414,519.87
Jumlah I		15,717,148,000.00	45,788,366,559.25	291.33%	34,702,545,892.58
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	22,401,547,082.00	25,934,255,328.00	115.99%	44,123,255,422.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.2	617,037,045,525.00	734,185,147,015.00	118.99%	682,583,625,345.00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.3	204,415,427,000.00	204,415,427,000.00	100.00%	133,386,322,000.00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.4			0.00%	7,580,720,000.00
Jumlah II		843,854,019,607.00	964,554,829,343.00	114.31%	867,673,922,767.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.5	4,409,991,000.00	10,405,943,000.00	235.96%	3,000,779,000.00
Jumlah III		4,409,991,000.00	10,405,943,000.00	235.96%	3,000,779,000.00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.6	72,034,433,000.00	73,934,007,625.00	102.64%	68,578,992,350.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
Jumlah IV		72,034,433,000.00	73,934,007,625.00	102.64%	68,578,992,350.00
Jumlah V (II+III+IV)		920,298,443,607.00	1,048,924,779,968.00	113.98%	939,253,694,117.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1				
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	4,602,500,000.00	2,561,000,000.00	55.64%	69,032,000,000.00
Jumlah VI		4,602,500,000.00	2,561,000,000.00	55.64%	69,032,000,000.00
TOTAL PENDAPATAN (I+V+VI)		940,618,091,607.00	1,097,274,146,527.25	116.65%	1,042,988,240,909.58



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam rupiah)

		2012	2011	%	2012
PENDAPATAN		1.250.306.628.756,40	1.508.529.988.074,55	127%	1.257.332.382.484,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH		93.369.970.967,00	80.738.321.445,55	86%	68.801.769.440,03
Pendapatan Pajak Daerah	A2.1.1.1	23.520.000.000,00	27.436.491.219,35	117%	16.441.145.237,87
Pendapatan Retribusi Daerah	A2.1.1.2	7.606.350.000,00	7.319.426.214,79	96%	6.686.071.987,19
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	A2.1.1.3	14.500.000.000,00	10.548.080.125,81	73%	14.662.407.998,71
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	A2.1.1.4	47.743.620.967,00	35.434.413.885,60	74%	31.010.144.216,28
PENDAPATAN TRANSFER		973.938.049.789,40	1.342.481.332.429,00	138%	1.140.886.080.844,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	A2.1.2.1	838.134.034.724,00	1.210.238.702.429,00	144%	1.000.184.768.844,00
Dana Bagi Hasil Pajak	A2.1.2.1.1	165.445.487.110,00	152.682.103.276,00	92%	152.574.281.697,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	A2.1.2.1.2	456.162.057.614,00	841.036.109.153,00	184%	687.141.509.147,00
Dana Alokasi Umum	A2.1.2.1.3	216.526.490.000,00	216.526.490.000,00	100%	160.468.978.000,00
Dana Alokasi Khusus	A2.1.2.1.4	0,00	0,00		0,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	A2.1.2.2	20.923.324.000,00	20.923.324.000,00	100%	41.632.349.000,00
Dana Penyesuaian	A2.1.2.2.1	20.923.324.000,00	20.923.324.000,00	100%	41.632.349.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	A2.1.2.3	114.880.691.065,40	111.319.306.000,00	97%	99.070.963.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	A2.1.2.3.1	114.880.691.065,40	111.319.306.000,00	97%	99.070.963.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		182.998.608.000,00	165.310.334.200,00	90%	47.642.532.200,00
Pendapatan Hibah	A2.1.3.1	22.024.158.000,00	22.024.158.000,00	100%	10.611.982.200,00
Pendapatan Lainnya	A2.1.3.2	160.974.450.000,00	143.286.176.200,00	89%	37.030.550.000,00
BELANJA		1.719.816.169.156,07	1.241.932.856.177,69	72%	1.119.934.708.193,29
BELANJA OPERASI		915.095.418.791,87	793.027.335.975,68	87%	764.093.331.631,03
Belanja Pegawai	A2.2.1.1	485.106.812.154,78	434.063.593.942,68	89%	379.444.128.499,09
Belanja Barang	A2.2.1.2	350.516.489.040,29	289.501.761.434,00	82,59%	271.124.310.613,94
Belanja Hibah	A2.2.1.3	72.037.681.000,00	64.126.163.012,00	89%	98.897.021.772,00
Belanja Subsidi	A2.2.1.4	0,00	0,00		0,00
Belanja Bantuan Sosial	A2.2.1.5	7.440.436.536,00	5.335.817.587,00	72%	13.792.555.897,00
Belanja Bantuan Keuangan	A2.2.1.6	0,00	0,00		0,00
BELANJA MODAL		798.720.750.425,00	445.688.608.479,70	55,80%	354.911.267.042,33
Belanja Tanah	A2.2.3.1	41.439.930.000,00	24.311.267.259,00	59%	37.138.455.806,00
Belanja Peralatan dan Mesin	A2.2.3.2	95.241.156.167,00	76.371.744.151,00	80%	30.719.328.695,00
Belanja Bangunan dan Gedung	A2.2.3.3	276.511.799.441,00	180.684.170.025,00	65%	115.247.468.585,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Drainase	A2.2.3.4	373.709.851.317,00	154.406.515.304,70	41%	170.807.968.886,33
Belanja Aset Tetap Lainnya	A2.2.3.5	11.888.113.500,00	9.287.841.749,00	83%	847.530.460,00
Belanja Aset Lainnya	A2.2.3.6	209.000.000,00	207.370.000,00	99%	150.502.610,00
BELANJA TAK TERDUGA		5.000.000.000,00	3.216.911.722,31	54%	930.109.319,93
Belanja Tak Terduga	A2.2.4.1	5.000.000.000,00	3.216.911.722,31	54%	930.109.319,93
SURPLUS / (DEFISIT)		(469.509.540.399,67)	346.597.131.896,86	-74%	137.397.674.290,74
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH		526.509.540.399,67	526.509.540.399,67	100%	390.111.066.108,93
Penggunaan Sisa Lebih/Defisit Anggaran (SILPA)	A2.6.1.1	526.509.540.399,67	526.509.540.399,67	100%	390.111.066.108,93
Pencairan Dana Cadangan	A2.6.1.2	0,00	0,00		0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya	A2.6.1.3	0,00	0,00		0,00
PENGELUARAN DAERAH		57.000.000.000,00	13.808.803.000,00	24%	1.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	A2.6.2.1	0,00	0,00		0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	A2.6.2.2	32.000.000.000,00	0,00	0%	1.000.000.000,00
Pembayaran Belanja Utang	A2.6.2.3	25.000.000.000,00	13.808.803.000,00	55%	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		469.509.540.399,67	512.700.737.399,67	109%	389.111.066.108,93
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	859.297.869.296,33		526.509.540.399,67



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

43700.pdf

(dalam rupiah)

Urutan	Catatan	Anggaran 2012	Realisasi 2012	%	Realisasi 2011
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	5.2.b.1	1.013.207.365.800,00	1.605.630.549.097,85	158,47	1.311.166.444.735,70
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.b.1.1	55.000.000.000,00	76.643.425.872,85	139,35	84.553.365.985,70
Pendapatan Pajak Daerah	5.2.b.1.1.1	2.192.750.000,00	3.150.419.162,14	143,67	7.827.027.329,21
Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.b.1.1.2	1.683.815.250,00	2.944.353.180,00	185,90	6.196.060.234,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.b.1.1.3	14.447.000.000,00	16.676.776.022,94	116,82	23.305.888.435,72
Lain-lain PAD yang Sah	5.2.b.1.1.4	36.776.434.750,00	53.671.877.507,77	145,94	47.224.369.986,77
PENDAPATAN TRANSFER	5.2.b.1.2	862.368.825.800,00	1.448.935.438.525,00	168,02	1.195.148.053.250,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.2.b.1.2.1	777.889.040.800,00	1.354.455.854.525,00	175,40	1.108.295.958.590,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.b.1.2.1.1	101.895.495.026,00	218.404.704.212,00	214,34	128.793.401.728,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.2.b.1.2.1.2	378.420.544.874,00	848.477.949.313,00	224,22	727.348.455.864,00
Dana Alokasi Umum	5.2.b.1.2.1.3	289.927.621.000,00	289.927.621.000,00	100,00	245.369.101.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.2.b.1.2.1.4	7.845.380.000,00	7.845.380.000,00	100,00	6.797.000.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.2.b.1.2.2	22.503.730.000,00	22.503.730.000,00	100,00	27.735.015.660,00
Dana Penyesuaian	5.2.b.1.2.2.1	22.503.730.000,00	22.503.730.000,00	100,00	27.735.015.660,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.2.b.1.2.3	61.976.054.900,00	61.976.054.000,00	100,00	59.117.079.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.b.1.2.3.1	61.976.054.900,00	61.976.054.000,00	100,00	59.117.079.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.b.1.3	95.938.540.000,00	80.051.684.700,00	83,53	31.465.025.500,00
Pendapatan Hibah	5.2.b.1.3.1	0,00	0,00		72.775.500,00
Pendapatan Lainnya	5.2.b.1.3.2	95.938.540.000,00	80.051.684.700,00	83,53	31.392.250.000,00
BELANJA	5.2.b.2	1.935.257.643.546,72	1.025.705.028.437,88	53,00	1.036.128.903.912,39
BELANJA OPERASI	5.2.b.2.1	1.113.908.337.197,07	745.787.381.459,28	66,95	689.750.645.559,73
Belanja Pegawai	5.2.b.2.1.1	619.426.860.113,91	413.007.681.699,80	66,68	378.390.260.952,36
Belanja Barang	5.2.b.2.1.2	374.520.612.663,16	224.853.601.147,93	59,98	228.970.663.622,37
Belanja Hibah	5.2.b.2.1.3	119.250.344.500,00	107.677.521.420,00	90,30	78.206.344.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.2.b.2.1.4	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	5.697.900.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.2.b.2.1.5	465.500.000,00	223.277.181,55	45,99	485.477.085,00
BELANJA MODAL	5.2.b.2.2	763.918.306.349,65	233.720.311.699,50	30,59	314.734.231.323,66
Belanja Tanah	5.2.b.2.2.1	45.071.822.000,00	11.441.259.250,00	25,38	319.685.950,00
Belanja Perawatan dan Mesin	5.2.b.2.2.2	67.882.352.197,00	31.968.855.689,00	47,09	38.533.277.215,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.b.2.2.3	178.450.999.500,67	70.687.176.449,00	39,61	39.195.483.656,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jamangan	5.2.b.2.2.4	470.733.912.976,98	116.005.987.411,50	25,28	235.054.220.727,88
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.b.2.2.5	1.779.219.675,00	617.252.700,00	34,69	1.631.583.775,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.2.b.2.3	10.000.000.000,00	237.507.900,00	2,38	546.351.000,00
Belanja Tak Terduga	5.2.b.2.3.1	10.000.000.000,00	237.507.900,00	2,38	546.351.000,00
TRANSFER	5.2.b.2.4	47.431.000.000,00	45.959.827.379,10	96,90	31.097.676.029,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	5.2.b.2.4.1	47.431.000.000,00	45.959.827.379,10	96,90	31.097.676.029,00
SURPLUS/DEFISIT	5.2.b.3	(922.050.277.746,72)	579.925.520.659,97	(62,90)	275.037.540.823,31
PEMBIAYAAN	5.2.b.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.2.b.4.1	1.007.795.277.746,72	1.007.737.347.746,72	99,99	782.757.736.923,41
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	5.2.b.4.1.1	1.007.795.277.746,72	1.007.737.347.746,72	99,99	782.757.736.923,41
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.2.b.4.2	85.745.000.000,00	85.745.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.b.4.2.1	85.745.000.000,00	85.745.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.2.b.4	922.050.277.746,72	921.992.347.746,72	99,99	732.757.736.923,41
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.2.b.5	0,00	1.501.917.868.406,69		1.007.795.277.746,72



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

43700.pdf

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2012	Realisasi 2012	(%)	Realisasi 2011
PENDAPATAN	2 1 1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 1 1 1				
Pendapatan Pajak Daerah	2 1 1 1 1	4 632 993 088,00	4 354 820 473,96	94,00%	4 080 750 475,81
Pendapatan Retribusi Daerah	2 1 1 1 2	1 985 365 500,00	2 334 793 299,00	117,60%	3 893 508 460,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 1 1 1 3	2 961 814 223,07	3 344 673 436,96	112,93%	4 533 946 756,34
Lain-lain PAD yang sah	2 1 1 1 4	33 320 648 161,00	65 951 237 041,59	197,93%	32 315 925 570,78
Jumlah I		42 900 820 972,07	75 985 524 251,51	177,12%	44 824 131 282,93
PENDAPATAN TRANSFER	2 1 1 2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMBANGUNAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	2 1 1 2 1	153 148 927 433,00	146 565 486 765,00	95,69%	139 813 697 962,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2 1 1 2 2	622 546 587 202,00	852 292 526 515,00	136,90%	712 824 846 599,00
Dana Alokasi Umum	2 1 1 2 3	296 210 334 000,00	296 210 334 000,00	100,00%	240 123 668 640,00
Dana Alokasi Khusus	2 1 1 2 4	57 435 080 000,00	43 076 310 000,00	75,00%	73 738 500 000,00
Jumlah II		1 129 340 928 635,00	1 338 134 657 280,00	118,49%	1 166 300 713 191,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Penyesuaian	2 1 1 2 5	32 506 859 000,00	20 033 133 000,00	61,63%	20 581 429 500,00
Jumlah III		32 506 859 000,00	20 033 133 000,00	61,63%	20 581 429 500,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2 1 1 2 6	60 965 926 891,44	62 247 920 000,00	102,10%	56 062 159 000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
Jumlah IV		60 965 926 891,44	62 247 920 000,00	102,10%	56 062 159 000,00
Jumlah V (II+III+IV)		1 222 813 714 526,44	1 420 415 710 280,00	116,16%	1 242 876 022 725,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2 1 1 3				
Pendapatan Hibah	2 1 1 3 1	747 029 000,00			
Pendapatan Lainnya	2 1 1 3 2	85 231 200 000,00	63 901 103 400,00	74,97%	69 431 700 000,00
Jumlah VI		85 978 229 000,00	63 901 103 400,00	74,32%	69 431 700 000,00
TOTAL PENDAPATAN (I+V+VI)		1 351 692 764 498,51	1 560 302 337 931,51	115,43%	1 357 200 132 973,93
BELANJA	2 1 2				
BELANJA OPERASI	2 1 2 1				
Belanja Pegawai	2 1 2 1 1	560 600 415 507,24	406 992 783 674,23	72,42%	334 420 031 729,00
Belanja Barang	2 1 2 1 2	338 844 083 232,58	259 632 426 496,68	77,12%	180 404 880 078,67
Subsidi	2 1 2 1 3	14 577 000 000,00	10 014 806 700,00	68,70%	7 730 032 000,00
Hibah	2 1 2 1 4	16 137 993 300,00	12 929 528 450,00	80,14%	27 487 454 570,14
Bantuan Sosial	2 1 2 1 5	14 617 868 400,00	10 466 592 500,00	71,60%	12 251 164 500,00
Bantuan Keuangan	2 1 2 1 6	40 222 752 770,10	33 854 284 774,61	84,17%	26 741 567 967,70
Jumlah VII		981 800 113 209,92	732 890 421 895,72	74,65%	589 035 110 845,51
BELANJA MODAL	2 1 2 2				
Belanja Tanah	2 1 2 2 1	97 916 532 068,00	4 790 224 000,00	4,89%	2 507 614 000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2 1 2 2 2	76 824 765 632,64	61 939 962 617,94	80,62%	23 066 964 976,18
Belanja Gedung dan Bangunan	2 1 2 2 3	182 395 027 392,50	118 340 265 878,68	64,71%	77 963 268 244,90
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2 1 2 2 4	432 837 584 732,85	276 886 973 932,12	63,97%	340 692 766 639,50
Belanja Aset Tetap Lainnya	2 1 2 2 5	2 526 600 000,00	2 269 030 600,00	89,81%	2 264 415 958,69
Jumlah VIII		792 970 409 815,99	464 226 457 026,94	58,54%	447 294 918 818,17
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	2 1 2 3	29 132 191 530,99	526 703 500,00	1,81%	937 012 241,85
Jumlah IX		29 132 191 530,99	526 703 500,00	1,81%	937 012 241,85

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

6

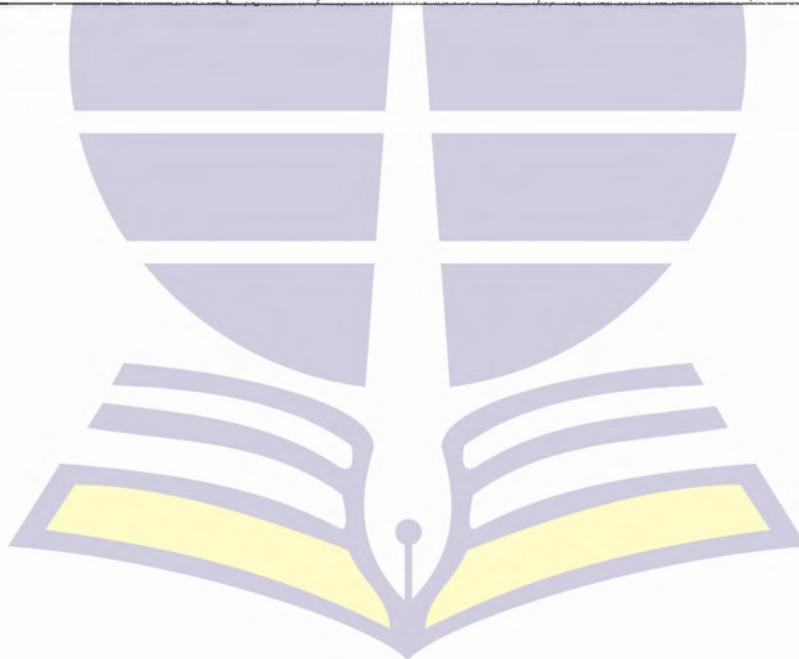


PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

43700.pdf

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2012	Realisasi 2012	(%)	Realisasi 2011
TRANSFER					
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
Bagi Hasil Pajak		-	-		
Bagi Hasil Retribusi		-	-		
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-		-
Jumlah X		-	-		-
TOTAL BELANJA (VII+VIII+IX+X)		1.803.902.714.556,90	1.197.643.582.422,66	66,39%	1.037.267.041.905,53
C. SURPLUS/DEFISIT (A-B)		(452.209.950.058,39)	362.658.755.508,85	-80,20%	319.933.091.068,40
D. PEMBIAYAAN	2.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	2.1.3.1	504.209.950.058,39	504.209.950.058,39	100,00%	187.276.858.989,99
Jumlah XI		504.209.950.058,39	504.209.950.058,39	100,00%	187.276.858.989,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	2.1.3.2	52.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-		-
Jumlah XII		52.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO (XI-XII)		452.209.950.058,39	504.209.950.058,39	111,50%	184.276.858.989,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (C+D)	2.1.4		866.868.705.567,24		504.209.950.058,39





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam rupiah)

		2011	2012	%	2012/2011
PENDAPATAN		1.503.045.361.873,71	1.755.150.062.496,78	116,77%	1.645.576.483.702,96
PENDAPATAN ASLI DAERAH	A.1.1	117.617.162.784,00	83.217.202.104,78	70,75%	89.880.807.940,96
Pendapatan Pajak Daerah	A.1.1.1	1.081.000.000,00	3.362.438.034,60	311,05%	1.227.601.790,00
Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.1.2	1.463.550.000,00	1.903.589.000,00	130,07%	16.700.410.784,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	A.1.1.3	9.000.000.000,00	7.825.359.863,17	86,95%	16.749.378.089,21
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	A.1.1.4	106.072.612.784,00	70.125.815.207,61	66,11%	55.203.417.277,75
PENDAPATAN TRANSFER	A.1.2	1.284.538.304.089,71	1.584.396.336.634,00	123,34%	1.473.089.447.592,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.216.491.329.000,00	1.517.631.275.634,00	124,75%	1.362.466.639.872,00
Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.2.1	52.000.000.000,00	68.074.025.794,00	130,91%	67.038.131.293,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	A.1.2.2	557.325.376.000,00	842.501.298.840,00	151,15%	738.924.532.570,00
Dana Alokasi Umum	A.1.2.3	557.697.933.000,00	557.697.933.000,00	100,00%	518.760.056.000,00
Dana Alokasi Khusus	A.1.2.4	49.468.020.000,00	49.468.020.000,00	100,00%	40.763.900.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00	0,00%	49.496.879.720,00
Dana Penyesuaian	A.1.2.5	0,00	0,00	0,00%	49.496.879.720,00
Transfer Pemerintah Provinsi		68.047.055.089,71	66.765.061.000,00	98,12%	61.105.928.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	A.1.2.6	68.047.055.089,71	66.765.061.000,00	98,12%	61.105.928.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	A.1.3	100.889.815.000,00	87.536.523.758,00	86,76%	82.606.228.170,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00%	0,00
Pendapatan Lainnya		100.889.815.000,00	87.536.523.758,00	86,76%	82.606.228.170,00
BELANJA	A.2	2.113.260.223.171,29	1.567.142.868.186,76	74,16%	1.246.118.765.726,62
BELANJA OPERASI	A.2.1	1.231.890.831.917,29	1.045.592.413.328,76	84,93%	740.242.121.421,80
Belanja Pegawai	A.2.1.1	480.402.488.340,29	410.723.876.533,00	85,50%	324.840.606.536,00
Belanja Barang	A.2.1.2	508.960.978.460,00	423.414.276.269,00	83,19%	308.187.082.804,00
Belanja Subsidi	A.2.1.3	26.543.576.667,00	22.091.196.786,00	82,89%	25.143.358.300,00
Belanja Hibah	A.2.1.4	71.429.550.950,00	55.116.802.344,76	77,16%	24.123.116.900,80
Belanja Bantuan Sosial	A.2.1.5	18.631.087.500,00	14.260.971.396,00	76,54%	38.615.403.581,00
Belanja Bantuan Keuangan	A.2.1.6	125.115.458.000,00	120.075.250.000,00	95,97%	19.332.547.500,00
BELANJA MODAL	A.2.2	880.169.391.254,00	521.350.454.858,00	59,26%	505.849.644.304,82
Belanja Tanah	A.2.2.1	21.679.534.000,00	4.240.223.750,00	19,56%	2.333.977.075,00
Belanja Peralatan dan Mesin	A.2.2.2	95.239.203.165,00	74.582.844.326,00	78,32%	38.638.935.815,00
Belanja Bangunan dan Gedung	A.2.2.3	303.847.751.454,00	187.800.021.863,00	61,81%	156.341.029.229,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.2.4	452.001.685.735,00	239.444.144.819,00	52,99%	294.970.129.885,82
Belanja Aset Tetap Lainnya	A.2.2.5	931.135.000,00	820.081.100,00	88,07%	13.565.572.360,00
Belanja Aset Lainnya	A.2.2.6	6.175.081.990,00	4.663.139.000,00	72,02%	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	A.2.3	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	27.000.000,00
Belanja Tak Terduga	A.2.3	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	27.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	A.3.4	(610.214.861.297,58)	188.007.194.310,02	-30,81%	399.457.717.976,34
PEMBIAYAAN	A.3				
PENERIMAAN DAERAH	A.3.1	780.136.614.236,45	809.191.829.086,45	103,72%	392.040.683.660,11
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	A.3.1.1	780.136.614.236,45	779.983.214.236,45	99,98%	392.040.683.660,11
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	A.3.2	0,00	29.208.614.850,00	-	0,00
PENGELUARAN DAERAH	A.3.2	169.921.752.938,87	15.885.000.000,00	9,35%	31.361.787.400,00
Pembentukan Dana Cadangan		153.836.752.938,87	0,00	0,00%	0,00
Pinjaman Tambahan Ganti Rugi		0,00	0,00	0,00%	26.450.000,00
Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	A.3.2.3	15.200.000.000,00	15.000.000.000,00	98,68%	38.645.000.000,00
Pembayaran Pokok Urang	A.3.2.2	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00%	690.337.400,00
PEMBIAYAAN NETTO		610.214.861.297,58	793.306.829.086,45	130,00%	380.678.896.260,11
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	A.4	0,00	981.314.023.396,47		780.136.614.236,45



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Anggaran 2012	Realisasi 2012	%	Realisasi 2011
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	B.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	B.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	B.1.1.1	11,500,000.00	98,558,593.00	857.03%	69,164,026.00
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1.2	10,000,000.00	140,555,700.00	1405.56%	188,217,075.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disihkan	B.1.1.3	2,866,669,332.00	4,371,433,454.31	152.49%	2,866,669,332.00
Lain-lain PAD yang Sah	B.1.1.4	18,163,000,000.00	24,102,639,470.86	132.70%	83,511,331,604.12
		21,051,169,332.00	28,713,187,218.17	136.40%	86,635,382,037.12
PENDAPATAN TRANSFER	B.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	B.1.2.1				
Dana bagi Hasil Pajak	B.1.2.1.1	44,357,072,406.85	37,000,736,466.00	83.42%	43,634,898,934.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	B.1.2.1.2	480,068,688,906.70	815,261,352,209.00	169.82%	668,686,527,551.00
Dana Alokasi Umum	B.1.2.1.3	144,500,470,000.00	143,330,129,000.00	99.19%	149,340,893,000.00
Dana Alokasi Khusus	B.1.2.1.4	6,166,530,000.00	1,849,959,000.00	30.00%	2,650,500,000.00
		675,092,761,313.55	997,442,178,675.00	147.75%	864,312,819,485.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	B.1.2.2				
Dana Penyesuaian		-	2,622,341,000.00	#DIV/0!	9,427,593,000.00
		-	2,622,341,000.00	#DIV/0!	9,427,593,000.00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	B.1.2.3				
Bagi Hasil Pajak		63,589,368,265.43	51,684,535,000.00	81.28%	51,095,885,000.00
		63,589,368,265.43	51,684,535,000.00	81.28%	51,095,885,000.00
Jumlah Pendapatan Transfer		738,682,129,578.98	1,051,749,052,675.00	142.38%	924,836,297,485.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	B.1.3				
Pendapatan Hibah				#DIV/0!	
Pendapatan Lainnya		117,062,400,000.00	102,461,584,400.00	87.53%	18,817,700,000.00
		117,062,400,000.00	102,461,584,400.00	87.53%	18,817,700,000.00
Jumlah Pendapatan		876,795,698,910.98	1,182,923,824,293.17	134.91%	1,030,289,379,522.12

Tabel 14a. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tarakan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 14a. Gross Regional Domestic Product of Tarakan Municipality
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	1.846,05	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1.072,69	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.902,84	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	12,22	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	15,04	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	2.233,84	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3.145,94	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1.706,89	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	292,96	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	524,59	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	405,73	-	-	-	-
L	Real Estate/Real Estate Activities	180,38	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	105,30	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	701,04	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	344,44	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	216,66	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	100,68	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		14.807,29	-	-	-	-
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		70,28	-	-	-	-

Catatan/Note:
* - Angka sementara/Preliminary figures
** - Angka sangat sementara/Very Preliminary figures

Tabel 14b. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tarakan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 14b. Gross Regional Domestic Product of Tarakan Municipality
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	1.770,18	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	976,90	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.846,64	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	13,44	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	12,93	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	2.054,77	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2.899,44	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1.604,99	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	239,34	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	512,17	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	369,39	-	-	-	-
L	Real Estate/Real Estate Activities	192,31	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	106,11	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	641,25	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	305,42	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	228,57	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	97,93	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		13.871,79	-	-	-	-
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		10,08	-	-	-	-

Catatan/Note:
* - Angka sementara/Preliminary figures
** - Angka sangat sementara/Very Preliminary figures

Tabel 7a. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bulungan
 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
 Table 7a. Gross Regional Domestic Product of Bulungan Regency
 at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	1.876,65	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4.829,57	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.449,94	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2,18	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	6,38	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	926,40	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	689,96	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	371,73	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	103,92	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	204,93	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	72,28	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	93,69	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	10,71	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	488,58	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	273,84	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	60,14	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	55,37	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		11.516,45	-	-	-	-
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		96,14	-	-	-	-

Catatan/Note:
 * Angka sementara/Preliminary figures
 ** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 7b. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bulungan
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
 Table 7b. Gross Regional Domestic Product of Bulungan Regency
 at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	1.594,62	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3.030,33	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.038,39	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2,44	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	6,37	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	821,52	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	612,43	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	338,16	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	82,40	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	201,09	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	63,70	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	92,04	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	9,48	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	398,10	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	244,95	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	57,80	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	52,56	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		8.646,40	-	-	-	-
Laaju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		7,92	-	-	-	-

Catatan/Note:
 * Angka sementara/Preliminary figures
 ** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 8a Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nunukan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 8a. Gross Regional Domestic Product of Nunukan Regency
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	2.195,04	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	6.337,54	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.007,05	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2,36	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5,28	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	889,63	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	628,73	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	218,39	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	118,40	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	194,90	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	39,84	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	65,13	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	5,04	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	268,40	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	131,35	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,50	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	42,24	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		12.151,83	-	-	-	-
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		78,06	-	-	-	-

Catatan/Note:
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 8b Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nunukan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 8b. Gross Regional Domestic Product of Nunukan Regency
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	2.009,74	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5.082,22	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	927,57	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2,61	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5,29	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	769,45	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	586,14	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	198,33	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	106,33	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	190,84	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	35,49	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	63,51	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,63	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	235,05	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	112,61	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,42	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	41,11	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		10.373,32	-	-	-	-
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		8,95	-	-	-	-

Catatan/Note:
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 6a. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Malinau
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 6a. Gross Regional Domestic Product of Malinau Regency
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	858,69	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2.301,15	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	174,07	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1,35	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	3,54	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	843,30	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	199,88	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	192,41	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	86,25	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	26,24	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	10,55	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	14,80	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	10,97	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	547,60	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	90,75	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	80,10	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	3,51	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5.445,17	-	-	-	-
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		79,35	-	-	-	-

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 6b. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Malinau
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 6b. Gross Regional Domestic Product of Malinau Regency
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	809,42	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2.285,53	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	162,13	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1,50	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	3,54	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	725,49	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	195,35	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	178,72	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	76,97	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	25,18	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	9,21	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	12,74	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	9,72	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	448,32	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	83,83	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	70,90	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	3,10	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5.101,64	-	-	-	-
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		4,23	-	-	-	-

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 10a. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tana Tidung
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)

Table 10a. Gross Regional Domestic Product of Tana Tidung Regency
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	980,52	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1.174,63	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	69,87	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,12	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,33	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	439,18	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	128,15	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	23,12	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	5,96	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	1,18	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,18	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	19,52	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,59	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	293,14	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	44,15	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,16	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	12,68	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		3.198,46	-	-	-	-
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		180,45	-	-	-	-

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 10b. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tana Tidung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)

Table 10b. Gross Regional Domestic Product of Tana Tidung Regency
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	911,09	-	-	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1.040,47	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	64,51	-	-	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,13	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,34	-	-	-	-
F	Konstruksi/Construction	380,18	-	-	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	117,47	-	-	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	21,25	-	-	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	5,33	-	-	-	-
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	1,12	-	-	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,02	-	-	-	-
L	Real Estat/Real Estate Activities	17,35	-	-	-	-
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,55	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	271,07	-	-	-	-
P	Jasa Pendidikan/Education	41,41	-	-	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,06	-	-	-	-
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	12,17	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		2.889,51	-	-	-	-
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		0,95	-	-	-	-

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 5a. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tarakan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 5a. Gross Regional Domestic Product of Tarakan Municipality
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	2.126,49	2.445,02	2.706,94	2.823,09
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	1.245,79	1.407,93	1.332,71	1.207,18
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-	2.182,10	2.589,08	2.835,53	3.130,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	11,84	12,46	13,48	17,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	16,13	18,13	19,51	20,74
F	Konstruksi/Construction	-	2.512,19	2.880,64	3.159,53	3.607,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	3.402,94	3.866,69	4.417,17	4.998,49
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	2.066,19	2.460,92	2.933,57	3.367,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	343,04	421,02	470,29	533,29
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	596,38	712,34	792,11	884,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	451,56	506,77	549,96	619,77
L	Real Estat/Real Estate Activities	-	213,95	242,58	264,59	280,13
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-	115,06	131,47	136,07	141,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-	759,22	893,89	933,67	1.068,96
P	Jasa Pendidikan/Education	-	433,81	531,31	599,05	706,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	254,22	310,47	393,28	487,50
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	-	107,13	141,83	182,22	226,85
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-	16.838,05	19.572,55	21.739,66	24.121,85
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		-	76,96	86,14	92,29	98,79

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 5b. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tarakan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 5b. Gross Regional Domestic Product of Tarakan Municipality
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	1.879,73	2.013,05	2.163,47	2.231,11
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	1.048,84	1.068,10	1.080,67	1.068,38
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-	2.015,00	2.122,12	2.211,96	2.354,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	13,75	14,77	19,01	20,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	13,26	13,95	14,39	15,03
F	Konstruksi/Construction	-	2.180,39	2.395,56	2.444,53	2.620,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	3.067,45	3.187,29	3.315,86	3.487,80
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	1.768,67	1.907,93	2.074,38	2.217,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	259,42	279,55	288,88	309,76
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	577,83	682,98	744,30	811,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	382,15	405,99	416,84	439,43
L	Real Estat/Real Estate Activities	-	227,38	234,58	241,46	245,62
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-	109,12	115,14	113,16	110,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-	661,24	729,75	724,98	795,57
P	Jasa Pendidikan/Education	-	373,18	437,13	472,19	513,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	258,86	296,23	340,03	384,20
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	-	99,90	107,51	124,41	139,58
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-	14.936,16	16.011,62	16.790,52	17.764,22
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		-	7,67	7,20	4,86	5,80

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 4a. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nunukan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)

Table 4a. Gross Regional Domestic Product of Nunukan Regency
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	2.503,17	3.147,51	3.390,15	3.972,26
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	7.111,11	7.960,07	7.441,39	7.401,09
C Industri Pengolahan/Manufacturing	-	1.059,98	1.190,26	1.290,25	1.368,24
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	2,29	2,45	3,50	4,36
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	5,85	6,27	6,62	7,25
F Konstruksi/Construction	-	935,54	1.008,85	1.065,34	1.218,11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	676,61	737,57	818,31	931,11
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	248,37	294,44	333,15	356,91
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	123,88	134,36	149,59	167,86
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	210,80	231,16	255,12	275,93
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	45,92	49,63	54,65	61,61
L Real Estate/Real Estate Activities	-	69,96	73,12	77,37	82,87
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	-	5,58	5,99	6,37	6,22
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	-	281,47	419,20	457,74	494,63
P Jasa Pendidikan/Education	-	161,23	188,79	221,84	252,86
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	2,61	2,89	3,59	4,03
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	-	44,49	50,22	62,98	74,29
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-	13.488,87	15.502,78	15.637,96	16.679,65
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)	-	82,90	91,17	88,05	89,92

Catatan/Note:
* : Angka sementara/Preliminary figures
** : Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 4b. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Nunukan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)

Table 4b. Gross Regional Domestic Product of Nunukan Regency
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	2.236,19	2.582,61	2.849,73	3.130,08
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	5.531,25	6.039,23	5.897,88	5.775,98
C Industri Pengolahan/Manufacturing	-	960,72	1.021,36	1.089,16	1.135,82
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	2,65	2,93	3,56	3,75
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	5,93	6,29	6,48	6,90
F Konstruksi/Construction	-	773,97	791,93	809,37	858,69
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	616,52	636,99	663,27	710,55
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	215,56	244,19	264,50	272,91
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	109,63	116,47	124,44	133,37
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	205,73	224,39	246,41	259,79
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	37,98	39,19	41,81	44,31
L Real Estate/Real Estate Activities	-	68,41	71,51	74,83	77,65
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	-	5,02	5,32	5,58	5,27
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	-	235,73	318,45	336,21	352,04
P Jasa Pendidikan/Education	-	133,20	151,63	171,25	178,63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	2,47	2,62	2,93	3,05
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	-	42,85	44,71	49,33	53,84
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-	11.183,82	12.299,82	12.636,53	13.002,64
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)	-	7,81	9,98	2,74	2,90

Catatan/Note:
* : Angka sementara/Preliminary figures
** : Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 3a. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tana Tidung
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 3a. Gross Regional Domestic Product of Tana Tidung Regency
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	1 105,13	1 261,38	1 429,37	1 534,25
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	1 238,97	1 233,12	1 123,69	1 061,69
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-	74,25	82,06	90,30	101,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	0,19	0,30	0,44	0,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	0,40	0,46	0,50	0,57
F	Konstruksi/Construction	-	505,11	563,34	612,95	698,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motori/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	141,78	153,12	173,96	201,12
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	24,96	28,12	31,17	34,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	6,65	7,42	8,16	9,08
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	1,24	1,33	1,44	1,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	3,38	3,55	3,75	4,24
L	Real Estat/Real Estate Activities	-	21,63	24,11	26,38	30,19
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-	0,64	0,69	0,75	0,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	-	331,87	368,97	419,73	461,70
P	Jasa Pendidikan/Education	-	47,11	51,71	57,40	62,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	2,31	2,37	2,54	2,77
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	-	13,48	14,15	15,43	17,08
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-	3 519,11	3 796,20	3 997,97	4 222,23
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		-	185,36	186,34	182,63	179,69

Catatan/Note
* - Angka sementara/Preliminary figures
** - Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 3b. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tana Tidung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
Table 3b. Gross Regional Domestic Product of Tana Tidung Regency
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	989,50	1 045,46	1 067,75	1 057,75
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	1 094,00	1 120,14	1 086,24	1 055,61
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-	66,40	69,51	73,49	77,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	0,22	0,35	0,42	0,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	0,39	0,44	0,46	0,51
F	Konstruksi/Construction	-	401,78	425,16	434,16	474,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motori/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	122,99	129,00	136,80	145,65
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	22,09	23,27	24,10	25,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	5,50	5,73	6,01	6,39
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	1,16	1,18	1,23	1,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	3,15	3,22	3,31	3,46
L	Real Estat/Real Estate Activities	-	18,22	19,32	20,31	21,38
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-	0,56	0,58	0,59	0,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	-	287,22	305,46	318,32	327,04
P	Jasa Pendidikan/Education	-	42,66	45,51	46,67	48,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	2,13	2,18	2,24	2,32
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	-	12,47	12,63	12,92	13,46
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-	3 050,44	3 206,13	3 235,01	3 262,60
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		-	5,57	5,20	0,81	0,85

Catatan/Note
* - Angka sementara/Preliminary figures
** - Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 2a. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bulungan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)

Table 2a. Gross Regional Domestic Product of Bulungan Regency
at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	1.902,23	2.065,93	2.234,71	2.471,70
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	4.998,87	4.963,84	4.136,95	3.837,88
C Industri Pengolahan/Manufacturing	-	1.554,47	1.674,45	1.830,43	1.983,65
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	2,32	2,66	3,54	4,57
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	6,58	7,04	7,58	8,16
F Konstruksi/Construction	-	928,77	1.116,34	1.305,84	1.486,01
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	727,00	795,50	911,54	999,20
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	419,78	482,83	530,26	575,69
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	115,75	134,65	160,62	178,40
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	224,02	247,43	272,34	297,20
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	82,77	89,26	102,37	113,70
L Real Estat/Real Estate Activities	-	99,25	119,44	139,29	149,61
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	-	11,64	14,18	15,82	16,22
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-	525,04	653,27	812,37	923,78
P Jasa Pendidikan/Education	-	308,13	347,92	406,58	452,25
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	63,42	71,26	86,19	102,99
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	-	58,95	68,16	86,74	106,10
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-	12.028,98	12.854,17	13.043,16	13.687,12
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)	-	97,81	101,94	100,81	103,27

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 2b. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bulungan
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)

Table 2b. Gross Regional Domestic Product of Bulungan Regency
at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	1.618,23	1.584,10	1.659,64	1.680,23
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	3.200,83	3.294,39	3.012,65	2.968,37
C Industri Pengolahan/Manufacturing	-	1.100,00	1.137,65	1.214,97	1.266,24
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	2,72	3,12	3,80	4,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	6,64	7,05	7,42	7,76
F Konstruksi/Construction	-	900,48	1.001,69	1.108,76	1.166,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	631,75	659,81	714,30	741,90
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	365,69	395,48	409,58	423,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	88,12	94,64	102,75	110,47
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	218,31	239,05	262,15	280,15
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	69,28	71,98	77,70	81,78
L Real Estat/Real Estate Activities	-	104,12	116,38	125,37	129,53
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	-	9,95	10,91	11,61	11,78
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-	411,18	466,16	522,25	570,25
P Jasa Pendidikan/Education	-	268,25	294,78	324,19	335,27
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	60,23	65,00	73,54	80,14
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	-	54,49	58,73	66,46	73,73
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-	9.110,27	9.500,92	9.697,14	9.929,98
Leju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)	-	5,36	4,29	2,07	2,40

Catatan/Note
* Angka sementara/Preliminary figures
** Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 1a. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Malinau
 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
 Table 1a. Gross Regional Domestic Product of Malinau Regency
 at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	851,10	870,69	936,87	1.024,11
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	2.750,37	3.131,06	3.277,95	3.290,66
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-	181,60	194,73	211,60	225,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	1,35	1,49	2,00	2,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	3,67	3,98	4,20	5,24
F	Konstruksi/Construction	-	924,74	1.025,05	1.064,55	1.175,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	219,81	244,51	253,49	273,13
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	196,76	211,53	219,44	226,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	99,43	108,73	118,61	124,31
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	20,85	20,75	22,65	23,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	11,91	12,78	15,36	16,57
L	Real Estat/Real Estate Activities	-	15,95	16,02	17,58	18,58
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-	10,40	11,97	12,20	13,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	-	640,66	528,08	516,17	551,08
P	Jasa Pendidikan/Education	-	100,57	129,76	159,12	174,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	72,71	75,79	88,90	96,70
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	-	3,65	3,94	4,42	4,92
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-	6.105,53	6.590,84	6.925,13	7.249,66
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)/Per Capita GRDP (Million Rupiahs)		-	85,39	88,50	89,37	89,92

Catatan/Note:
 * - Angka sementara/Preliminary figures
 ** - Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Tabel 1b. Produk Domestik Regional Bruto Kab. Malinau
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Miliar Rupiah)
 Table 1b. Gross Regional Domestic Product of Malinau Regency
 at 2010 Constant Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	-	779,02	762,34	776,72	792,04
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-	2.773,31	3.277,29	3.486,33	3.453,59
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-	157,87	159,57	164,83	173,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-	1,57	1,73	2,06	2,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	-	3,73	4,00	4,12	4,71
F	Konstruksi/Construction	-	790,08	873,04	857,65	907,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-	207,94	223,20	226,84	241,70
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-	178,97	187,93	191,13	197,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-	81,39	91,01	93,18	98,22
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	-	22,29	20,99	21,53	23,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-	10,05	10,00	11,16	11,33
L	Real Estat/Real Estate Activities	-	13,07	13,66	13,97	14,70
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-	9,17	9,65	9,73	10,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	-	504,46	414,17	402,83	431,73
P	Jasa Pendidikan/Education	-	91,58	105,15	113,54	116,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-	63,43	60,30	64,57	70,84
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	-	3,08	3,20	3,42	3,69
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-	5.691,02	6.217,22	6.445,62	6.555,93
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)/The GRDP Growth Rate (Percent)		-	11,55	9,25	3,67	1,71

Catatan/Note:
 * - Angka sementara/Preliminary figures
 ** - Angka sangat sementara/Very preliminary figures